

MENYONGSONG SEWINDU AL-ZAYTUN

BERITA INDONESIA[®]

EDISI 40 TAHUN II ★ 08 - 21 JUNI 2007

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

SARANG KORUPSI SISTEMIK



ISSN 1907-977X



9 771907 977085

Beras Basmati Al-Zaytun

Introduksi India

Beras Basmati adalah dari bangsa padi asal India dan Pakistan. Basmati dalam bahasa Urdu/Hindi berarti harum dan wangi, bentuk bulirnya panjang .

Beras Basmati yang harum terkenal di seluruh dunia, banyak orang ingin menanamnya. Harganya pun menawan tinggi. Kini di Indonesia telah dibudidayakan, produksinya sangat baik. Tepatnya di Al-Zaytun, sejak tahun 2005 telah ditanam ratusan hektar, produksinya cukup memuaskan.

Beras Basmati produk Al-Zaytun memiliki panjang tidak kurang dari 7 mm dengan tampilan putih bersinar.

Indonesia mengimpor banyak Beras Basmati dari India dan Pakistan untuk memenuhi konsumen penggemarnya.

Beras Basmati produk Al-Zaytun diharapkan dapat mengimbangi import yang telah berjalan.

Bagi penggemar Nasi Briyani, Nasi Kabuli dll, kiranya tidak lagi bergantung Beras Basmati import, Al-Zaytun siap memasok.

Tentunya harga pasti bersaing, termasuk citarasanya.

Bumi Indonesia memberi citarasa Beras Basmati yang spesifik. Silahkan mencoba Beras Basmati produk Al-Zaytun.

Syukria.

Nutrition Highlights *)

Basmati rice, 1 cup (200g) (cooked)

Calories : 205

Protein : 4.2g

Carbohydrate : 44.5g

Total Fat : 0.44g

Fiber : 0.63g

***Good source of :**

Iron : 1.9mg

Selenium : 11.8mcg

Thiamine : 0.26mg

Niacin : 2.3mg

*) Sumber : The Truestar Health Encyclopedia



Sampul/Illustrasi:
Dendy Hendrias

Edisi No. 40/Th.II/ 08 - 21 Juni 2007

DARI REDAKSI 4
SURAT KOMENTAR 5
HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA 7
BERITA TERDEPAN 12
VISI BERITA 13

BERITA UTAMA

INDONESIA SARANG KORUPSI SISTEMIK

Korupsi di Indonesia sudah dianggap 'membudaya' dan semakin sistemik, berlangsung mulai dari tingkat tertinggi pemerintahan hingga paling bawah. Namun, korupsi yang sistemik itu sangat sulit dibuktikan, sebab para pelakunya sudah semakin terampil menghilangkan jejak. 14



"Sang Gurita" Yang Sulit Dibuktikan 18
 Kekuasaan Cenderung Korup 20
 Dari Rekening Liar Sampai Kado Pernikahan 21
 Korupsi Bergantung Niatnya 23
 Jangan Biarkan Orang Berfoya-foya 25
 Semuanya Adalah Permainan 27

LINTAS MEDIA

Presiden dan Capres di antara 28

LINTAS TAJUK

Bersama Membangun Sektor Riil 29

BERITA OBITUARI

Selamat Jalan Sahabat Kami 30

BERITA KHAS

Nikmat Membawa Sengsara 32

BERITA EKONOMI

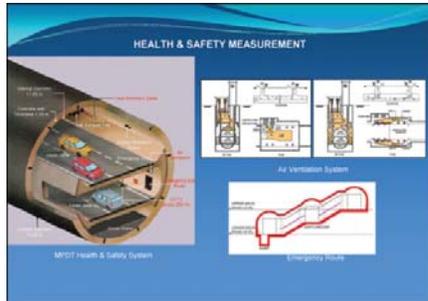
Land Reform dan Setumpuk Hambatan 40
 Monopoli Industri Ponsel Digugat 41

BERITA NASIONAL

Bang Yos Dilecehkan Australia 42
 Insiden Berdarah di Pasuruan 43

BERITA METROPOLITAN

Dua Terowongan Untuk Jakarta 44



BERITA DAERAH

MTQ Kaltim di Bulungan 46



Bupati Lily Hambali Puji Wartawan 47
 DR. Bruce Walker di SMPN 4 Purwakarta 47
 Menuju Bandung Sehat 2007 48
 DPRD OKI Bertandang ke Kukar 49

BERITA POLITIK

Fauzi Gandeng Prijanto 50

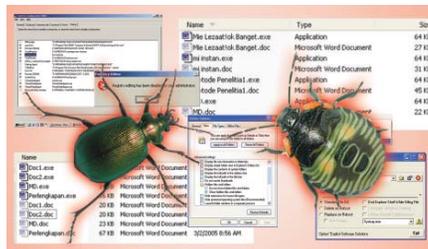
BERITA HANKAM

PPRC TNI Kuasai Tarakan 51



BERITA IPTEK

Membasmi Tuntas Virus Lokal 52



BERITA KESEHATAN

Melawan AIDS di 'Puskesmas Turki' 55

BERITA TOKOH

Setiawan Djody 56
 Hatta Rajasa 56
 Akbar Tandjung 57

BERITA HUKUM

Bikin Ekstasi Pasti Mati 58
 Nasib Saudara di Negeri Jiran 58



LENTERA MENYONGSONG SEWINDU AL-ZAYTUN SEKILAS SEJARAH AL-ZAYTUN

Menyongsong hari ulang tahun (milad) Sewindu Al-Zaytun, 27 Agustus 1999 – 27 Agustus 2007, kami menyajikan kilas balik kiprah dan persembahan emas Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian, ini dalam memaknai perjalanan kehidupan bangsa ini di tengah bergulirnya arus reformasi.....34

Komando Haram dari Balik Jeruji 59
 Memutus Rantai Jaringan 59
 Korupsi BRR Tidak Diusut 60
 Saksi Kunci Pembunuhan Munir 60
 Hanya Koruptor yang Diburu 60

BERITA BUDAYA

SCTV Music Awards 2007 61
 Belajar di Desa Bahasa 61

BERITA PEREMPUAN

Ligaya Ita Tumbelaka 62

BERITA MANCANEGARA

Junta Militer Tak Bergeming 63



BERITA HUMANIORA

Menabur Asap Menuai Maut 64

BERITA OLAAHRAGA

Indonesia Tuan Rumah 66
 Ronaldo Tak Prima 66
 PON XVII Kalimantan Timur 66

Pemimpin Umum:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Pemimpin Redaksi:
Ch Robin Simanullang

Redaktur Senior:
MYR Agung Sidayu
Imam Supriyanto
Dendy Hendrias
Suryo Pranoto

IN HEADNEWS (Liputan, Litbang & Pusdat):
Mangatur Lorielcide Paniroy (Wakil Redaktur Eksekutif)

Sekretaris Redaksi:
Retno Handayani

Redaktur:
Suryo Pranoto
Haposan Tampubolon
Henry Maruwasas

Staf Redaksi:
Samsuri
Nawawi
Ikhwan Triatmo
Sarjiman
Doan Adikara Pudan
Amron Ritonga

Wartawan Foto:
Wilson Edward

Redaktur Bahasa dan Pracetak:
Marjuka Situmorang
Mangatur Lorielcide Paniroy

Desainer:
ESERO Design, Arief Maulana

Biro Redaksi:
Medan: HM Aulia E Panggabean (Kepala)
Bontor Simanullang, Jawa Barat: Ade Wiharyana,
Bernard Sihite, Prana Citra, **Tarakan:** Sudirman
Leonard Pohan

Penerbit:
PT Berita Satria Wiratama
Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia
dan PT Citraprinsip Publikasindoindo

Komisaris:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Direktur/Pemimpin Perusahaan:
Ch Robin Simanullang

Wakil Pemimpin Perusahaan:
Samsuri

Iklan dan Promosi:
Imam Supriyanto
Herni Dewi Farida

Keuangan dan Umum:
Mangatur Lorielcide Paniroy

Sirkulasi dan Distribusi:
Abdul Halim
Marjuka Situmorang

Harga:
Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

Percetakan:
PT Gramedia
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Alamat Redaksi/Tata Usaha:
Jalan Cucakrawa No.14A
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736
Fax. 9101871

E-mail:
redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

Website:
www.beritaindonesia.co.id

ISSN: 1907-977X



Rapat redaksi 1 Juni 2007 yang didedikasikan buat Maruwasas Henry. foto: berindo wilson

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera,

Sidang Pembaca,

Izinkan kami untuk terlebih dahulu memberitahu bahwa salah seorang redaktur terbaik yang pernah kami miliki, **Henry Maruwasas Purba**, pada hari Kamis malam (31/5) telah mendahului kami kembali ke alam keabadian. Almarhum meninggal saat pikiran dan tenaganya sedang dikerahkan secara penuh untuk mempersiapkan edisi yang kini di tangan pembaca.

Edisi kali ini kami dedikasikan kepada Almarhum yang kami anggap meninggal bagi kebesaran dan kejayaan majalah *Berita Indonesia*. Sebab banyak warisan pemikiran yang ditularkannya kepada kami, rekan-rekannya, yang hanya bisa dirasakan tapi sulit untuk diurai dengan kata-kata. Dedikasi kami pada edisi ini, dan tulisan obituari tentangnya adalah persembahan terbaik yang bisa kami berikan kepada pembaca untuk mengenang pria ramah nan murah senyum ini. Selamat jalan kawan, kami akan meneruskan cita-cita-mu membangun dunia pers yang sehat dan bermartabat di bumi Indonesia.

Sidang Pembaca yang budiman,

Berita Utama kali ini adalah karya terakhir sahabat kami Henry Maruwasas Purba, yang menyoroti secara tajam perilaku korupsi yang berlangsung secara sistemik dan mampu bertahan lama namun sulit sekali untuk terendus hukum. Karenanya kami menilai ribut-ribut soal aliran dana DKP dan dana asing yang mengalir ke pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2004, adalah puncak gunung es atau sang gurita yang sulit dibuktikan.

Sejumlah tulisan Henry pemilik kode nama "MH" kami turunkan secara utuh kali ini. Yaitu *Berita Khas*, *Berita Ekonomi* bahkan untuk pertama kali *Visi Berita* masih sempat ditorehkannya. Silakan pembaca menilai kejujuran hati sahabat kami ini menuangkan gagasan dan pemikirannya demi kemaslahatan bangsa yang dicintainya.

Gubernur Sutiyoso seorang tipe pemimpin bermental platinum, tegas namun benar. Ia hari Selasa (29/5) siang tiba di Australia diundang untuk meresmikan *sister city* Jakarta-New South Wales. Sorenya dipaksa menandatangani surat pemanggilan bersaksi di pengadilan terkait kasus di Balibo tahun 1975 namun ia menolak. Malam itu juga ia tinggalkan Australia kembali ke Jakarta. Setibanya Rabu (30/5) pagi ia gelar konferensi pers, mengeluarkan pernyataan telah memperoleh tindakan pelecehan di negeri Kanguru itu. Pers ramai memberitakan. Seseorang bila tiba waktunya menjadi bintang tak akan ada kekuatan yang bisa membendung.

Sidang Pembaca,

Hitungan mundur beberapa minggu ke depan Al-Zaytun akan genap berusia sewindu. Berkenan dengan itu Pemred kami yang juga Pemimpin Redaksi *Tokoh Indonesia*, Ch Robin Simanullang menurunkan tulisan *Lentera* berisi kilas balik kesejarahan Al-Zaytun. Ia memberi judul, "Menyongsong Sewindu Al-Zaytun".

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke

Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:
• http ://www.beritaindonesia.co.id/surat_pembaca/
• email : redaksi@berindo.com
• surat : Jalan Cucakrawa No.14A Bukit Duri, Tebet, Jakarta 12840
Telp. (021) 70930474, 8293113
(021) 83701736
Fax. (021) 83787235

Anggota DPR Mirip Anak TK

Sebagai rakyat terus terang saya merasa sangat miris melihat tingkah laku wakil rakyat kita yang duduk di DPR. Terakhir kali saya melihat di TV saat Rapat Interpelasi mengenai dukungan Resolusi DK PBB. Tingkah lakunya seperti tidak terpelajar atau bisa dikatakan kalau ambil ungkapan Gus Dur mirip Anak TK berebut permen. Coba dipelajari Tata Tertib DPR dulu dong dimana Presiden berhak untuk tidak hadir dan mewakilkan untuk memberikan jawaban, hal ini juga pernah terjadi beberapa kali di era pemerintahan Megawati. Sepertinya

partai pengusung Capres yang kalah masih berusaha menjatuhkan SBY dan bukannya bekerja sama untuk membangun negara ini. Saya pribadi heran kok untuk urusan negara lain DPR bisa bersemangat sekali rapat, tetapi kalau untuk urusan rakyat sendiri yang kelaparan (busung lapar), sekolah rusak, bencana, jalan rusak, banjir, dan sebagainya malah pada mangkir. Anggota DPR yang terhormat hanya sibuk minta kenaikan gaji, tunjangan, fasilitas dan laptop baru. Saya hanya bisa berharap mudah-mudahan wakil rakyat yang seperti ini tidak dipilih lagi dengan jalan rakyat jangan pilih lagi partainya di Pemilu 2009.

CH Gunawan

cherguna@yahoo.com

Interpelasi Lapindo Lebih Penting

Saya sangat kecewa atas perseteruan terus menerus kaum elite politik negeri ini. Kalau seperti ini kapan mereka bisa bekerja dengan baik demi rakyat, karena nuansa perseteruan sepertinya diwarnai kepentingan pribadi. Masalah interpelasi Iran yang diusung wakil rakyat memang bagus. Tetapi kalau boleh usul, sebaiknya wakil rakyat lebih mementingkan interpelasi Lapindo. Dimana

warga Sidoarjo setahun berlalu tetapi kehidupan dan ganti rugi masih belum jelas. Buat para anggota DPR yang terhormat, saya berharap Anda-Anda bersikap lebih mementingkan rakyat Indonesia.

Eco Puruwito

galih_2003@yahoo.com

Kekerasan di TV

Pada tanggal 22 Mei, jam 13.20 saya sedang menonton TV. Karena iklan, saya memindah-mindah saluran dan sangat terkejut ketika menonton Lativi. Tayangan Lativi saat itu sangat sadis, di sana digambarkan Lita Zein sedang sekarat berdarah-darah dengan obeng tertancap di lehernya. Saya tidak tahu judul sinetron apa, tapi yang jelas tayangan itu disiarkan siang hari di mana banyak anak-anak menonton TV. Apakah pemerintah tidak menyortir tayangan-tayangan yang cocok disiarkan di siang hari? Kepada pihak Lativi, mohon menayangkan siaran yang bermutu dan berbobot, jangan hanya menayangkan acara-acara yang berbau kekerasan dan pornografi. Mohon perhatian yang mendalam mengenai hal ini karena menyangkut moral dan pendidikan bangsa ini di ke

BUNG WARTO

DIA YANG CETUSKAN
REFORMASI
DIA YANG
KAWAL REFORMASI
DIA JUGA
YANG KHIANATI
REFORMASI



KAMU OMONGIN
YANG DI PASURUAN
APA YANG DI
JOGYA
SIH ?

DKM 07

depan.

Maya Sisnadewi
maya.sisnadewi@indosat.com

Lumpur Lapindo Bencana Nasional

Saya warga negara Indonesia yang berdomisili di Australia, dan saya selalu mengikuti perkembangan kondisi di Indonesia. Yang ingin saya sampaikan dalam surat pembaca ini adalah "penyesalan" saya mengenai penanganan masalah lumpur Lapindo. Karena yang selama ini dikerjakan membangun tanggul itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya mengalihkan masalah yang akhirnya akan menjadi bencana nasional kalau sampai tanggul ini pecah. Kalau hal ini sampai terjadi, kondisi yang sudah parah akan menjadi lebih parah. Terutama rakyat di Jawa Timur karena

saat ini hubungan Surabaya dan Malang terputus gara-gara jalan tol yang terputus. Pungutan liar terjadi di mana-mana sepanjang jalan tikus Surabaya-Malang. Saya mengerti kalau pemerintah bekerja berdasarkan prioritas, bayak sekali prioritas yang ada harus dikerjakan saat ini. Tetapi dengan kesulitan ekonomi yang timbul karena masalah ini, tidakkah cukup membuat masalah ini mendapatkan prioritas dari pemerintah Indonesia? Mendapat perhatian dari bapak-bapak yang berkuasa di sana? Berapa banyak keluarga yang harus menderita karena kehilangan pekerjaan, rumah dan sebagainya karena lumpur Lapindo? Kalau memang kita tidak mempunyai kemampuan secara teknis untuk menyelesaikan masalah ini sebaiknya kita harus la-

pang dada mengakui kegagalan/kesalahan dan memanggil ahli dari luar untuk menyelesaikan masalah ini.

Tony
jam25000@yahoo.com.au

Label Tontonan di Televisi

Saya berpendapat alangkah lebih baik jika setiap stasiun televisi di Jakarta mulai memberikan tanda yang menunjukkan bahwa acara ini layak atau tidak untuk dikonsumsi remaja atau yang masih di bawah umur. Misalnya dengan memberi logo pada sudut atas atau bawah dengan tanda angka seperti 12th, 16th, 18th setiap angka diberikan warna 12 hijau, 16 kuning, 18 merah. Sehingga setiap pemirsanya tahu bahwa film atau pertunjukan ini layak atau tidak untuk dilihat atau mengandung unsur erotis atau

tidak bahkan untuk film yang sifatnya kekerasan atau action dapat dipakai. Hal ini sudah dilakukan di seluruh dunia termasuk China bahkan Malaysia.

Jadi untuk para orangtua bisa dapat mengontrol jam tonton anak-anaknya. Untuk PH atau insan perfilman, jangan lupa memberikan informasi untuk isi dari film yang akan diputar juga memberikan pengertian sebelum film diputar. Terima kasih.

Meidy Hanes
meidyii@yahoo.com

Dana DKP untuk Dana Kampanye

Dalam berita di media massa berkaitan dengan dana DKP terungkap bahwa dana DKP telah didistribusikan untuk operasional Menteri DKP dan politisi, hanya 10% untuk kepentingan para nelayan dan perikanan. Di-beritakan pula, sudah ada beberapa pihak mengaku menerima dana DKP. Menurut undang-undang yang berlaku, dana kampanye dapat digalang dari pasangan capres dan cawapres, parpol pendukung tanpa pembatasan jumlah. Sedangkan dari perorangan dan perusahaan Indonesia harus jelas identitas dan ada pembatasan jumlah (Rp 100 juta atau Rp 750 juta berupa uang tunai dan bukan). Dana tidak boleh diterima dari pihak yang tidak jelas identitasnya, pemerintah, BUMN/D, dan pihak asing. Jika telah diterima maka harus dilaporkan ke KPU dan disetor ke kas negara dalam waktu 14 hari setelah Pemilu. Jadi seharusnya politisi yang menerima dana DKP tahu aturan main yang ada, tidak perlu bingung mengembalikan dana tersebut ke mana. Pada saat menerima seharusnya mengonfirmasi kepada pemberi dana, dalam posisi apa dia memberi, pribadi atau Menteri. Karena apa pun posisinya seharusnya memenuhi kriteria yang ada.

Zarya Nugroho
andanugi@gmail.com

PASTIKAN

TARIF IKLAN BERITAINDONESIA®

Halaman	Ukuran	Harga
Jacket Cover	204 x 268 mm	Rp. 40.000.000
Cover 2	204 x 268 mm	Rp. 20.000.000
Cover 2 Plus	408 x 268 mm	Rp. 35.000.000
Cover 3	204 x 268 mm	Rp. 17.000.000
Cover 3 Plus	408 x 268 mm	Rp. 30.000.000
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)	204 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam (Full Page)	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
1 Hlm Dalam Berhadapan (Facial Page)	408 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam Tengah (Center Page)	408 x 268 mm	Rp. 32.000.000
Advertorial / Pariwara	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
2/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 213 mm	Rp. 9.000.000
2/3 Hlm Horizontal Trimed	153 x 268 mm	Rp. 8.000.000
1/2 Hlm Horizontal Trimed	102 x 268 mm	Rp. 7.000.000
1/2 Hlm Vertical Trimed	204 x 134 mm	Rp. 6.000.000
1/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 67 mm	Rp. 4.000.000
1/3 Hlm Horizontal Trimed	51 x 268 mm	Rp. 3.000.000

Iklan kupung (kanan & kiri) minimal lima kali pemuatan @ Rp. 5.000.000

PEMASANGAN IKLAN:

Telp. (021) 829-3113, 709-30474, 8370-1736

Fax.(021) 837-87235

21/05/2007

Standar Ujian S-1 Diperketat

Pemerintah berencana memperketat proses ujian kelulusan perguruan tinggi untuk jenjang pendidikan strata 1 (S-1) guna menjaga standar mutu kelulusan yang lebih bersaing sesuai kebutuhan dunia usaha. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan hal itu dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Nasional Ikatan Alumni Universitas Sriwijaya di Hotel Aston, Palembang. Menurut Kalla, saat ini pemerintah tengah memikirkan metode ujian berbentuk *cross examination*. Dengan metode ini, ujian di satu kampus akan diawasi oleh pengawas dari universitas lain. Begitu juga dalam sidang kelulusan, universitas akan mendatangkan seorang penguji tambahan dari tempat lain. "Ujian kelulusan di UI akan dilihat oleh ITB, selanjutnya ujian kelulusan di ITB diuji lagi di UGM dan seterusnya. Sehingga, kita memiliki standar nasional yang baik dan baku," tutur Wapres. Kalla sudah meminta Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo untuk mempelajari bentuk ujian tersebut. Sementara itu, Bambang Sudibyo menyatakan model ujian ini belum tentu bisa dijalankan dalam waktu dekat. "Itu masih dalam tataran wacana dan masih dalam pengkajian," kata Bambang. Wakil Ketua Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Heri Ahmadi berpendapat lain.

Ia menyatakan pengawas ujian silang tak menjamin peningkatan mutu lulusan perguruan tinggi. Ia lebih menginginkan agar kampus lebih memperhatikan kebutuhan lokal. Misalnya Universitas Lampung berorientasi pada energi alternatif karena sumber daya energi di sana cukup besar. "Jadi lulusan pendidikan itu bermutu sekaligus relevan untuk daerahnya," kata politikus PDIP ini.

22/05/2007

Polisi Tembak Polisi di Merauke

Aksi tembak sesama anggota Polri kembali terjadi. Mantan Kasatlantas Polres Merauke, Papua, AKP Roni Akbar Saleh Pasaribu, menembak mati anggota Lantas Polres Merauke Briptu Hidayat di Hotel Asmat Merauke, Selasa (22/5) pagi. AKP Roni, anak ketiga dari Makmur Saleh, mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sumut itu kemudian bunuh diri. Ada 4 peluru yang bersarang di tubuh Briptu Hidayat. Sedangkan pada AKP Roni Pasaribu terdapat 1 peluru di keeningnya. Mengenai motif penembakan, masih gelap. Kapolri Jenderal Sutanto telah memerintahkan anggotanya menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Menurut Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanegara, penyebab penembakan masih ditelisik, apakah saling tembak atau bunuh diri. Dengan semakin seringnya kasus penembakan antar-polisi, mendorong kepolisian un-

tuk menginstrospeksi diri. "Kita sudah melakukan upaya pembinaan seperti 6 bulan sekali. Kita periksa kesehatan. Orang yang mulai menceng-menceng kita panggil, kita rawat, kalau tidak bisa ya kita pensiunkan," kata Makbul. "Kita sudah membuat yang terbaik sejak rekrutmen. Kalau dalam perjalanannya masih ada, ya kita selesaikan, kita kan banyak anak. Anggota Polri itu hampir 400.000 orang," lanjutnya.

23/05/2007

Presiden Kritik Peneliti LIPI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau agar para ilmuwan lebih banyak memberi sumbangan pemikiran dari hasil penelitiannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Hal itu ia sampaikan karena merasa prihatin dengan banyaknya produk riset yang belum menyentuh kebutuhan publik. "Saya menginginkan para peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia), peneliti berbagai perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penelitian guna mengidentifikasi serta memecahkan berbagai persoalan masyarakat," katanya saat meresmikan gedung baru Herbarium Bogoriense di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Lebih jauh, Presiden mengakui bahwa kemampuan iptek nasional masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini ditandai dengan belum banyaknya jumlah paten,

Karikatur Berita



kurangnya kontribusi iptek di bidang industri, keterbatasan sumber daya iptek, belum berkembangnya budaya iptek dan belum optimalnya iptek dalam mengatasi degradasi hidup. Gedung Herbarium Bogoriense merupakan bagian dari Cibinong Science Center yang menyediakan fasilitas inti bagi penelitian keanekaragaman hayati dan mikrobiologi di Indonesia. Gedung ini memiliki dua juta spesimen tumbuhan dimana koleksinya adalah nomor tiga terbesar di dunia setelah Leiden di Belanda dan Kew Garden di London Inggris.

24/05/2007

Neptune Ambil Alih Dipasena

Konsorsium Neptune ditetapkan sebagai pemenang tender penjualan saham pemerintah di tambak udang Dipasena, Lampung. Neptune dianggap layak mengelola Dipasena karena tim penilai independen menilai konsorsium ini sanggup melanjutkan program revitalisasi di tambak itu. Menurut Wakil Dirut PT Perusahaan Pengelola Aset yang mewakili pemerintah dalam pengelolaan tambak udang Dipasena selama ini, Raden Pardede, salah satu anggota Konsorsium Neptune adalah PT Central Proteinaprima yang memiliki kemampuan teruji dalam bisnis udang. Selain itu, Neptune juga telah menunjukkan bukti kemampuan finansial. Kemenangan Neptune menandai pelepasan seluruh saham pemerintah yang ada di Dipasena. Harga yang disepakati dalam tender itu adalah Rp 688,12 miliar. Mereka juga harus membayar dana Rp 220 miliar secara

bertahap hingga 31 Desember 2007 untuk menyelesaikan utang petambak plasma Dipasena kepada pemerintah. Pembayaran utang tersebut dilakukan bertahap karena mengikuti proses verifikasi sertifikat utang petani tambak yang mencapai 11.000 orang. Central Proteinaprima merupakan perusahaan rakasasa akuakultur berbasis di Indonesia yang bergerak pada akuakultur udang terintegrasi. Mereka mengambil-alih perusahaan budidaya benih udang tahan penyakit yang berbasis di Florida, Amerika Serikat, yakni Shrimp Improvement Systems.

25/05/2007

Wapres Jusuf Kalla Bertemu PM Shinzo Abe

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla melakukan kunjungan kerja selama lima hari di Jepang. Dalam kunjungan kehormatannya kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Kantor PM Jepang, Jumat (25/5) petang, ia meminta Abe meningkatkan kembali investasi pelaku usaha Jepang di Indonesia. Permintaan itu disampaikan mengingat ranking investasi Jepang di Indonesia tahun-tahun terakhir mengalami penurunan. Saat ini Jepang tercatat dari nomor urut satu menjadi nomor lima dengan nilai investasi sebesar 149,1 juta dollar AS pada triwulan 1 tahun 2007. Di Tokyo, Wapres juga menyampaikan pidato di Konferensi Ekonomi Internasional ke-13 "The Future of Asia", yang diselenggarakan Koran Ekonomi Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) di Fuji Room, Hotel Imperial.

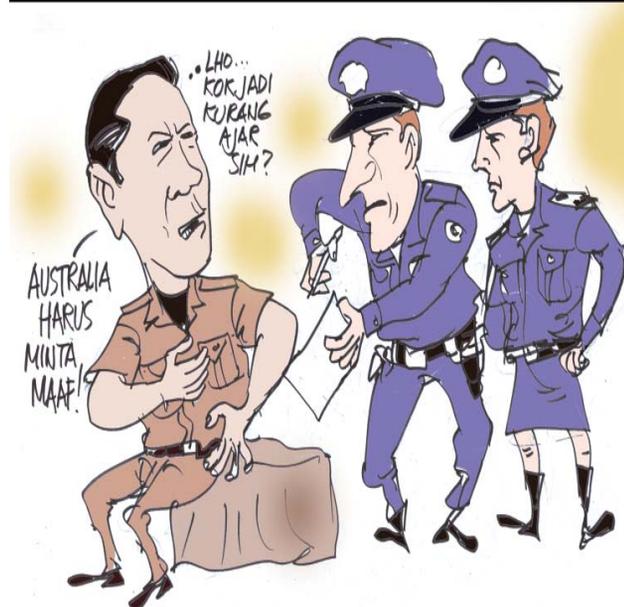
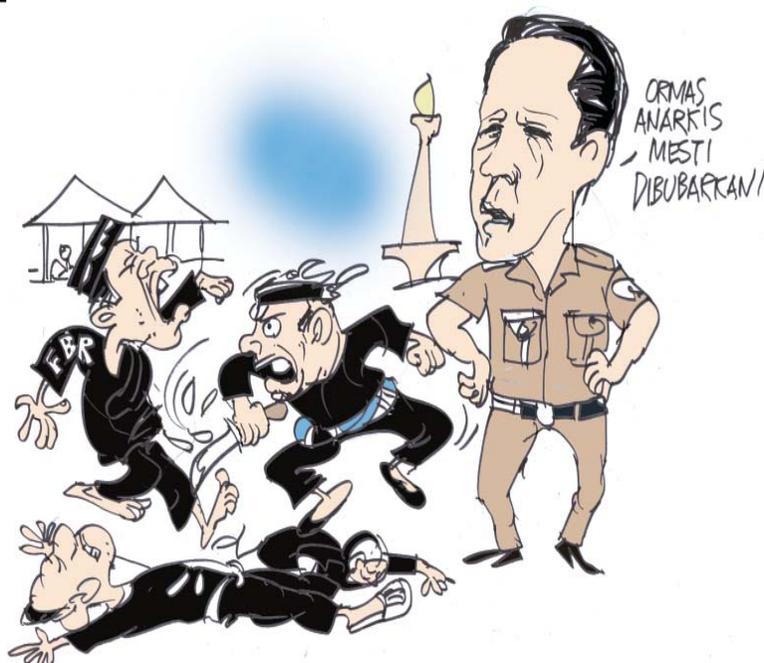
Konferensi tahunan ini juga didukung sejumlah media besar dari negara-negara di Asia, seperti Harian Kompas (Indonesia), The Straits Time (Singapura), The New Straits Time (Malaysia), Bangkok Post (Thailand), The People's Daily (China), dan JoongAng Ilbo (Korsel).

26/05/2007

Resolusi World Health Assembly Disahkan

Perjuangan Indonesia yang mengusulkan mekanisme pertukaran virus di WHO lebih transparan dan adil akhirnya terwujud. Usul tersebut diterima dan disahkan World Health Assembly (WHA) dalam bentuk resolusi di sidang pleno pada 23 Mei. Dengan disahkannya resolusi tersebut, Indonesia dan negara berkembang lain memiliki hak mendapatkan vaksin virus H5N1 dengan harga terjangkau dan distribusi vaksin yang mengutamakan negara berkembang. Selain itu, negara pemilik virus juga bisa meminta laboratorium WHO dipindah ke negaranya untuk meneliti virusnya. Demikian pernyataan Menteri Kesehatan, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K), dalam jumpa pers sepulang dari Jenewa, 26 Mei 2006 di Jakarta. Selanjutnya dikatakan, keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras Pemerintah Indonesia dan jajaran Departemen Kesehatan dalam menggalang dukungan dari negara-negara lain. Dukungan penuh tidak saja diperoleh dari 23 negara yang menandatangani pernyataan tertulis mendukung draft resolusi Republik Indonesia yang umumnya berasal dari negara-negara berkembang,

Karikatur Berita



tetapi juga negara-negara maju dari Uni Eropa, Jepang, serta Australia.

27/05/2007

Presiden dan Amien Rais Berbaikan

'Pertikaian' antara Presiden dengan Amien Rais akhirnya diselesaikan 'secara adat'. Amien Rais datang menemui Presiden SBY di VIP Room Bandara Halim Perdanakusuma saat Presiden akan bertolak ke Malaysia, Minggu (27/5) pagi. Dalam pertemuan selama 12 menit, keduanya sepakat saling meminta maaf. Dalam konferensi pers di kediamannya, Amien menyebutkan ada tiga materi yang dibicarakan. Pertama, SBY ingin membuka komunikasi dengannya yang selama ini macet. Kedua, komunikasi akan menghilangkan kesalahpahaman. Ketiga, SBY dan Amien sepakat menyerahkan polemik dana DKP ke ranah hukum, bukan ranah politik. Keduanya pun setuju untuk saling mengendalikan diri. Sebelumnya (25/5), 'pertikaian' keduanya memuncak, setelah Presiden dalam jumpa pers di Istana menolak tuduhan secara tidak langsung dari mantan Ketua MPR Amien Rais yang terkait dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) serta dana asing dari Amerika Serikat yang mengalir ke pasangan SBY-JK atau tim kampanye pasangan tersebut dalam pemilihan umum 2004. Presiden menyatakan, opini yang diembuskan Amien soal dana DKP maupun dana dari AS adalah fitnah. SBY juga mempersilakan semua pihak mengecek langsung ke KPU karena segala data tentang tim kampanye maupun laporan keuangan

Pemilu 2004 ada di lembaga itu.

28/05/2007

Praja Perempuan Mengadu ke Komnas HAM

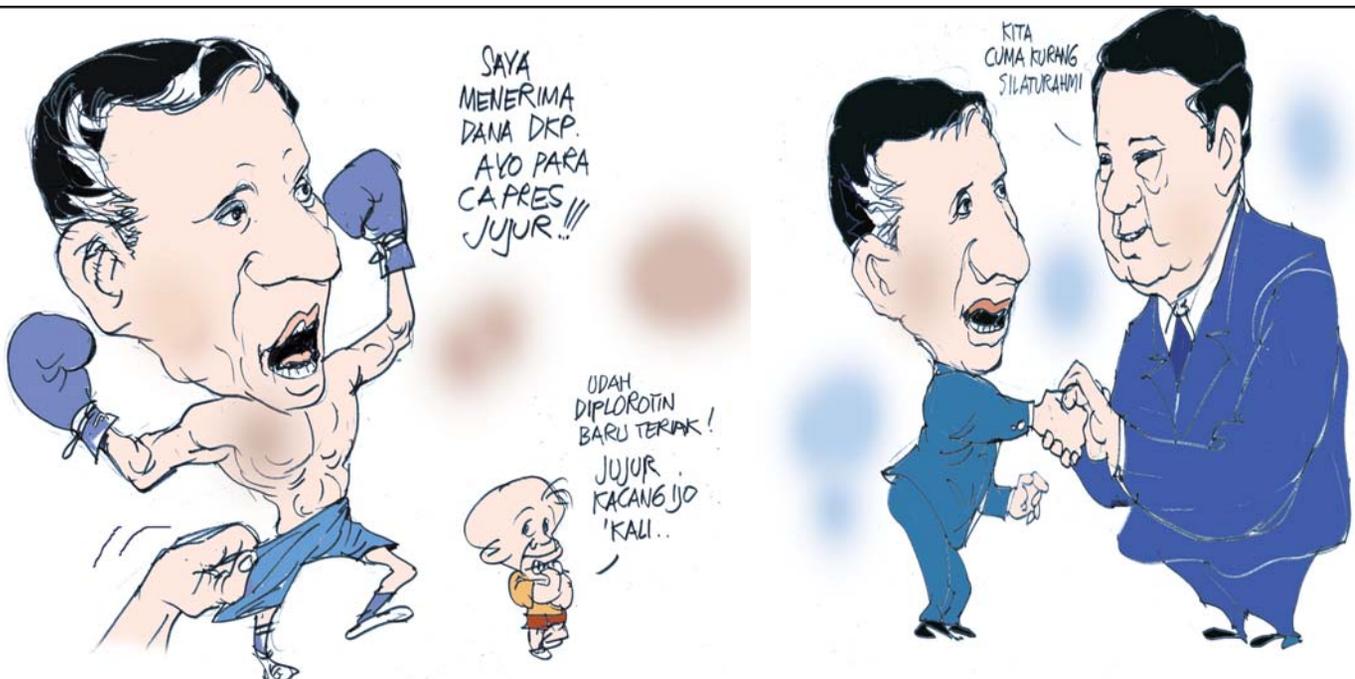
Sebanyak 10 praja perempuan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN bersama sejumlah dosen, alumnus, dan orangtua praja mengadukan buku IPDN Undercover: Sebuah Kesaksian Bernu-rani ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mereka menyatakan telah difitnah dan direndahkan martabatnya dalam buku karangan dosen IPDN, Inu Kencana Syafie. Bahkan, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren dan Majelis Talim Jawa Barat yang ikut serta dalam rombongan berharap, buku yang diterbitkan Progressiv pada April lalu itu segera dilarang karena dapat menimbulkan konflik. Mereka juga minta Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memanggil Inu untuk menjelaskan identitas ET yang disebut telah menginjak-injak Al Quran dengan telanjang seperti tercantum di halaman 218 alinea empat buku itu. Endang Tri, salah satu dosen IPDN, mengaku amat keberatan dengan isi halaman 218 buku itu. Dalam komisi disiplin IPDN hanya ada dua dosen perempuan dan yang berinisial ET hanya dirinya. Endang juga berharap, Inu mengklarifikasi pernyataannya bahwa ada 660 praja perempuan yang berpaham seks bebas. Suci Sintia, praja dari DKI Jakarta, menuturkan, pernyataan Inu itu telah memojokkan dirinya dan 1.367 praja perempuan IPDN lainnya. Menurut Suci, tulisan itu mem-

buat banyak praja perempuan IPDN diolok-olok oleh masyarakat saat keluar kampus.

29/05/2007

Sutiyoso Dilecehkan di Australia

Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, merasa dilecehkan Pemerintah Australia. Saat menginap di hotel ShangriLa Sydney, Australia, Sutiyoso didatangi polisi federal New South Wales (NSW) ke kamar hotelnya. Petugas itu meminta 'setengah paksa' Sutiyoso menghadap ke pengadilan di NSW untuk memberikan keterangan mengenai tewasnya lima wartawan asing di Timor Timur pada 1975. Padahal ia merasa tidak pernah terlibat dan datang hanya untuk memenuhi undangan Gubernur Morris I MP. Setelah kejadian itu, Sutiyoso lalu menghubungi pihak protokol resmi dari negara bagian New South Wales dan menyampaikan keberatannya, juga rasa tersinggung akibat perlakuan dua polisi itu. Di Jakarta, banyak pihak yang menjadi berang atas tindakan semena-mena itu. Sutiyoso bahkan mengancam jika tidak ada permintaan maaf resmi dari pemerintah Australia maupun pemerintah negara bagian NSW, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempertimbangkan kembali rencana menjalin hubungan kerja sama kota kembar (*sister city*) dengan NSW. Kepala pemerintah NSW, Morris Iemma MP, akhirnya meminta maaf secara resmi kepada Gubernur DKI Sutiyoso. Permintaan maaf itu disampaikan dalam sebuah surat asli Morris yang diserahkan langsung oleh



Duta Besar Australia di Indonesia, Bill Farmer kepada Sutiyoso di Balaikota (31/5). Membaca surat itu, Sutiyoso berbesar hati memberikan kata maaf dan akan memperbaiki hubungan NSW-Jakarta.

30/05/2007

4 Warga Tewas Tertembak Marinir

Empat warga Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tewas dan delapan orang luka-luka setelah ditembak oknum Marinir TNI AL. Bentrokan terjadi saat warga akan melakukan protes atas sengketa tanah yang digunakan untuk lahan latihan tempur TNI Angkatan Laut. Keempat korban tewas tersebut adalah Mistin (25), Sutam (40), dan Khotijah (25), Rohman (21). Warga Alas Tlogo merupakan salah satu pihak yang memperebutkan tanah seluas 539 hektar di 11 desa di dua kecamatan, Kecamatan Lekok dan Grati yang juga diklaim PT Rajawali Nusantara. Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dan Kepala Staf TNI AL Laksamana Slamet Soebijanto, atas nama semua prajurit TNI AL dan prajurit TNI, meminta maaf sebesar-besarnya dan menyatakan rasa dukacita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam insiden itu. Panglima mengajak tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat bersama-sama membantu mendinginkan dan menentramkan suasana agar TNI yang dibantu jajaran Polri dapat mengusut tuntas kejadian itu. Setelah insiden ini, sebanyak 13 personel prajurit Marinir TNI AL, Jumat (1/6), ditetapkan sebagai tersangka.

31/05/2007

2.000 Rekening Nonbudgeter Ditemukan Lagi

Departemen Keuangan kembali menemukan 2.000 rekening baru yang tidak jelas atau liar yang dimiliki oleh 23 Kementerian/lembaga negara. Rekening tersebut diperoleh dari hasil kerja sama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Departemen Keuangan saat melakukan audit awal laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan kementerian/lembaga negara 2006. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Departemen Keuangan, Hekinus Manao menuturkan, rekening itu umumnya rekening yang disimpan di daerah sehingga baru tahu belakangan. Hal itu disampaikan Hekinus kepada wartawan saat acara Perayaan Ulang Tahun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ke 24 di kantor BPKP Jakarta. Dengan temuan baru ini, total rekening liar yang ditemukan mencapai 5.195. Hingga Februari 2006, Departemen Keuangan berhasil menemukan adanya 3.195 rekening tidak jelas atau tidak dilaporkan Kementerian/lembaga negara senilai Rp 17,6 triliun.

01/06/2007

Presiden Yudhoyono Hadiri Perayaan Waisak

Acara puncak perayaan Tri Suci Waisak 2551 BE/2007 di kaki Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri, antara lain,

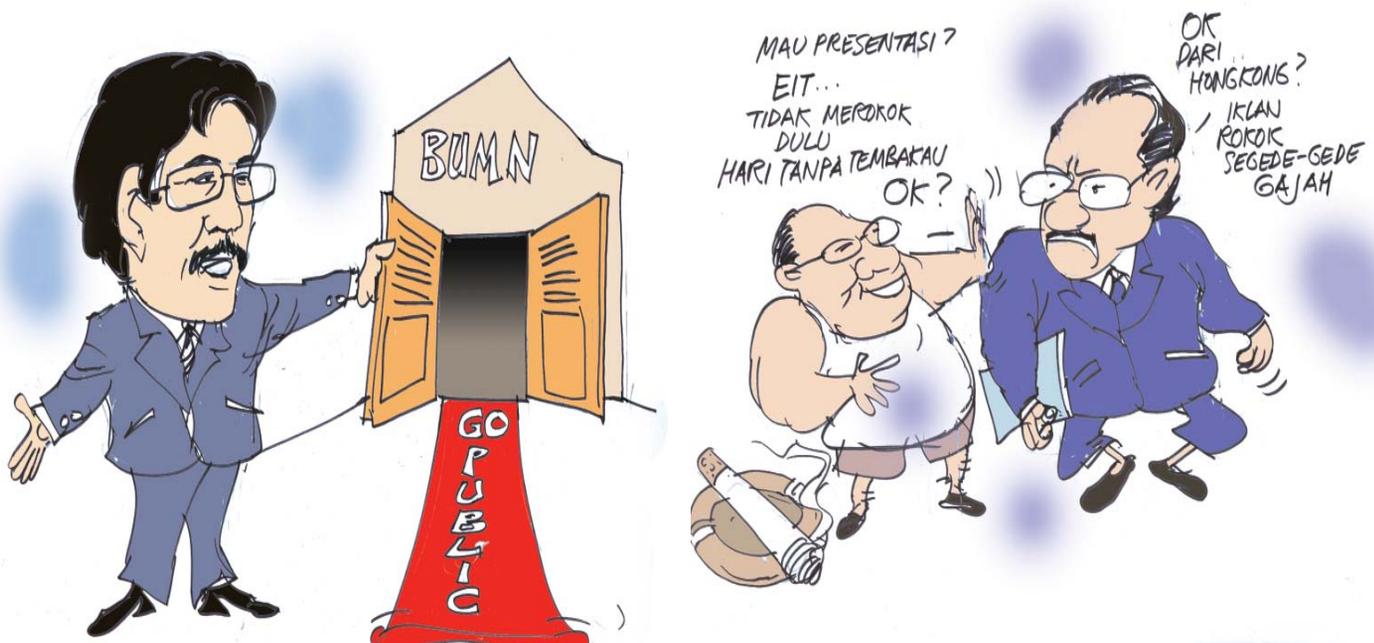
Menteri Agama Maftuh Basyuni dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik. Hadir pula sejumlah duta besar dari negara tetangga. Dalam sambutannya, Presiden mengajak generasi umat Buddha agar menjadikan Hari Waisak sebagai momen untuk meraih keselarasan dan keserasian dalam berbangsa dan negara di masa mendatang. "Umat Buddha diharapkan menjadikan Buddha Dharma sebagai teladan, sehingga bisa menyadari kehidupannya," kata Presiden. Perayaan Tri Suci Waisak kali ini mengangkat tema "Dengan Semangat Pengamalan Dharma Sang Buddha Mari Kita Tingkatkan Toleransi Beragama untuk Perdamaian Dunia". Dalam acara ini sekaligus diluncurkan buku Guide Book of Trail Civilization yang ditandatangani oleh menteri pariwisata dari enam negara di Asia Tenggara. Sedangkan subtema yang diusung kali ini adalah Selamatkan Bumi Ini dari Kerusakan dengan Meningkatkan Penghayatan Dharma Sang Buddha demi Pelestarian Lingkungan Hidup. Presiden menyatakan sangat mendukung subtema ini karena isu lingkungan memang menjadi persoalan penting yang melanda seluruh dunia.

02/06/2007

Jumlah Korban Tewas Flu Burung 79 Orang

Orang yang terinfeksi virus flu burung atau *avian influenza* sekarang berjumlah 99 orang. Dari jumlah tersebut, 79 orang di antaranya meninggal dunia setelah perempuan asal Kendal, Jawa Tengah, berinisial R (15) dikonfirmasi positif ter-

Karikatur Berita



infeksi virus H5N1. Siaran pers dari Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan yang diterima Antara Jakarta, Sabtu (2/6), menyebutkan, simpulan tersebut dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan tanggal 29 Mei dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Jakarta tanggal 1 Juni 2007. Dengan demikian, kini flu burung telah menyebar di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Riau. Di Jawa Tengah sendiri selama Mei 2007 ada tiga kabupaten infeksi baru, yaitu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kendal.

03/06/2007

"Kemarau basah" di Indonesia

Badan Meteorologi dan Geofisika memperkirakan, musim "kemarau basah" akan melanda Indonesia selama tahun ini. "Kemarau basah" yang dimaksud ialah musim kemarau, tetapi masih mengandung curah hujan karena pengaruh faktor fenomena La Nina dan pergerakan masa uap air. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Sri Woro B Harijono mengatakan, hingga Oktober 2007 mendatang, hujan berpeluang masih akan terjadi. Bahkan, kawasan Indonesia di utara garis Khatulistiwa curah hujan kemungkinan bahkan di atas normal. Musim "kemarau basah" pada tahun ini, menurut Sri Woro, disebabkan

oleh dua faktor, yaitu fenomena La Nina dan pergerakan uap air. Untuk wilayah Indonesia bagian timur dan tengah, "kemarau basah" disebabkan oleh fenomena La Nina. Fenomena ini mengacu pada terbentuknya uap air atau awan di atas Samudra Pasifik bagian tengah yang bergerak menuju wilayah bertekanan rendah di wilayah Asia, termasuk Indonesia bagian timur dan tengah. "Suhu permukaan Samudra Pasifik turun 1 derajat Celsius dari rata-rata 22,5 derajat Celsius," ujarnya. Sedangkan untuk wilayah Indonesia bagian barat, fenomena "kemarau basah" dipengaruhi pergerakan massa uap air atau dipole mode antara barat Sumatera dan Afrika sebelah timur.

04/06/2007

Para Gubernur Dukung Amandemen UUD 1945

Sebanyak 32 gubernur dari 33 gubernur se-Indonesia mendukung perubahan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperkuat fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah secara penuh menyangkut bidang otonomi daerah. Dukungan politik itu tertuang dalam Pernyataan Bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan DPD yang ditandatangani Senin (4/6). Dari total 33 provinsi yang ada di seluruh Indonesia, sebanyak 30 gubernur menandatangani pernyataan tersebut. Rapat itu sendiri dipimpin Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita dan Ketua Umum APPSI Sutiyoso yang juga Gubernur DKI Jakarta. Hanya tiga gubernur yang tak hadir dalam acara itu, yaitu

Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, Gubernur Papua Barnabas Suebu, dan Gubernur Sumatera Selatan Syahril Oesman. Namun, Barnabas maupun Syahril Oesman sebelumnya telah menyampaikan surat dukungan tertulis kepada DPD. Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto menegaskan, kendati para gubernur tak punya suara untuk menentukan jadi tidaknya Perubahan UUD 1945 di MPR, dia yakin dukungan gubernur ini akan memberi dukungan opini.

05/06/2007

Indonesia Urutan Kedua Penggunaan Tiket Elektronik

Penetrasi penggunaan tiket elektronik di Indonesia berada pada urutan kedua di kawasan Asia Pasifik. Laporan statistik Asosiasi Perusahaan Penerbangan Internasional (IATA) menyebutkan, hingga Maret 2007, penetrasi penggunaan elektronik tiket di Indonesia sudah mencapai 82 persen. Posisi itu lebih tinggi dari rata-rata penetrasi penggunaan tiket elektronik berbagai maskapai penerbangan di Asia Pasifik yang hanya 67 persen. Bahkan, capaian Indonesia pun lebih tinggi dari rata-rata dunia yang mencapai 79 persen. Posisi pertama ditempati Selandia Baru yang mencapai penetrasi hingga 87,86 persen. Australia menempati urutan ketiga penetrasi penggunaan tiket elektronik 81,28 persen.

Penggunaan sistem tiket elektronik di Indonesia diawali oleh PT Garuda Indonesia pada Maret 2006.





ilustrasi: dendy

Rapat yang Tertunda

Ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada rapat paripurna (5/6) untuk menjelaskan persetujuan pemerintah atas Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1747 tentang Perluasan Sanksi bagi Iran, membuat hubungan antara pemerintah dengan DPR semakin panas.

Presiden yang diundang datang justru mengirim para menteri untuk mewakilinya. Padahal Presiden sedang ada di Jakarta dan memberi waktunya menerima kunjungan Presiden Timor Leste Ramos Horta. Untuk mewakilinya, Presiden mengutus Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menko Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, serta Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Si-regar. Para menteri ini kemudian disuruh pulang tanpa sempat memberikan jawaban.

Dalam rapat paripurna ini, para anggota DPR rencananya ingin menanyakan dan mendengar secara langsung jawaban Presiden tentang keputusan pemerintah menyetujui resolusi nomor 1747 yang memerintahkan Iran untuk menghentikan selama 60 hari proyek nuklirnya, sambil

mengizinkan tim internasional (IAEA) melakukan verifikasi. Dua alasan pokok dikemukakan mengapa penting untuk mempertanyakan sikap Indonesia tersebut. Pertama, dipilihnya Indonesia menjadi anggota DK PBB yang beranggotakan 15 negara, adalah representasi negara-negara berpenduduk muslim di dunia. Karena itu mendukung resolusi berarti dianggap tidak menunjukkan solidaritas kepada Iran sebagai sebuah negara Islam. Sebab sebelum resolusi keluar, Indonesia pernah menyatakan dukungan pada proyek nuklir Iran untuk tujuan damai. Alasan kedua, Indonesia dianggap sudah keluar dari pakem politik luar negeri yang bebas dan aktif. Karena itu, interpelasi benar-benar harus dilakukan dan itu terlihat dari jumlah 280 anggota DPR yang mengusulkan. Atau, terdapat hingga tujuh fraksi setuju (FPG, FPDIP, FPPP, FPAN, FKB, FPKS dan FBPD), dua yang menolak (FPD dan FPDS), dan satu abstain (FPBR).

Dengan ketidakhadiran Presiden ini, sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat kontan melakukan interupsi selama rapat

yang berlangsung kurang dari lima jam itu. Anggota DPR yang meminta Presiden hadir memiliki segudang alasan. Mereka menilai DPR dan pemerintah berada dalam posisi sejajar. Selain itu, Presiden perlu hadir karena menteri telah menjelaskan materi interpelasi itu pada rapat komisi. Penjelasan itu tak bisa diterima. Presiden di negara maju pun sering memberi penjelasan di depan parlemen. Oleh sebab itu, ketidakhadiran Presiden adalah bentuk pelecehan kepada DPR karena interpelasi itu ditempuh dengan proses yang panjang.

Sementara mereka yang memahami ketidakhadiran Presiden berlindung pada Tata Tertib DPR Pasal 174 Ayat 4 yang menyebutkan keterangan dan jawaban Presiden bisa diwakilkan kepada menteri. Mereka juga mengacu pada preseden sebelumnya, yaitu interpelasi kasus Sipadan Ligitan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri yang dihadiri Menko Polkam. Interpelasi soal busung lapar juga cukup dijelaskan oleh Menko Kesra. Menyangkut Tata Tertib DPR, mereka yang meminta Presiden datang memiliki penafsiran lain. Keterangan pertama harus disampaikan Presiden. Jika muncul pertanyaan, barulah Presiden dapat mewakilkannya. Perbedaan pendapat ini diakhiri dengan kesepakatan agar rapat ditunda.

Soal rapat yang tertunda itu, Presiden menganggapnya hal yang biasa dalam hidup berdemokrasi. Ia juga mengingatkan bahwa tugas dan kewajiban pemerintah dan DPR adalah mencari jalan terbaik bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Politik luar negeri penting, tetapi agenda dalam negeri, seperti peningkatan kesejahteraan rakyat, juga tidak kalah penting.

Pandangan Presiden ini juga senada dengan seruan beberapa pihak agar DPR lebih baik mengurus interpelasi soal lumpur Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo yang jelas-jelas menysangsakan rakyat. Atau perjanjian ekstradisi dengan Singapura yang dinilai lebih menguntungkan Singapura. "Soal Iran rasanya terlalu jauh untuk diinterpelasi. Cukup DPR menyatakan sikap dan kritik. Yang lebih serius, kalau DPR mau adalah soal *agreement* dengan Singapura dan tragedi lumpur Sidoarjo. Yang terakhir ini jelas-jelas di depan mata dan langsung dirasakan oleh rakyat," jelas Komaruddin Hidayat, pemikir Islam yang kini menjabat Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta kepada *Berita Indonesia* beberapa waktu lalu. Terlepas dari berbagai pro dan kontra, interpelasi soal Iran ini dan rapat paripurna yang tertunda jelas mencuri waktu DPR dan pemerintah yang lebih baik digunakan mengurus kehidupan rakyat yang semakin sulit. ■ **MLP, HT**

Reformasi Nirmoral

Malam itu, seperti pemandangan umum Jakarta selama puluhan tahun, masyarakat terus dijejali dengan hingar bingar nyanyian para pengamen. Tidak hanya musik dan nada palsu yang membuat hati merasa tidak terhibur, tetapi juga gaya mereka yang sudah berubah menjadi setengah preman.

Begitu juga dengan pengalaman kru Majalah *Berita Indonesia*. Selepas keluar dari *food court* mal Taman Anggrek yang sangat mewah di lantai 4, untuk sebuah wawancara dengan salah seorang tokoh agama, langsung disambut dengan nyanyian para pengamen, sesaat setelah memasuki bus PPD kelas ekonomi 46.

Mendengar lagu itu, mungkin saja seisi bus bergumam dalam hati, "Untung saja, Sukarno dan Suharto tak berkuasa lagi. Kalau tidak para pengamen ini sudah digaruk". Gumaman itu benar, Bung Karno sangat tidak suka dengan musik berbau kebarat-baratan. Ia menyebutkan musik ngak ngik ngok. Dalam teori musik, jenis musik ala Bung Karno itu pasti tidak ditemukan. Demikian juga Pak Harto, sangat tidak suka mendengar musik-musik bernada protes sosial. Baginya, kalau ada permasalahan, harus disampaikan melalui saluran-saluran resmi, dan jangan *nyanyi* di bus kota.

Hal yang jauh semakin buruk dari latar belakang umum masyarakat Jakarta tadi adalah gaya para pengamen yang semakin intimidatif. Mereka tidak mau lagi menunggu kerelaan para penumpang tetapi dengan mata melotot, mereka memaksa para penumpang perempuan menyerahkan sumbangan mereka.

Di pihak lain, mereka tidak sungkan-sungkan bersimpul di depan para penumpang pria yang terlihat kren, berpenampilan bersih, dan menenteng tas besar. Mungkin dalam pikiran mereka, "Ini pasti kelas profesional yang mungkin akan memberi lebih banyak".

Namun mereka tidak tahu, bahwa apa yang mereka rasakan, juga dirasakan seluruh penumpang bus, yakni pendapatan yang tetap sementara harga-harga terus membubung. Dan para pengamen itu tidak tahu, bahwa selama 2 jam wawancara dengan seorang tokoh agama, kru Majalah *Berita Indonesia* harus menahan dahaga dan lapar, karena sudah waktunya makan malam tapi tidak ada makanan dan minuman. Namun demikian, nyanyian fals mereka yang berisi pesan-pesan sosial, tetap mengundang rasa empati dan mudah-mudahan suara fals mereka terus membahana ke gedung DPR, ke Istana negara, dan ke telinga para pemimpin partai politik. Dan untuk itu, kru *Berita Indonesia* akhirnya

mengeluarkan uang ribumannya.

Tidak ada yang bisa membantah bahwa gaya setengah preman atau *full preman* itu sudah melewati batas-batas toleransi moral. Bahkan mereka sudah seperti "mahluk hidup lain" yang mengedepankan naluri dan mengesampingkan nurani. Namun sebaliknya, yang paling bertanggung jawab pada pembangunan moralitas bangsa ini, seperti tokoh-tokoh politik, agama, hingga para pemimpin formal, tidak memiliki *good will* untuk membangun moral bangsa. "Lalu, mengapa kita menuntut para pengamen itu bermoral?"

Bukankah seharusnya hari raya ke-9 reformasi diwarnai pencapaian agenda reformasi? Lalu mengapa pada saat yang bersamaan justru diwarnai terungkapnya aliran dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) ke sejumlah pemimpin dan tokoh-tokoh partai politik. Kita diingatkan kembali, bahwa salah satu agenda reformasi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

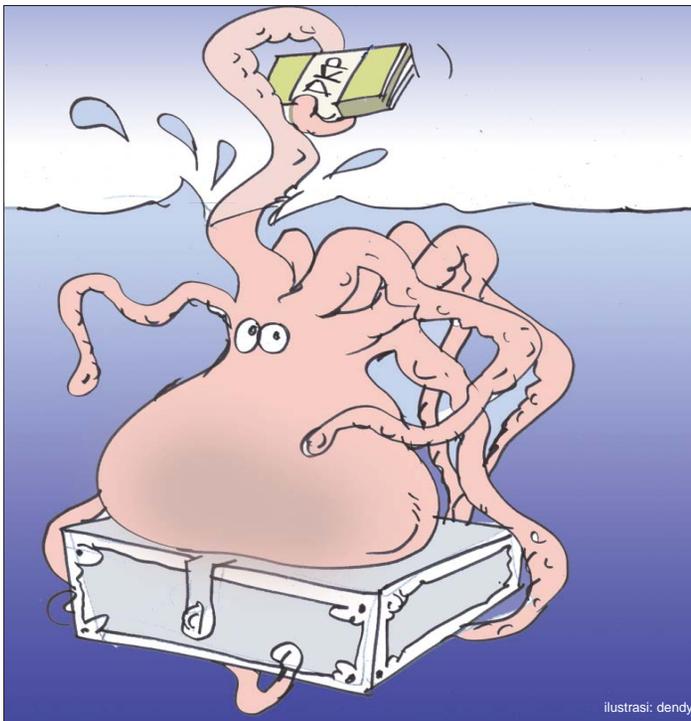
Hampir semua narasumber *Berita Indonesia* mengakui, bahwa KKN atau kejahatan apalah namanya yang melibatkan dana DKP hanyalah puncak es yang tampak di permukaan. Itu hanyalah secuil dari sedemikian besarnya KKN yang masih menggurita di negeri ini. Lihat saja skandal keuangan terbesar di negeri ini, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), tidak pernah tuntas. Maklum, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Bersatu juga terlibat menggunakan dana itu.

Tidak ada yang menduga bahwa para calon presiden itu maupun pasangannya tidak mau berpikir dua kali ketika me-

nerima sumbangan kampanye yang melebihi ambang batas yang diatur dalam UU. Realitas sedemikian menunjukkan, betapa besarnya hasrat berkuasa setiap orang, seakan-akan tidak peduli bagaimana caranya mendapatkan kekuasaan itu, pokoknya menjadi penguasa saja.

Kini kita mulai tersadar, betapa reformasi yang berjalan sedemikian lama nyaris tanpa menyentuh ranah moral. Kita lebih suka membentuk UU dan membangun lembaga baru daripada membenahi moralitas kita. Walhasil, yang kita dapat adalah reformasi nirmoral.

Tidak mengherankan jika kabinet demi kabinet yang memerintah di negeri ini sepanjang reformasi, selalu digoyang dengan ketidakpercayaan (*distrust*). Namun bukan hanya itu saja, ketakutan paling besar kita tentang massifnya ketidakpercayaan hingga tercerai-berainya negeri ini, seakan-akan sudah ada di depan mata. ■





INDONESIA

SARANG KORUPSI SISTEMIK

Korupsi di Indonesia sudah dianggap ‘membudaya’ dan semakin sistemik, berlangsung mulai dari tingkat tertinggi pemerintahan hingga paling bawah. Namun, korupsi yang sistemik itu sangat sulit dibuktikan, sebab para pelakunya sudah semakin terampil menghilangkan jejak.

Cita-cita para pendiri bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa masih belum jadi kenyataan. Penyebab utamanya, para penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), masih lebih mengutamakan menjejahterakan diri sendiri. Mereka dengan alasan demi kesejahteraan umum, bisa merancang sebuah tindakan yang justru memperkaya diri sendiri.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa hampir semua instansi pemerintah di Indonesia sudah menjadi sarang korupsi sistemik. Disebut korupsi sistemik karena sudah menyatu dan ‘membudaya’ dalam sistem birokrasi, serta bisa berlangsung dengan mulus dan dalam waktu lama tanpa bisa terendus semua perangkat hukum dan aparat penegak hukum. Karena, rancangannya memang dibuat sedemikian rupa sistemik, dan liat dari jeratan hukum. Celah hukum dimanfaatkan betul untuk berbuat korup. Semua prosedur administratif dibuat sedemikian rupa. Atau sama sekali barang bukti tak ada yang bersisa. Semua dibuat ‘terlihat’ rapi dan sesuai prosedur. Kalaupun

dugaan korupsi sempat masuk ranah hukum, gantian, aparat penegak hukum malah bisa masuk dalam jaringan sistim korupsi yang sistemik itu.

Lalu kalaupun ada koruptor yang terjerat hukum, ditengarai ada nuansa politisnya, atau tebang pilih, menyimpang dari sistem. Atau mereka yang belum lihai korupsi, sehingga mudah terlacak. Barangkali, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, bisa dikategorikan sebagai seorang koruptor yang jujur, belum lihai korupsi. Seperti diungkapkannya, bahwa semua menteri (departemen) mempunyai dana nonbudgeter dan mengalirkan dana itu seperti yang dilakukannya. Tapi Rokhmin rupanya tidak tahu bahwa menteri lainnya tidak mengadministrasikan transaksi dana nonbudgeter itu. Sehingga secara hukum positif, sulit dibuktikan. Sementara Rokhmin sendiri dengan jujur mencatatnya secara rinci. Catatan itu menjadi bukti yang menjeratnya menjadi koruptor. Sementara menteri atau pejabat lain, yang tidak membolehkan ada catatan tentang dana serupa, sulit bahkan tidak mungkin dibuktikan korupsi.

Begitu juga mantan Calon Presiden

2004, HM Amien Rais, yang dengan ‘jujur’ mengakui menerima dana non-budgeter DKP langsung dari Rokhmin Dahuri sebesar Rp 200 juta. Rupanya, Amien Rais juga belum termasuk koruptor yang lihai. Sebab dialah satu-satunya calon presiden yang langsung menerima dana nonbudgeter DKP itu. Sementara calon presiden lain, tidak ada yang menerima langsung. Bahkan anggota tim sukses resmi para capres lainnya itu tidak ada yang mengaku menerima dana haram itu. Akibatnya, Amien Rais telah terbukti menerima dana nonbudgeter DKP, suatu tindakan yang terbukti melanggar hukum. Hanya faktor tebang pilih yang bisa menghindari Amien Rais dari jeratan hukum. Sementara, Capres lain, yang walaupun Amien Rais, Rokhmin Dahuri dan publik yakin bahwa para capers itu juga kebagian dana haram itu, tapi tidak bisa dibuktikan secara hukum. Sehingga, tuduhan itu malah bisa dianggap sebagai fitnah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono malah sempat ‘mengancam’ Amien Rais, sehingga Amien Rais menyempatkan diri bertemu dengan SBY selama 12 menit di Bandara Halim Perdanakusuma. Pertemuan ini dianggap oleh publik sebagai kompromi kedua elit politik itu.

Sedangkan Rokhmin Dahuri atas kesalahannya yang dengan tertib mencatat lalulintas dana itu, tinggal menunggu hari untuk divonis pengadilan. Rokhmin harus menerima penegakan kepastian hukum, walaupun dia pasti merasa hukuman itu tidak adil, karena dia yakin menteri dan pejabat lain juga melakukan hal yang sama, seperti berulang kali diungkapkannya.

Suburnya korupsi diduga juga tidak hanya terjadi di lembaga eksekutif. Aparat penegak hukum juga sulit dipercaya tidak terlibat dalam sistem korupsi yang menggurita itu. Sehingga kerap disebut ada mafia peradilan. Bahkan sesudah seorang koruptor pun sudah menyandang status terpidana, aparat lembaga pemasyarakatan (Lapas) juga ada pula yang sudah siap dengan berbagai skenario korupnya. Mulai dari pungutan liar, menerima upeti, menyunat dana rutin pemasyarakatan narapidana hingga banyak yang mati di penjara, mengizinkan penjara tempat transaksi bisnis gelap, hingga mendirikan ‘pabrik’ narkoba di penjara pun bisa terjadi.

Para politisi pun bisa korupsi berjama-

ah. Bahkan penggiat LSM atau kelompok-kelompok masyarakat, pers, agamawan bisa juga terlibat korupsi.

Perilaku korup para pengusaha juga diduga jauh lebih lihai lagi. Selain menyogok, membuat kongsi dengan sesama teman sebagai rekanan instansi pemerintah, merancang proyek dari titik A sampai Z hingga jatuh ke tangannya, atau paling tidak berbagi "arisan" dengan sesama kongsi, sangat lihai dilakukan. Tender bisa diatur, seolah berlangsung wajar. Semua proses tender secara formal dilakukan dengan tertib. Sehingga secara prosedur hukum sulit dibuktikan ada permainan dalam tender itu. Terlatih mendapatkan proyek lewat praktik perilaku korup, pimpro dan pengusaha sudah hafal untuk tak meninggalkan jejak korupsi. Karena setiap pejabat hanya mau berurusan dengan mereka yang sudah mengerti cara 'kongsi' dan 'arisan'. Tapi, sekali lagi, ini sulit dibuktikan.

Walaupun Ketua Asosiasi Pengadaan Barang dan Distributor Seluruh Indone-

sia (ARDIN) John N Palinggi mengakui pengadaan barang pemerintah 56 persen masih berlangsung tidak sesuai dengan peraturan. Dan, "hampir semua instansi tidak melakukan aturan yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003. Mereka melakukan sendiri pemilihan atas dasar kroni-kroni, anak, cucu, dan segala macam. Ini masih berlangsung sampai sekarang. Dan itu adalah pemborosan paling besar di negeri ini," ucapnya.

"Dipaksa" Bicara

Ketika terungkap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bahwa para calon presiden juga menerima aliran dana nonbudgeter DKP, tidak ada calon presiden yang mengaku menerimanya. Sampai kemudian *Media Indonesia* dalam editorialnya 14 Mei 2007, lalu bertanyanya, Amien tokoh yang vokalis, yang bicara tanpa tedeng aling-aling, yang komentar-komentarnya terus terang, tajam dan memikat, tetapi mengapa

menyangkut dirinya sendiri sang tokoh memilih diam. Demi menggugat aksi diam Amien, *Harian Media Indonesia* menulis keras, "Dalam kasus aliran dana nonbugeter ini Amien Rais telah kehilangan autensitas dirinya, yang spontan dan terus terang. Sikap itu menambah kecurigaan publik bahwa reformasi telah memakan bapaknya sendiri atau malah sang bapak telah memakan reformasi sehingga ikut dalam gurita besar korupsi dan berubah menjadi badut-badut di panggung hipokrisi."

Mantan Ketua DPP Partai Amanat Nasional ini, yang integritasnya dibedah habis oleh *Media Indonesia* akhirnya terpancing untuk berbicara. Senin siang, hari terbitnya editorial *Media Indonesia* itu, ia kemudian menggelar jumpa pers mengakui menerima dana haram itu sekaligus mengungkapkan bahwa capres-cawapres lain juga menerima dana DKP sama seperti dirinya. Karenanya ia berani meminta agar para pihak yang menerima dana tersebut mengaku saja. Bahkan ia



Presiden SBY melakukan konferensi pers di halaman Istana Negara (25/5).

foto: presidensby.info

menohok bahwa ada Capres yang menerima aliran dana asing.

Berbicara dalam Deklarasi Bersama Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi, digelar oleh Masyarakat Profesional Madani (MPM) di Jakarta, Selasa (22/5), Amien mengatakan KPU pernah meminta PPATK mengusut transaksi mencurigakan yang masuk ke salah satu pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2004. KPU Pusat mencium adanya transfer dana misterius yang datang dari luar negeri," ucapnya.

Amien memang tak eksplisit menyebut nama pasangan SBY-JK penerima dana dari Washington DC yang dimaksudnya. Tetapi Presiden SBY rupanya merasa tersudutkan hingga bereaksi keras menanggapi Amien dengan menggelar jumpa pers khusus, berlangsung di halaman Istana Kepresidenan, Jumat (25/5).

Lalu masalah bergeser menjadi aksi gertak-menggertak. Sampai kemudian Mensesneg Hatta Radjasa, menteri dari PAN, menyarankan agar Presiden bertemu Ketua MPP PAN itu.

Pertemuan berlangsung Minggu (27/5) di Lanuma Halim Perdanakusuma, Jakarta sebelum Presiden berangkat ke Malaysia menghadiri pertemuan puncak ekonomi Islam dunia. Besoknya, Senin, dari rumahnya di Sleman, Yogyakarta Amien mengadakan konferensi pers mengatakan sudah bertemu Presiden SBY dan sepakat akhiri pertikaian. Beberapa saat usai itu di Kuala Lumpur Presiden pun melakukan hal sama, konferensi pers diadakan dan tanpa tanya jawab.

Pemiskinan Negara

Dua gajah tak jadi bertarung tetapi aksi sang gurita korupsi seolah dibenarkan untuk terus berlangsung. Akbar Tandjung, mantan Ketua Umum Partai Golkar, mengapresiasi Presiden SBY berhasil mendorong perdamaian, penegakan hukum dan penghapusan utang luar negeri. Tetapi sebagian penyelesaian penegakan hukum di bidang korupsi ditempuh secara adat saja.

Pertikaian antara mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dengan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki dalam kasus penunjukan langsung rekanan proyek di instansinya masing-masing, juga diselesaikan Presiden SBY secara adat. Artinya, tak ada penyelesaian hukum yang tuntas.

John N. Palinggi, Ketua ARDIN mengatakan, masalah mendasar di negara kita ini adalah, kita memang kuat memproduksi peraturan. Tetapi lemah sekali dalam menegakkannya, terutama untuk kepentingan rakyat.

Kita mungkin menegakkan hukum, tetapi sebagian besar aturan itu dija-



foto: berindo wilson

Amien Rais mengaku menerima dana nonbudgeter DKP dari Rokhmin Dahuri hanya sebesar Rp 200 juta.

lankan melalui kepetingan-kepetingan kelompok, pribadi, dan golongan. Sehingga apa yang terjadi, kelompok pribadi dan golongan, dan beberapa orang semakin kaya, negaranya semakin miskin," ujar John, Senin (28/5) saat diwawancara oleh wartawan *Berita Indonesia*, Henry Maruwas Purba.

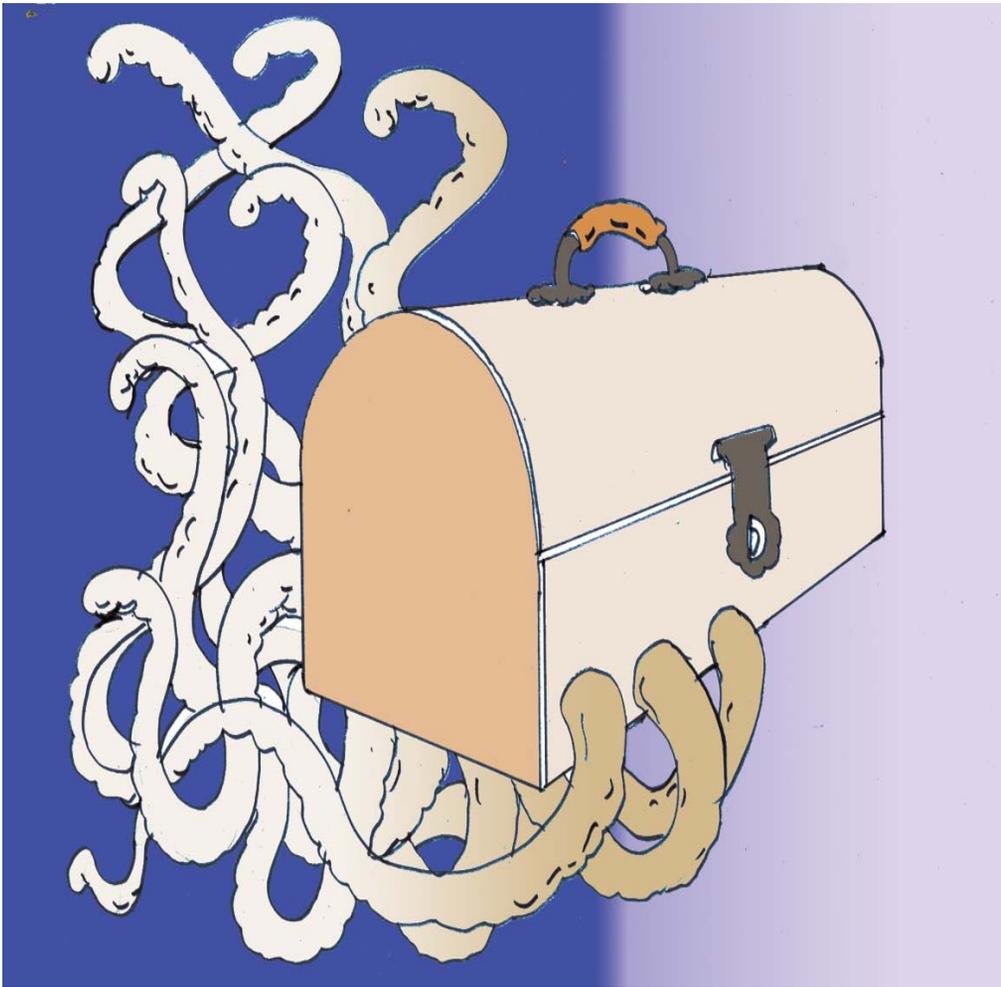
John Palinggi menyebutkan perilaku korup muncul karena semua orang sudah tidak lagi takut akan kutukan Tuhan. Disumpah sedemikian rupa, atribut sedemikian banyak di badan semua orang, yang beragama apapun itu, tetapi tidak pernah takut pada kutukan Tuhan dan sumpah-sumpah yang diucapkan. John menyebut kita sudah terjatuh ke dalam pangkat, harta, benda dan jabatan.

"Kita sungguh amat terjatuh mengutamakan itu, tetapi tidak sayang kepada manusia. Kita sebetulnya menjadi bagian-orang terkutuk dan selalu memperoleh kutukan dari Tuhan karena kita tidak sayang pada manusia. Kita lebih

sayang pada uang, pangkat dan jabatan untuk kepentingan diri kita. Sekalipun kita mencederai sumpah kita, janji kita," kata penggiat dialog antarumat beragama ini.

Bismar Siregar, mantan Hakim Agung yang dikenal tegas dalam bertindak di era Orde Baru mengatakan, siapa pun saat ini terlibat korupsi termasuk dirinya. "Saya sebagai manusia biasa, tidak akan berkata, 'Aku orang jujur seperti malaikat'. Aku adalah manusia yang satu saat juga melakukan kesalahan, paling tidak korupsi hati nurani," kata Bismar.

Karena semua orang telah berperilaku korup, berlangsung secara sistemik di semua sektor kehidupan, Bismar berpendapat bahwa jalan keluar dari jeratan korupsi adalah dengan berdoa kepada Tuhan. "Mudah-mudahan dibukakan Tuhanlah hati kita ini. Bagi mereka yang telah buta matanya diterangi, yang tuli telinganya diterangi, yang mati hatinya diterangi." ■ HT, RB



Misteri Dana NonBudgeter

"Sang Gurita" Yang Sulit Dibuktikan

Para koruptor yang bisa dijerat hukum hanyalah mereka yang meninggalkan bukti-bukti tertulis. Sementara koruptor yang sesungguhnya tak pernah mau menyisakan sedikit pun bukti perilaku korupnya, sehingga sulit dibuktikan. Maka kasus korupsi yang terendus tak lebih dari puncak gunung es saja. Korupsi yang menggurita justru mungkin terus terjadi di sekitar kita setiap saat tanpa bisa dibuktikan.

Entah sarapan apa yang sedang dinikmati Amien Rais di kediamannya, kota gudeg Yogyakarta pada pagi hari 14 Mei 2007 lalu. Barangkali dia turut menyantap editorial surat kabar *Media Indonesia*, yang menyentil dirinya berkaitan dengan dana non-budgeter DKP.

Terbukti siangnya, ucapan Amien Rais tiba-tiba saja meletup. Dengan tegas, tokoh yang belakangan ini getol menyoroti investasi asing di sektor migas dan kekayaan alam lainnya, mengaku telah menerima dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) secara langsung dari tangan Rokhmin Dahuri sebesar Rp 200 juta. Ambisinya menjadi orang nomor satu di Indonesia, yang membutuhkan dana besar untuk kampanye, rupanya membuatnya tak kuasa menampik dana DKP itu. Diapun menyatakan siap menghadapi proses hukum dan memberikan kesaksian di pengadilan.

Pengakuan Amien Rais tak semata-mata berbentuk ketulusan membuka aibnya sebagai bapak reformasi yang terlanjur basah kena getah dana DKP. Pengakuan mantan Menteri Rokhmin Dahuri mengusik perhatian publik, bahwa Amien rupanya sudah berada dalam deretan permainan birokrasi yang akrab dengan korupsi.

Tetapi tampaknya sang tokoh reformasi tak mau terlanjur tersungkur begitu saja. Diapun mengajak para capres dan cawapres 2004 lalu untuk sama-sama basah dan membuka baju mereka. Jika dapat, bisa diduga justru nama Amien-lah yang akan tampil sebagai sang "hero", dan mendapat tempat di atas angin.

Fenomena Gunung Es

Terlepas dari pertemuan selama 12 menit di Lanuma Halim Perdanakusuma, yang melahirkan kesepakatan Amien dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sempat memindahkan masalah dana DKP dari ranah hukum ke politik lalu kembali

lagi ke ranah hukum, kasus ini telah memunculkan asumsi lain.

Rupiah dari Rokhmin yang tersebar ke kantong-kantong capres maupun tim suksesnya, hanyalah sebuah ujung belalai yang terjulur ke permukaan air. Belalai itu disinyalir dimiliki gurita besar dengan seribu tangan yang selama ini membelit begitu banyak instansi pemerintah, termasuk BUMN, anggota DPR dan partai politik. Entah seberapa besar dana yang simpang-siur dan kental dengan sebutan dana nonbudgeter tersebut. Dan entah sejak kapan pula dana itu menjadi irama permainan birokrasi.

Meski di era pemerintahan SBY, KPK gencar mengusut berbagai indikasi korupsi di tubuh pemerintahan dan BUMN, itu dianggap masih kecil tak sebanding dengan dana yang jauh lebih besar terbenam di bawahnya. Masalahnya dana haram yang melingkar-lingkar di luar anggaran resmi itu sulit dibuktikan secara hukum.

Sebut saja kasus skandal korupsi Badan Urusan Logistik (Bulog). Dalam sejarahnya sejak berdiri tahun 1967, Bulog telah menyeret empat bosnya ke hotel prodeo yakni Beddu Amang, Rahardi Ramelan, Sapuan dan Widjanarko Pus-poyo.

Widjanarko masuk tahanan akibat dugaan korupsi proyek pengadaan sapi impor senilai Rp 11 miliar tahun 2001. Beddu Amang dijerat kasus tukar guling tanah PT Goro Batara Sakti. Sedangkan Sapuan disapu dengan masalah dana Yanatera, sebuah yayasan milik Bulog.

Hanya Rahardi Ramelan yang masuk bui akibat dana non budgeter. Rata-rata mereka tidak dijerat akibat urusan beras. Padahal, sejak berdiri tahun 1967, Bulog yang ditugaskan mengamankan urusan beras, selain mengurus beras lokal juga mengimpor dari luar negeri. Era Widjanarko, Bulog setiap tahun mengimpor satu juta ton beras dengan nilai di atas satu triliun rupiah.

Impor beras sangat sering menjadi sorotan dan keributan di kawasan politik. Ketika permasalahan yang diributkan kemudian melemem, timbullah berbagai macam dugaan beras impor sarat permainan dan menjadi sumber dana non budgeter yang menjalar ke mana-mana.

Dugaan korupsi beras impor jelasnya sulit ditelusuri. Investigasi yang dilakukan tim penyidik sangat sulit untuk mendapat barang bukti yang cukup kuat, meski didatangi hingga ke negara asalnya Vietnam.

Beberapa waktu lalu terungkap, semua hasil dari keuntungan yang tidak tertulis secara administratif membuat duit haram bisa mengalir tidak hanya ke kantong Kepala Bulog dan keluarga. Tapi juga ke

ling sebesar Rp 100 juta pada setiap acara," tulis *Tempo*. Tetapi ketika tuduhan dilon-tarkan biasanya para penerima ramai-ramai menolak keras. PDI Perjuangan, misalnya, membantahnya dengan tegas.

Wijanarko pernah duduk di DPR sebagai perwakilan dari PDI Perjuangan sebelum menjabat Kepala Bulog. Karena itu ia diduga membantu keuangan partai tersebut.

Tjahjo Kumolo, salah satu ketua partai berlambang moncong putih tersebut memper-silakan kejaksaan untuk memeriksa partainya.

Demikian pula korupsi yang terungkap di Departemen Agama. Mantan menteri agama Said Agil Husen al Munawar dan Taufiq Kamil, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Penyelenggaraan Haji Depag,

an hakim di Mesir.

DAU juga mengalir ke kantong DPR. Diantaranya, ada yang dipakai untuk membayar kredit rumah mantan anggota DPR. Selain itu kepada beberapa pejabat untuk biaya ibadah haji, dan keluarga mereka sendiri.

Namun hanya itulah yang muncul ke permukaan. Padahal Departemen Agama disinyalir sejak lama dihindangi penyakit korupsi dan aliran dana tidak resmi. Menurut sebuah sumber, berbagai proyek telah dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan dari departemen yang justru mengurus keagamaan ini. Paspor haji, biaya perjalanan, hingga urusan catering di tanah suci merupakan contoh kecil dari permainan yang terungkap. Di bawah itu banyak mengalir



foto: berindo wilson

Rupiah dari Rokhmin yang tersebar ke kantong-kantong capres juga membelit begitu banyak instansi pemerintah, termasuk BUMN, anggota DPR dan partai politik.

kantong berbagai partai politik.

Harian *Tempo* (8/4) menulis dana Bulog mengalir ke beberapa partai politik besar. Modusnya dialirkan pada saat-saat penting seperti menyelenggarakan muktamar atau kongres.

"Jumlahnya tidak besar, pa-

dan Abdul Rosyad, mantan bendaharawan Badan Penyelenggaraan DAU, dijerat dakwaan korupsi menggunakan rekening Dana Abadi Umat untuk keperluan pribadi dan orang lain. DAU disebutkan telah mengalir ke 30 orang hakim yang digunakan untuk membiayai pendidikan dan pelatih-

dana gelap yang sulit dibuktikan.

Semua Menggurita

BUMN juga dihindangi korupsi dan menciptakan banyak dana di luar anggaran resmi. Tahun 2005 Tim Investigasi Korupsi untuk BUMN menemukan sekitar 30 kasus

dugaan korupsi di beberapa BUMN. Menurut Ketua Tim Investigasi saat itu, Lendo Novo, ada kerugian negara sekitar 2,2 triliun dari tujuh kasus yang ditemukan.

Data yang dianggapnya sudah matang itu, seperti diberitakan majalah *Konstan*, diserahkan kepada KPK, Tim Tastipikor, Kejaksaan dan Kepolisian. "Peran kami hanya sampai di situ. Kami tak bisa melakukan audit, investigasi formal seperti BPK dan BPKP," kata Lendo.

Gurita perilaku korup turut pula merambah tubuh TNI dan Polri. Salah satu contoh yang terungkap manakala ditemukan ratusan senjata di rumah (alm) Brigjen Kusmayadi.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Syamsir Siregar mengakui senjata-senjata tersebut belum didukung secara administrasi pendaftaran. Ia tidak berkomentar soal isu senjata dipasok dari agen Singapura, tapi dibeli melalui rekanan TNI-AD dan dananya belum dipastikan berasal dari mana. Yang pasti senjata itu tidak tercatat dan tidak dibiayai APBN.

Mengutip hasil riset pengamat intelijen Wawan H. Purwanto, senjata itu terlalu jauh jika dituding untuk digunakan

aksi makar. "Saya melihatnya lebih untuk kepentingan nasional. Hanya saja ditempuh dengan cara tidak lazim," kata Wawan. Dengan kata lain, senjata yang dibeli dengan tidak menggunakan anggaran resmi merupakan dana non budgeter yang dianggap positif.

Pelaku perilaku korup ada di mana-mana. Kewenangan masing-masing institusi pemerintah acapkali dimanfaatkan oleh para koruptor untuk sama-sama mencari keuntungan. Antara pejabat dan pengusaha rekanan rapi menjalin konspirasi korup.

Sebut saja seorang pengusaha A, yang memiliki banyak kepentingan bisnis di departemen tertentu. Proyek yang ditenderkan acapkali kental dengan kolusi. Sesuai ketentuan, pengadaan barang dan jasa bernilai nilai dari Rp 50 juta wajib melalui proses lelang dan kelayakan peserta lelang.

Dalam parakteknya proyek bernilai puluhan juta hingga trilyunan berubah menjadi ajang permainan atau kolusi antar pengusaha dan pejabat bersangkutan. Keuntungan dari nilai harga proyek mengalir dari pengusaha satu ke oknum lain. ■ **DH, RB**



foto: repro indopos

Pertemuan selama 12 menit di Lanuma Halim Perdanakusuma, yang melahirkan kesepakatan Amien dengan Presiden SBY.

Kekuasaan Cenderung Korup

Pepatah global menyebutkan kekuasaan cenderung korup. Bukan maksudnya untuk tak boleh memegang kekuasaan. Tetapi siapapun pemegang kekuasaan diingatkan agar selalu waspada. Karena pemegang kekuasaan harus membuat kebijakan. Alih-alih kewenangan itu malah bisa menjadi alat untuk berperilaku korup.

Hari Sabarno, misalnya. mantan Menteri Dalam Negeri Kabinet Gotong Royong ini didesak oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) supaya diperiksa KPK. Dasarnya, hasil pemeriksaan atas Oentarto Sidung Mawardi, Dirjen Otonomi Daerah ketika itu. Oentarto ditengarai meneken radiogram berisi pengadaan alat pemadam kebakaran, dengan cara menunjuk langsung PT Istana Sarana Raya sebagai rekanan. Ini berlangsung selama tahun 2002-2005.

Kasus pembelian alat pemadam itu merjerat banyak gubernur dan walikota serta bupati di seluruh Indonesia. Selain pengadaannya tak sesuai prosedur ketentuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, para pejabat daerah berbuat karena memang ada radiogram dari pusat. Bila dituruti jelas melanggar hukum, tetapi bila tidak dituruti, jabatan bisa lepas tanpa alasan yang jelas.

Walikota Makassar, Sulawesi Selatan Amiruddin Maula contohnya. Pada tahun 2003 ia memutuskan membeli alat pemadam, karena didasarkan radiogram dari pusat, lalu memerintahkan Kepada Dinas Kebakaran Kota Makassar Aminuddin untuk membeli langsung dari PT Istana Sarana Raya. Sang Walikota kini sudah ditetapkan tersangka. "Seharusnya pengambil kebijakan di tingkat pusat diperiksa terlebih dulu," kata Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Emerson Juntho, menyebut alasan pemeriksaan atas Hari Sabarno.

Selain itu, di lingkungan DPR setiap pembahasan rancangan undang-undang (RUU) selalu ada setoran untuk empat orang pimpinan DPR, terdiri satu ketua dan tiga wakil ketua, masing-masing Rp 5 juta. Yaitu, saat pembahasan di badan legislatif, panitia khusus, dan panitia kerja (Rp 2 juta), tim perumus, dan tim sinkronisasi.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Nursanita Nasution menyebutkan hal itu. "Setiap tahapan mereka menerima Rp 5 juta. Ini yang harus dihapus," ujarnya. Kata Nursanita dari Fraksi PKS ini, kalau ada anggaran dari pemerintah biasanya digunakan untuk membiayai pembahasan di luar gedung parlemen.

Sekjen DPR Faisal Djamil mengatakan, Dewan hanya memiliki anggaran Rp 324 juta per pembahasan RUU. Karena itu, Ketua DPR Agung Laksono berpendapat, kecilnya anggaran DPR menjadi alasan bagi anggota DPR menerima dana dari pihak luar. "Sekarang tidak bisa lagi, risikonya masuk bui," aku Agung.

Karena kewenangan penguasa pula maka Hadi Wijarabi, mantan Dubes RI periode tahun 2001-2003 di Malaysia, ditetapkan KPK sebagai tersangka. Modusnya, ia menggunakan kebijakan terdahulu berupa Surat Keputusan No. 021/SK-DB/0799 tanggal 20 Juli 1999, yang memuat tarif ganda pengurusan dokumen keimigrasian. "Oleh tersangka, aturan yang besar diterapkan pada pemohon. Namun, tarif yang lebih kecil dijadikan dasar penetapan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara," kata Johan Budi SP, Juru Bicara KPK.

Melihat "usia" dan massifnya perilaku korupsi, agaknya sulit mengharapakan Indonesia akan terbebas dari jerat gurita korupsi. ■ **HT**



Agung Laksono



foto: berindo wilson

Ada 2.160 rekening liar hasil temuan baru Depkeu

Perilaku Korupsi Birokrasi

Dari Rekening Liar Sampai Kado Pernikahan

Berawal dari kasus dana nonbudjeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), perilaku korup birokrasi yang sistemik semakin disorot.

Hari itu, Sabtu, 26 Mei, Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Permana Agung datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia melaporkan 12 kotak angpao dan satu boks karton besar yang diterima keluarganya usai menikahkan

puteri bungsunya, Puri Wi-diarti.

Karena hari Sabtu dan Minggu KPK libur, hari Senin ia kembali datang dengan kotak-kotak angpao dan boks besar itu. Namun, menurut Direktur Gratifikasi KPK Lambok Hutauruk, KPK hanya mengklarifikasi dan mencatat

saja, tetapi tidak boleh menyentuh uang tersebut. KPK menyarankan Permana Agung sekeluarga kembali hari Selasa untuk menghitung.

Hari berikutnya, puteri Permana dan saudara-saudaranya datang mewakili ayahnya yang berhalangan, untuk menghitung. Jumlahnya Rp 316 juta.

Menurut Lambok Hutauruk, sepanjang 2007 sudah ada 45 penyelenggara negara yang melaporkan gratifikasi. Jumlah totalnya lebih dari Rp 1 miliar.

Sementara itu, seperti diberitakan harian *Kontan*, 31 Mei 2007, Departemen Keuangan sendiri tengah gencargencarnya menelusuri rekening liar. Tahun lalu, hasil penelusuran rekening liar yang ditutup itu totalnya menyimpan uang negara sebesar Rp 5,055 triliun.

Awal tahun lalu, Depkeu menemukan 100 rekening. Tahun ini jumlahnya bertambah. Kini ada 2.160 rekening liar hasil temuan baru. Nilainya belum diketahui karena

baru saja dilaporkan oleh Kementerian dan lembaga kepada Depkeu.

Langkah selanjutnya, Departemen Keuangan akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kembali menginvestigasi kegunaan dan asal-usul uang dalam rekening itu. Jika ada hak negara di dalamnya, maka akan dimasukkan ke kas pemerintah. Namun jika murni swadaya karyawan departemen atau masyarakat, akan kembali pada yang berhak.

Temuan awal tahun lalu, rekening liar terbanyak berasal dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), lalu Departemen Keuangan sendiri, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pada kasus Depnakertrans, sebagian besar adalah rekening penampungan untuk asuransi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, sedangkan di Bea dan Cukai adalah rekening transit dari importir untuk membayar bea masuk. Nyatanya, sebagian besar rekening itu tak mengatasnamakan pemerintah.

Yang ditemukan tahun ini, keberadaan rekeningnya meluas. Ada rekening yang disimpan di bank daerah. Kalau ditotal, jumlahnya lebih dari 5.000 rekening.

Deviden Politik

Melihat fenomena yang terjadi, korupsi yang terjadi di Indonesia sudah masuk kategori korupsi sistemik. Pada kasus semacam ini korupsi sudah menyerang seluruh masyarakat dan sistem kemasyarakatan. Karena itu dalam segala proses kemasyarakatan, korupsi menjadi rutin dan diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi sehari-hari. Hal semacam ini disebut sebagai korupsi sistemik, karena sudah memengaruhi secara kelembagaan dan memengaruhi perilaku individu pada semua tingkat sistem politik dan sosio ekonomi.

Berawal dari kasus dana nonbudjeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang melibatkan mantan Menteri DKP Rokhmin Dahuri,

perilaku korup birokrasi semakin menjadi sorotan. Menyusul kemudian keterangan mantan ketua MPR Amien Rais bahwa dirinya dan pasangan capres-capres lainnya pada Pemilu 2004 juga kecipratan dana nonbudjeter DKP dari Rokhmin.

Tindakan Rokhmin membagi-bagikan uang sudah termasuk korupsi birokrasi yang sistemik.

Menurut Deny Indrayana, Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada (UGM), Rokhmin menanam saham kepada para capres sebelum Pemilu. Harapannya mendapat deviden politik berupa keuntungan setelah menjabat, seperti kompensasi, proyek, dan jabatan. Tindakan Rokhmin melanggar dua aturan hukum. Yakni UU No. 15/2002 yang diubah menjadi UU No. 25/2003 tentang tindak pidana pencucian uang, tepatnya pasal 6 dan pasal 1 UU No.



Pemberantasan korupsi harus dirancang secara sistemik

31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Namun Deny juga menyatakan kekhawatirannya bahwa Kejaksaan Agung akan mengesampingkan perkara dengan alasan kepentingan umum karena yang menerima aliran dana mendapat kedudukan di pemerintahan.

Senada dengan itu, kritik datang dari Ketua Umum Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi. Dia berpendapat, penegakan hukum terhadap koruptor yang dilakukan selama ini

Korupsi sistemik mempunyai beberapa ciri, yaitu:

- a. Inklusif dengan lingkungan sosial budayanya. Inklusif dalam arti sudah diterima sebagai kenyataan dalam konteks sosial budaya masyarakat.
- b. Cenderung menjadi monopolistik. Hal ini berarti korupsi sudah menguasai semua sistem kemasyarakatan dalam masyarakat, sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan sistem kemasyarakatan yang wajar, tanpa korupsi.
- c. Terorganisasi dan sulit untuk dihindari. Karena sudah menjadi proses rutin dalam kehidupan sosio ekonomi, maka korupsi menjadi terorganisasi, sadar maupun tak sadar, sehingga secara otomatis semua proses sistem kemasyarakatan akan terkena.
- d. Pada dasarnya korupsi semacam ini tumbuh subur pada sistem kemasyarakatan yang mempunyai beberapa ciri-ciri seperti: kompetisi politik yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, *civil society* yang lemah, dan tidak adanya mekanisme kelembagaan untuk menangani masalah korupsi.

Tingkat korupsi Indonesia sudah mencapai tahap sistemik dan kemasyarakatan. Korupsi sudah biasa dilakukan untuk segala macam kegiatan sehari-hari.

Korupsi disini merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi dan sulit dihindari. Korupsi dilakukan sejak dari awal sampai akhir, apapun urusannya. Mulai dari korupsi internal yang terjadi di intern departemen atau instansi sampai korupsi eksternal yang merupakan korupsi antara orang dalam dengan orang luar departemen atau instansi. ■ RH



Tindakan Rokhmin membagi-bagikan uang bisa disebut cukongisasi korupsi

belum menjangkau birokrat posisi penting. Koruptor yang ditangkap umumnya akibat melanggar ketentuan administratif, bukan koruptor yang sebenarnya.

Proses tebang pilih ini dikawatirkan terus terulang dalam setiap pergantian rezim penguasa sebagai bentuk balas dendam. Koruptor yang ditangkap adalah mereka yang tidak disukai rezim yang berkuasa.

Menurutnya, pemberantasan korupsi harus dirancang secara sistemik. Upaya per-

lawan korupsi harus dilakukan dengan tahap dan waktu pelaksanaan penegakan hukum yang jelas. Sistem yang kompatibel dengan pemberantasan korupsi diantaranya, gaji birokrat dan aparat penegak hukum yang memadai, penciptaan hubungan penguasa dan pengusaha yang transparan, serta reformasi birokrasi yang menyeluruh. Infrastruktur yang belum memadai membuat nuansa politis lebih kental dibanding upaya penegakan hukumnya. ■ RH

Bismar Siregar:

Korupsi Bergantung Niatnya

Mantan Hakim Agung Bismar Siregar mengatakan batasan antara tindakan korupsi dengan bukan korupsi sangat tipis sekali. Keduanya sangat bergantung kepada niatnya.

Menurut Bismar Siregar, tindak korupsi sejak dahulu sudah ada dan tidak akan bisa diberantas. Ia mendasarkannya atas penciptaan malaikat menjadi setan. Saat itu, Tuhan memberikan konsesi kepada Iblis untuk menggoda dan memperdaya manusia.

Politik uang juga bukan hal baru. Dari dulu sudah demikian. Bedanya, dulu Golkar begitu berkuasa, sehingga tidak perlu mendapat saingan dari siapapun dalam pemilu.

"Saya mengatakan dosa Golkar sungguh sangat besar dalam penghancuran negara kita ini. Bukan saya benci, tidak. Saya dipilih Golkar, kok, menjadi Hakim Agung. Sebelas tahun enam bulan saya menjadi anggota Golkar," ucapnya.

Setelah era reformasi, muncul pesaing-pesaing yang dengan segala cara mengupayakan mereka termasuk yang menang. Lalu *money politics* bukan dengan lili ta'ala tetapi, ini duit pilih aku atau lil'aku lil'duit.

Namun, ketika kasusnya terungkap seperti aliran dana nonbudjeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), ke setiap pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2004, semuanya menyangkal mempertanyakan mana buktinya.

Kata Bismar, di dalam Islam ada ajaran, apapun yang terjadi pasti seizin Tuhan. Terungkapnya aliran dana DKP bagi orang tak beriman akan disesali, karena itu diserukan agar hasil Pilpresnya dibatalkan.

Tetapi bagi orang beriman tidak demikian. Ambil hikmahnya, ucapkan, rupanya

kami sudah terlampau lama bergelimang di dalam dosa dan dusta. Mulailah kami sekarang ini tobat kepada-Mu dan tidak akan terjadi lagi perbuatan seperti itu. "Maukah mereka melakukan yang demikian itu," kata Bismar.

Keadilan Hati Nurani

Menurutnya, Undang-Undang Tahun 70-an tentang Pemberantasan Korupsi sudah bagus. "Kalau itu saja dilaksanakan sudah bagus," ucapnya.

Pada UU lama ancaman hukuman mati memang tak ada, karena saat itu sasarannya adalah pegawai dan pejabat, sehingga jangan sampai mereka dihukum mati. Bismar berpesan, ubah saja pasal itu. Sebab menurut hemat dia hakim boleh mengadakan perubahan.

"Melihat situasi korupsi sudah sedemikian rupa, tidak ada pilihan lain, walaupun tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman mati, hakim bisa nyatakan hukuman mati," kata Bismar. "Kalau si Bismar hakimnya, akan berbuat demikian. Karena situasi tidak mengizinkan lagi mereka itu terus dipelihara, mati."

Tetapi atas nama reformasi UU lama diperbaiki dengan membentuk hakim tipikor dan segala macam, yang akhirnya justru membawa keruwetan baru. Masing-masing merasa mempunyai wewenang.

"Dibuat sedemikian rupa sehingga kita bingung," kata Bismar, yang pernah menjatuhkan vonis bersalah kepada pegawai Telkom karena membuat tagihan fiktif. Di muka persidangan terungkap bahwa tagihan fiktif itu dibuat



foto: berindo wilson

karena ada permintaan ini dan itu dari atas. Pegawai itu mau tidak mau harus menuruti permintaan dari atas itu.

"Oleh karena itu saya katakan dia terbukti bersalah. Tapi bukan dia yang harus mempertanggungjawabkan kesalahan itu, tapi atasannya," kata Bismar, yang selalu melihat pokok permasalahan secara utuh sebelum menyatakan terdakwa bersalah.

Apa yang dilakukan Rokhmin Dahuri pernah pula dilakukan Bismar, saat menjabat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, berkantor di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Utara. Ia membuat surat keterangan mengadakan pungutan-pungutan, termasuk menaikkan biaya perkara di Pengadilan.

Muncul keributan. Disebutkan, Pak Domo (Laksamana Sudomo) Pangkoptamtib

akan datang untuk inspeksi karena biaya perkara terlampau mahal. Rekan-rekan Bismar di PN Pusat dan PN Selatan sudah menurunkan tetapi ia berkata tidak.

"Kenapa harus saya turunkan? Takut Sudomo atau takut kepada rakyat yang ingin mendapatkan keadilan," kata Bismar, yang membuat SK kenaikan dana pembangunan.

SK pembangunan diterbitkan untuk mengelola kantor yang anggarannya tidak disediakan pemerintah. Termasuk membiayai perjalanan Bismar dengan mobil Toyota dari rumahnya di Jalan Cilandak I, Jakarta Selatan menuju Ahmad Yani hanya dijatah lima liter bensin. Sekali jalan sudah habis.

Ia tak bisa membiarkan itu apalagi pemecahannya sampai buntu. "Tidak, saya bilang. Kalau buntu, itu bukan si Bis-



foto: berindo wilson

Matinya hati nurani juga sudah terjadi di benteng terakhir keadilan, Mahkamah Agung.

mar. Saya harus mencari jalan keluar dari kebuntuan ini," ujar Bismar.

Dari pungutan yang ditetapkan, Bismar bisa memfasilitasi kantor dengan jasa *cleaning service*, sesuatu yang belum pernah ada di tahun 1970-an itu. Termasuk pemberian gaji sebesar Rp 60 ribu perbulan yang cukup memadai saat itu. Pengadilan sebagai kantor publik terpelihara kebersihan dan kerapihannya. Pegawai pun memperoleh uang insentif dari setiap lembar putusan yang diketik. Setiap pencari keadilan yang meminta putusan bisa segera terlayani.

Giliran datang permintaan dari atasan supaya menyerahkan dana Rp 750 ribu untuk Seno Adjie Cup, Bismar menolak. Alasannya sederhana, ia tidak main tenis.

"Kalaupun ada Rp 750 ribu saya lebihutamakan karyawan saya, yang setiap kenaikan kelas membutuhkan biaya untuk anak-anaknya. Sayautamakan untuk ini, setiap hari Lebaran saya berikan itu," kata dia.

Cerita berlanjut ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiba. Usai memeriksa dilihat kantor bersih dan rapi ditanyakanlah dari mana duitnya. Dijawab Bismar, diambil dari dana pembangunan. BPK

minta itu turut diperiksa.

"Tidak, saya bilang. Itu bukan uang negara. Itu uang kebijakan saya yang saya pertanggungjawabkan di lingkungan saya. Saya tidak setor ke kas negara sebab kalau saya setor, coba bayangkan bagaimana sulitnya untuk mengambil uang yang menjadi hak kita," kata Bismar.

Ribut-ribut soal itu menjadi masalah dan berlanjut ke ruang politik di DPR. Tetapi DPR justru membenarkan Bismar. "Itu uang kebijaksanaan si Bismar, yang tidak saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya, tapi untuk kepentingan karyawan dan seterusnya."

Bukti lain kebijaksanaan Bismar sebagai Hakim Agung adalah menyuruh seluruh karyawan kantor pulang jam dua siang. Ini lebih cepat dari ketentuan formal pulang jam empat sore.

Ia lalu didatangi Inspektoral Jenderal Departemen Kehakiman. Bismar mengatakan tidak mau mengikuti jam formal pulang jam empat sore. Ia bilang, lebih mengikuti rasa keadilan hati nuraninya. Kalau pegawainya pulang jam empat sore, mereka harus makan sementara Bismar tak mampu memberi mereka uang makan. Jika demikian mereka harus

membawa bekal dari rumah. Yang satu membawa rendang karena mejanya 'basah', satunya hanya tempe sepotong itupun dibagi dua. Setengah dibawanya ke kantor setengah lagi untuk di rumah.

"Tolong bayangkan, pikirkan, bagaimana rasa solidaritas kami di sini: satu makan rendang, atau rembur kuring karena dia punya uang, dan yang ini tidak. Saya harus atasi itu supaya jangan timbul kesenjangan di antara mereka," kata Bismar.

Selama sepuluh tahun memimpin PN, Bismar bisa mengendalikan semua urusan kantor dengan tidak ada korupsi.

"Jadi saya katakan korupsi itu batasnya sangat minim sekali bergantung kepada niat. Kalau niatku lillah ta'ala silahkanlah, hukumlah aku, tidak peduli aku, saya bilang. Lebih baik engkau hukum saya walaupun saya benar di mata Tuhan. Engkau nanti yang harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan," kata Bismar.

Puncak Gunung Es

Berkaca pada pengalaman puluhan tahun sebagai hakim Bismar setuju bahwa kasus dana DKP adalah puncak gunung es.

Diingatkannya, itu bukan sepenuhnya prakarsa Rokhmin melainkan karena ada atasan yang datang mintaminta. "Kalau atasan tidak minta-minta, dia juga saya yakin tidak menjadi rakus untuk memberikan yang demikian itu," kata Bismar.

Kalaupun baru sebatas Amien Rais yang mengakui menerima dana DKP, Bismar yakin capres-cawapres dan penerima lainnya hatinya harus menjerit. Sebab mereka punya hati nurani. "Kecuali kalau dia sudah tidak punya hati nurani lagi. Sekarang hati nurani sudah mati. Kasus lumpur panas Lapindo misalnya, masiakah SBY punya hati nurani, masiakah mampu merasakan yang dialami oleh korban Lapindo," kata Bismar.

Matinya hati nurani menurutnya juga sudah terjadi di

benteng terakhir keadilan, Mahkamah Agung termasuk Ketua Mahkamah Agung yang memperpanjang usia pensiunnya. Walau itu diajukan Sekjen, yang nota bene anak buahnya, tetapi karena namanya diikutsertakan diperpanjang, kemudian disetujui, menurut Bismar adalah korupsi hati nurani.

"Masiakah kau andalkan dia untuk mampu memberantas korupsi, kalau dia terhadap hati nuraninya pun sudah korupsi. Itulah masalahnya," kata Bismar.

Bismar menilai semua sektor saat ini berperilaku korup. UU Kewarganegaraan pun menjadi sarang korupsi baru. Padahal, UU kewarganegaraan yang lama dimana ia ikut menyelesaikan, bisa digunakan untuk memberikan surat kewarganegaraan. Dengan surat secarik itu siapapun tidak perlu membuktikan lagi bahwa dia warga negara, sebab sudah tercantum namanya di situ.

Bismar menawarkan solusi keruwetan pemberantasan korupsi dengan memberikan maaf. Sebagai umat sekaligus bangsa kita harus budayakan lembaga pemaafan bila ada sengketa di antara sesama anak bangsa.

"Saya bukan orang yang berpikiran, kalau salah, hukum, salah, hukum. Tidak. Kalau korupsi dari dulu saya mengatakan, siapa yang memberantas korupsi? Yang memberantas koruptor dan yang diberantas koruptor. Jadi bagaimana dong, tolonglah kita selesaikan," ucap Bismar.

Solusi ini berbeda dengan penyelesaian hukum para hakim yang dibesarkan dalam filsafat hukum Barat, yang meyakini penjara sebagai penyelesaian hukum.

"Kalau si Bismar falsafah hukumnya adat batak," ucapnya. Ia lalu menyebut sebuah perumpamaan klasik adat Batak:

Metmet bulung ni jior, metmetan bulung ni bane-bane. Uli hata na tigor, ulian hata na dame.

Artinya, adalah baik mengatakan kebenaran tetapi jauh lebih baik mengatakan kedamaian. ■ HT/AM/RB

WAWANCARA

John Palinggi:

Jangan Biarkan Orang Berfoya-foya dari Hasil Pencurian

Kini, usia reformasi genap 9 tahun. Sebuah usia yang seharusnya cukup membangun kembali tatanan kehidupan negara Indonesia sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Namun di saat yang bersamaan dengan 9 tahun reformasi itu, kasus dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan mencuat. Ironisnya, aliran dana itu justru mengalir ke calon-calon presiden/wakil presiden peserta Pemilu Presiden 2004. Padahal, justru mereka yang menerima dana itulah yang paling diharapkan menjadi penegak perjuangan reformasi.

Dengan terungkapnya aliran dana DKP ini, segera muncul pertanyaan paling mendasar, benarkah pergerakan reformasi selama ini nyaris tidak menyentuh aspek moral.

Menurut John Palinggi, banyak di antara pemimpin Indonesia yang berbicara seperti bermoral, tetapi kelakuannya tidak lebih dari maling. Orang tidak takut kutukan Tuhan. Berikut petikan wawancara dengan Ketua Asosiasi Pengadaan Barang dan Distributor Seluruh Indonesia ini, Senin (28/5)

Bagaimana menurut Anda hasil yang dicapai reformasi hingga 9 tahun saat ini?

Kita bermaksud memperbaiki keadaan negara, melalui mekanisme konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan. Pada dasarnya, UUD, UU, peraturan yang lainnya itu, saya rasa telah mengandung sebagian besar asas-asas untuk perbaikan negara. Masalah mendasar di negara ini adalah, kita memang kuat sekali memproduksi peraturan, tetapi kita lemah sekali dalam menegakkannya, terutama untuk kepentingan rakyat. Kita mungkin menegakkan hukum, tetapi sebagian besar menegakkan aturan itu dijalankan melalui kepentingan-kepentingan kelompok, pribadi, dan golongan. Sehingga apa yang

terjadi, kelompok pribadi dan golongan, serta beberapa orang semakin kaya, tapi negaranya semakin miskin.

Mengapa terjadi seperti itu?

Nah itu berarti tata kelola pemerintahan yang baik itu mesti diperbaiki kembali. Jangan disalahkan aturan atau UU yang ada melainkan manusianya yang tidak setia pada negara. Ini yang muncul di negara ini. Pada periode ini (Kabinet Indonesia Bersatu-red) sejumlah manusia yang dipercaya untuk mengelola negara, supaya ada kesejahteraan rakyat yang muncul melalui efisiensi keuangan negara, ternyata mereka bukannya menjaga negara tetapi justru berusaha merusak negara melalui perilaku mereka dengan sengaja untuk memperkaya diri.

Dana DKP menjadi perdebatan terbaru yang melibatkan para pemimpin bangsa, menjadi salah satu indikator dari gagalnya pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih?

Dana DKP sudah menjadi wacana yang menggelinding bahkan menjadi bola liar hingga menimbulkan masalah baru di dalam sistem pemerintahan. Setidaknya, saudara Rokhmin Dahuri itu, kalau memang ada bukti-bukti berupa tanda terima yang kongkrit yang ada pada dia, dibuka saja. Sehingga bisa menjadi acuan,



foto: berindo mh

sehingga tidak dilempar dalam wacana yang menjadi bola liar dan dapat mengganggu stabilitas negara.

Kalau semua melempar sesuatu tanpa tanda bukti, juga harus diingatkan, karena kepentingan negara jauh lebih penting daripada memuaskan diri sendiri.

Apakah dengan isu dana DKP ini, calon-calon pemimpin yang menerimanya tidak memiliki moralitas yang tinggi?

Bukan cuma persoalan moral. Orang tidak takut kutukan Tuhan. Bayangkan, disumpah sedemikian rupa, atribut sedemikian banyak di badan semua orang yang beragama apa pun. Tapi tidak pernah takut pada kutukan Tuhan terhadap sumpah-sumpah yang diucapkan.

Yang kedua, kita sesungguhnya telah terjatuh di dalam pangkat, harta, benda, dan jabatan. Kita sungguh amat terjatuh mengutamakan itu, tetapi tidak sayang manusia. Kita sebetulnya menjadi bagian-bagian orang terkutuk dan selalu memperoleh kutukan dari Tuhan, karena kita tidak sayang pada manusia. Kita lebih sayang pada uang, pangkat dan jabatan, untuk kepentingan diri kita. Sekalipun kita menciderai sumpah kita, janji kita.

Jadi, kenapa muncul dana DKP, karena tata kelola pemerintahan (*good governance*) belum berlangsung dengan sesungguhnya. Itu sebatas wacana yang

dilontarkan orang asing, tetapi kita sendiri mewacanakan pada sisi lain. *Good governance* adalah suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan *good government*, menciptakan pemerintah yang baik, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu sebatas pada pernyataan-pernyataan, hanya manis didengar. Namun di dalam pelaksanaannya, di depan mata, siang hari bolong, orang mencuri uang negara.

Bukankah itu menandakan rendahnya moralitas para pemimpin?

Jangan hanya mencari moralitas. Penegakan hukum itu harus jalan dengan benar. Selama ini penegakan hukum tidak jelas ke mana arahnya. Ini saya anggap tidak jelas ke mana arahnya, sebab negara semakin lama semakin bangkrut dan terakhir akan terjadi disintegrasi sosial.

Sepertinya, aturan hukum yang konon sudah cukup keras, ditambah dengan kelembagaan negara yang bersifat khusus, seperti tidak bisa berbuat banyak?

Itu yang dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, bagaimana pun rencana, kalau tidak ada *usswatun hassanah*, itu tidak bisa jalan. Keteladanan dan kemampuan menghukum orang, itu mesti ada di suatu negara. Negara tidak bisa membiarkan orang hidup berfoya-foya dari hasil pencurian, terutama aparaturnya.

Dana DKP sebenarnya hanya bagian kecil dari gurita korupsi yang ada di negeri ini?

Dalam pengadaan barang dan jasa milik pemerintah, sangat banyak dana-dana siluman yang mengalir ke pemerintah, itu kan bagian dari korupsi yang sistemik?

Permasalahan dasarnya adalah sistem rekrutmen dan penempatan eselon-eselon pemerintahan maupun BUMN itu, sering dilakukan dengan campur baur kepentingan politik. Apa yang terjadi? Orang-orang yang ditempatkan itu, adalah orang-orang yang telah berutang jasa maka di dalam tugasnya pasti tidak akan melakukan kebaikan bagi negara. Banyak informasi yang menyatakan menyeter ke sana sini, sehingga sangat tidak mungkin lagi melaksanakan tugasnya.

Bapak juga, mungkin mengalami sendiri, misalnya kalau tidak memberi uang sekian persen dari nilai proyek?

Tidak usah terlalu urai sampai ke situ. Yang pasti bahwa pengadaan barang pemerintah di Indonesia, bolehlah saya katakan 56% persen masih berlangsung tidak sesuai dengan peraturan. Hampir semua instansi, hampir 90% tidak melakukan aturan yang diatur dalam Ke-

putusan Presiden No. 80 Tahun 2003. Mereka melakukan sendiri pemilihan atas dasar kroni-kroni, anak, cucu, dan segala macam. Ini masih berlangsung sampai sekarang. Dan itu adalah pemborosan paling besar di negeri ini.

Kalau kita mau mendekati prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik dan bersih, hal-hal seperti ini kan harus dihentikan?

Anda (*pers-red*) sudah teriak di sana dan masyarakat juga sudah teriak, tetapi sistem dan kesadaran untuk berubah ke arah yang lebih baik, tidak ada di negara ini. Yang kedua, tidak ada orang yang diteladani untuk mampu mengawasi ke bawah. Orang yang mengawasi *kan* orang teladan. Bagaimana kalau semua bermain. DPR dan MPR saja itu, tidak pernah menyelenggarakan tender seperti yang diharapkan (*kepres-red*). Tender itu diatur-atur. Hampir seluruhnya (*intansi-red*).

Padahal, mereka yang seharusnya jadi teladan?

Seharusnya mesti teladan. Mana ada jajaran-jajaran pada level-level pemimpin di kantor-kantor atau instansi yang memberi teladan. Dan kalau ada yang membantah pernyataan ini, saya siap hadapi.

Jadi, bagaimana menurut Anda langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki semuanya ini?

Semua orang harus sadar bahwa jika dalam satu atau dua tahun ini kita tidak berubah lebih baik, saya mengkhawatirkan negara ini porak-poranda. Sebab tingkat kemarahan rakyat itu sudah cukup tajam karena miskin dan tidak ada pengharapan. Mau sekolah susah dan keluar sekolah juga susah cari kerja. Di samping itu, narkoba merajalela. Keempat, tidak ada lapangan kerja. Kelima, di depan mata rakyat, semua orang jengah melihat seseorang mencuri uang negara, tetapi juga disanjung-sanjung karena memberi sumbangan (dari hasil pencurian). Saya sendiri sebagai orang yang mengabdikan diri pada berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Saya sering bertanya, masiakah negara saya akan tetap eksis kalau semua ini tidak bisa diatur dengan baik?

Kita seperti ini tidak menyadari, puncak kemarahan masyarakat itu, cepat atau lambat akan datang?

Sekarang ada lagi kecenderungan. UUD dasar harus diubah. Apanya? Bukan UUNya melainkan manusianya yang tidak berakhlak, tidak bermoral, dan tidak pancasilais. Sudah kita sepakati pancasila,

mau ada ideologi lain lagi. Dalam ke-lakuan juga, kalau bukan kelompok ini, itu tidak boleh. Mana bisa negara dibangun satu orang atau satu kelompok saja. Memulainya saja bersama *koq*. Itu juga masalah yang serius.

Jadi jangan salahkan UUD. Itu namanya, tidak maksimalnya kinerja menteri, UU-nya harus dicek kembali. Ataukah produk dari DPR itu, ada hal yang harus kita pertanyakan. Misalnya, bagaimana investor menguasai tanah hingga 95 tahun. Itu kan sama saja dengan menjual tanah di negeri ini. Kenapa masuk dengan istilah investasi, menguasai tanah hingga ratusan ribu Ha, hingga 95 tahun. Negara bangkrut! Nah itu produk DPR dan MPR. Ada lagi konsep sekarang, kalau orang keberatan, tidak usah bayar pajak. Mereka-mereka yang mengajukan konsep UU ini, masiakah berpikir waras untuk negara atau memang dalam otaknya sudah mau menjual negara?

Saya mau tegaskan, terlalu sedikit orang yang masih memikirkan negara ini, tetapi sudah 20 juta orang yang mau menjual negara ini, melalui kelakuannya dan tingkah lakunya yang cacat etika.

Bagaimana dengan nasionalisme?

Jangan bicara nasionalisme. Nasionalisme itu, akar persoalannya adalah perilaku yang baik dan kesetiaan bagi negara. Jika tidak setia terhadap negara, tidak usahlah bicara nasionalisme, pasti orangnya pembohong.

Menurut Anda, apa yang telah dihasilkan proses reformasi selama 9 tahun ini?

Kita memang mengalami masalah berkaitan dengan kemiskinan yang belum bisa diatasi, korupsi juga masih merajalela. Tetapi banyak yang sudah dicapai juga. Misalnya banyak orang yang sudah dihukum, penegakan hukum pun sudah mulai berjalan. Tetapi barulah ketahuan kalau sekarang tingkat keberanian orang lebih tinggi untuk mencuri uang negara. Persoalan dasarnya adalah presiden tidak bisa mencampuri penegak hukum. Siapa yang harus disalahkan, kalau ada maling di mana-mana.

Jadi, bagaimana yang seharusnya?

Mestinya dipertanyakan, penegak hukum di Indonesia ini benar *nggak kerjanya*? Ini, sedikit-sedikit presiden. Masyarakat juga harus diajak berbicara secara proporsional. Jadi fungsi mewakili aspirasi itu, tidak dijalankan. Ini semua menumpahkan kepada presiden. Saya tidak membela, tetapi coba berpikir lurus sedikit ya. Fungsi DPR apa sudah jalan? ■ **MH**

Wawan H Purwanto:

Semuanya Adalah Permainan



foto: berindo amron

Pengamat intelijen Wawan H. Purwanto berpendapat sulit untuk memberantas korupsi sistemik di Indonesia. Sebab transaksi dilakukan di bawah tangan dan tidak terdata.

Dosen di berbagai institusi pertahanan dan keamanan negara ini mengatakan, peta perjalanan dana kampanye maupun besarnya sulit dideteksi. Sebab laporan Panwaslu tidak pernah ditindaklanjuti. Setelah *crosscheck* pun banyak nama fiktif yang tidak memungkinkan menjadi penyumbang. Banyak juga atas nama perusahaan yang sudah bangkrut, atau alamat rumahnya ada tapi kosong atau sudah digusur. Hal semacam itu menunjukkan ada upaya pengaburan asal-usul pendanaan.

Demikian pula dana-dana luar negeri. Kata Wawan di Amerika pun hal itu terjadi. Seperti James T. Riady yang menyumbang Partai Demokrat, dihukum kerja sosial dua tahun.

Mengapa seseorang mau menyumbang, Wawan mengatakan tentu karena punya ke-

pentingan. Sebab tidak ada makan siang yang gratis. Entah ingin bisnisnya lancar, atau ingin tetap menjaga hubungan dengan pemerintah yang bakal berkuasa. Jadi sifatnya *give and take* dan rata-rata sulit dibuktikan. Kebanyakan mereka menyumbang di bawah tangan *hand by hand* dan tidak terdata.

Dengan cara seperti itu mereka yang korupsi tak bisa tersentuh hukum. Yang bisa diangkat hanya yang terdata. Sementara yang tidak terdata, yang jumlahnya jauh lebih besar tidak bisa diangkat.

Dana nonbudgeter DKP kalau misalnya tidak diakui, karena tidak terdata, tidak ada tanda tangan dan sebagainya, menurut Wawan tidak bisa diangkat. Tapi kalau misalnya ada pengakuan dan di situ ada data, bisa.

Perbedaan angka antara Amien Rais yang mengatakan menerima Rp 200 juta, de-

ngan angka DKP yang memberikan Rp 400 juta, misalnya. Kalau masing-masing tidak bisa memberikan suatu bukti otentik, hilang kasusnya. Dana DKP yang bisa ditindaklanjuti KPK harus ada otentikasi bukti. Pelaku korupsi bekerja sistemik tidak meninggalkan jejak dan tanpa saksi pula. "Kalau tidak, jangan bicaralah," tegas Wawan.

Karena itu pemberantasan korupsi mustahil dilaksanakan kecuali menurunkan angkanya, dan itu makan waktu yang lama. "Terbukti, pemerintah Indonesia sekarang ranking korupsinya sudah mulai membaik. Tadinya tertinggi, terus ranking tiga, sekarang keenam," kata Wawan.

Ia setuju yang bisa dijerat hanyalah koruptor yang meninggalkan catatan sebagai jejak. Seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang membukukan uang komisi yang diperoleh. Karena dibukukan menjadi barang bukti.

Demikian halnya dialami Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong yang membuat catatan pemasukan dan pengeluaran dana nonbudgeter. Ilmuwan biasanya kalau masuk menjadi politisi sudah beda *view*-nya. Ilmuwan boleh salah tapi tidak boleh bohong. Politisi berbohong boleh tapi tidak boleh salah. Pasal yang bisa dikenakan akhirnya adalah pasal menyalahi prosedur saja.

Karena itu korupsi yang terangkat ke permukaan diyakini merupakan puncak gunung es sebab koruptor yang sesungguhnya dan berkualifikasi raksasa justru tak terendus. Pada kenyataannya koruptor-koruptor besar punya *link* besar ke para pejabat tinggi negeri ini.

"Jadi sekarang masalah sosiologi hukum. Dan itu bukan soal dia sipil atau militer. Tapi, siapa yang memang punya *back up* yang cukup, tentu bisa

berkelit minimal meringankan hukuman. Inilah sosiologi hukum, dan faktanya terjadi bukan hanya di Indonesia," kata Wawan.

Hukum bermain di atas lobi-lobi, apalagi kalau sudah nyerep-nyerep soal politik. Politik itu menyangkut kekuasaan, punya *power*, jangkauan ke lini terendah atau lini tertinggi dari aparat itu sendiri. Punya *power* untuk mencopot, untuk menggeser. Dan secara logika, kata Wawan kasus dana capres-cawapres ini adalah permainan. "Jangan kaget di balik permainan nanti ada kejutan-kejutan. Dan kita tidak bisa terlalu idealis di dalamnya."

Menurut Wawan, penegakan hukum tidak bisa semata melakukan *law enforcement* termasuk menciptakan lembaga hukum baru. Proses pemahaman budaya, pendidikan yang berkualitas serta memasukkannya dalam kurikulum khusus di sekolah mengenai budaya-budaya anti korupsi, harus ditekankan. Kalau tidak, mereka akan tetap teguh pada prinsip, yang menganggap barang haram bila belum di tangan, tapi kalau sudah di tangan menjadi halal.

Jangan menegakkan hukum dengan menciptakan korupsi baru di lingkungan penegakan hukum yang baru dibuat. "Mau dibentuk tim berapa saja KPK Jilid II, Jilid III karena yang reguler tidak jalan, juga dibentuk tim ini, tim itu, hanya menciptakan sistem korupsi baru di tubuh penegak hukum baru. Karena dia punya *power* untuk *bargaining*," kata Wawan.

Wawan menganggap pemberantasan korupsi yang sistemik akan beda ceritanya kalau pemerintah sudah mampu membenahi ekonomi. Karena faktor ekonomi berperan menimbulkan penyelewengan dan kejahatan. "Jadi, benahilah itu." ■ HT, AM

Presiden dan Capres di antara Dana Nonbudgeter

Dua majalah berita umum terbitan ibu kota, *Tempo* dan *Gatra*, kembali mengangkat aliran dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan era Rokhmin Dahuri yang menyerempet ke capres-cawapres pada Pemilu 2004 sebagai liputan utamanya di edisi awal Juni ini. Sedangkan majalah berita ekonom *Trust* mengangkat topik berjayanya kembali konglomerat hitam.

Liputan utama majalah *Tempo* (4-10/6) menampilkan aliran dana nonbudgeter di bawah judul cover 'Keserempet Dana Rokhmin'. Sejumlah tokoh dan politisi diberitakan ikut menikmati duit untuk kaum nelayan itu. Diantaranya, mantan capres Amien Rais, mantan cawapres Salahuddin Wahid. Bahkan, presiden/wapres terpilih Susilo Bambang Yudhoyono/Jusuf Kalla. Sejumlah orang di lingkaran dalam Susilo Bambang Yudhoyono mengaku menerima dana ilegal itu, tapi Yudhoyono sendiri mengelak dengan mengatakan mereka bukan bagian dari tim kampanye SBY-JK. Sedangkan menurut penelusuran *Tempo*, mereka-mereka itu adalah orang-orang penting yang mengatur gerak dan lafal sang calon presiden, walau tidak tercantum sebagai anggota tim sukses yang resmi. Munawar Fuad Nuh misalnya, adalah salah seorang di antara 1.700 yang diinformasikan menerima dana nonbudgeter DKP. Fuad yang tercatat menerima Rp.150 juta pada 11 Oktober 2004 itu menurut *Tempo* adalah ibarat penata panggung SBY pada saat kampanye di lingkungan pesantren, pada Pemilu Presiden 2004. Ia bertugas menganalisis kiai yang perlu didatangi. Juga menyiapkan kata dan lafal yang tepat bagi sang kandidat untuk mengikat hati *sahibul bait*.

Majalah *Gatra* (31 Mei-6 Juni) juga secara khusus mengangkat liputan utamanya mengenai perseteruan antara Presiden SBY dengan Amien Rais yang juga berhulu dari dana nonbudgeter DKP. Ketika nama Amien Rais sebagai calon presiden pada Pemilu 2004 disebut-sebut sebagai salah satu penerima dana tersebut, mantan Ketua MPR itu mengakui namun sambil mengatakan bahwa capres lain juga menerima dana tersebut. Bahkan menurutnya, ada pasangan capres yang mendapat dana dari Washington. Merasa dirinya yang disindir, Presiden SBY pun secara terbuka menyampaikan kekesalannya terhadap Amien, yang disebutnya sering mengolok-olok di berbagai forum. Keterangan pers Presiden itu langsung memancing banyak kalangan dan meminta Amien menjadi panglima upaya

Dalam pernyataan tertulis yang diberikan Rokhmin setelah kasus terkuaknya masalah dana nonbudgeter DKP, ia menyatakan bahwa uang yang diberikan kepada Fuad murni untuk kegiatan profesional dan sosial.



pelengseran Presiden SBY. "Banyak kalangan yang ingin ketemu Pak Amien. Mereka berancang-ancang turun ke jalan," kata Drajad H. Wibowo, politisi PAN yang mendampingi Amien saat masalah itu memanas, akhir Mei.

Mediasi Mensesneg Hatta Rajasa untuk mempertemukan kedua tokoh akhirnya membuka pintu perdamaian. Pertemuan pun diadakan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (27/5). Kedua tokoh bicara empat mata selama 12 menit. Isi pembicaraan terbuka ke publik setelah Amien menggelar jumpa pers di kediamannya di Yogyakarta, (28/5). "Supaya isinya tak amburadul, saya katakan ada tiga," kata Amien. Pertama, katanya, SBY ingin membuka komunikasi yang tadinya mampet. Kedua, disadari bahwa komunikasi akan menghilangkan *miss understanding*. Ketiga, SBY- Amien sepakat menempatkan masalah itu ke ranah

hukum, bukan ranah politik. Amien juga menuturkan, pada pertemuan itu kedua pihak saling memaafkan. "Ada semacam mutual simbiosis *forgiveness*," kata Amien. SBY minta maaf bila ada tutur kata yang tak mengenakkan. Demikian juga Amien Rais minta maaf bila dalam seminar dan ceramah kadang menggunakan pelesetan ala Yoga yang dianggap mengolok-olok. Dengan demikian, itu artinya bahwa keduanya masih akan terus beradu napas, tapi bukan lagi di pentas politik. "Saya akan tetap memaparkan data aliran dana bermasalah, baik yang dari DKP, penyumbang fiktif, maupun dugaan dana asing," ujar Amien.

Sedangkan majalah *Trust* (4-10/6) mengangkat liputan utama tentang berjayanya kembali para konglomerat era 80-an - 90-an. Sebuah keniscayaan di sebuah negara yang menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, yang sistem perekonomiannya menyambut riang gelombang leberalisasi, pengusaha sekelas konglomerat pasti diperlukan. Menurut *Trust*, seruan, "menolak kembalinya konglomerat hitam" boleh berkumandang. Tapi, negeri ini kelewat mendamba datangnya modal. Hitam atau tidak, konglomerat kawakan tahu persis soal itu. makanya, mereka bisa kembali berjaya dengan gemilang.

Di antara konglomerasi dimaksud, Grup Salim misalnya. Konglomerasi paling besar di Tanah Air selama dekade 80-an dan 90-an, beberapa tahun setelah krisis sempat goyah. Asetnya di sekitar 55 perusahaan diambil negara dan dijual murah oleh BPPN. Awal tahun 90-an, majalah forbes mencatat kekayaan Soedono Salim (Liem Sioe Liong), pemimpin konglomerasi itu mencapai US\$ 2,5 miliar. Belakangan diperkirakan tinggal US\$800 juta. Namun, tak berapa lama berjaya kembali. Akhir Mei 2007 lalu, Indofood salah satu anak perusahaannya mengumumkan bahwa asetnya sudah mencapai Rp 18,5 triliun.

Menurut *Trust*, kalau dilihat data BEJ, aktivitas bisnis para konglomerat itu sebenarnya hanya benar-benar mengalami kontraksi kurang dari dua tahun (1997-1998). Sebelum krisis yakni pada era 1992-1996, aset 30 konglomerat terbesar Indonesia mencapai 52% dari aset perekonomian nasional. Pada periode 1997-1998, mereka masih menguasai 38%. Setelah krisis, yakni periode 1999-2001, mereka ternyata malah menguasai 61%. Jadi keliru jika menyangka mereka sekarang telah kembali. Karena mereka sebenarnya tak pernah benar-benar pergi. ■ MS

Bersama Membangun Sektor Riil



Dalam sistem demokrasi, peran pemerintah, swasta, dan masyarakat sama pentingnya dalam pembangunan.

Selasa 29 Mei, *Indonesia Investor Forum 2* diadakan di Jakarta Convention Center. Saat membuka acara, Wapres mengatakan, pertumbuhan pasar modal yang terus terjadi selama ini harus mampu menggerakkan ekonomi rakyat. Acara itu menjadi menarik sebab yang dibicarakan adalah manfaat pasar modal dalam pembangunan sektor riil. Berbagai harian terbitan ibu kota pun mengulasnya dalam tajuk utama.

Menurut *Kompas* (2/6), pesan utama yang bisa dipetik dari penyelenggaraan *Indonesia Investor Forum 2* adalah bagaimana kita bisa bersama-sama membangun perekonomian bangsa. Disebutkan, potensi bangsa ini untuk bisa membangun sangatlah besar, bukan hanya sumber daya alam dan SDM, modal yang dibutuhkan untuk pembangunan itu juga tersedia banyak. Sektor perbankan memiliki likuiditas yang melimpah untuk menopang Bergeraknya sektor riil. Belum lagi dana dari pasar modal. Dengan nilai perdagangan di lantai Bursa Efek Jakarta yang mencapai Rp 3,5 triliun setiap hari, maka tersedia potensi sekitar Rp.1.000

triliun setiap tahun yang bisa dipakai untuk menggerakkan perekonomian.

Harian ini setuju dengan Wapres yang mengatakan, gairah di pasar modal tidak ada artinya apabila modal yang didapat di lantai bursa hanya disimpan di bank. Namun menurut harian ini, tentunya tidak mungkin juga hanya mengandalkan sektor swasta menjadi motor pembangunan. Mereka tidak mungkin dibiarkan jalan sendiri tanpa ada arah yang lebih jelas. Karena itu, pemerintah harus menetapkan dan memberikan arah besar pembangunan ekonomi yang jelas akan dituju, yang menjadi pegangan dari para pengusaha dalam melakukan investasi. Bahkan, pemerintah harus menopang juga dengan aturan yang menunjang sehingga kalangan dunia usaha semakin yakin dengan investasi yang akan dilakukan. Menurut harian ini, dalam sistem demokrasi, peran dari pemerintah, swasta, dan masyarakat sama pentingnya dalam pembangunan. Ketiga pilar itu harus saling menopang. Negara ini tidak akan pernah bisa bangkit dan mengatasi ketertinggalannya apabila ketiga pilar tidak mau saling bahu membahu mendorong pembangunan. Saran *Kompas*, kesadaran itu harus sama-sama dibangun.

Sebelumnya, harian *Investor Daily* (30/5) juga mengangkat topik yang sama dalam tajuknya. Menurut harian ini, yang ditangkap dari pembicaraan di acara itu adalah bahwa para pejabat itu ingin menjelaskan, bahwa persepsi publik yang menganggap kegalangan di pasar modal sama sekali tidak dirasakan sektor riil, tidak separah yang diduga. *Rally IHSG* di BEJ terus mencetak rekor baru yang merupakan refleksi dari kepercayaan para investor, tak sedikit dari laba yang diperoleh di BEJ itu yang diinvestasikan kembali untuk ekspansi usaha, pesatnya pembangunan properti dan gedung-gedung bertingkat di kota-kota besar, kredit perbankan juga bertumbuh kendati di bawah target, semuanya itu menurut para pejabat itu merupakan bukti telah Bergeraknya sektor riil.

Dari uraian di atas, ada polarisasi persepsi antara kubu pemerintah bersama BI yang mengklaim sektor riil telah bergerak, sementara sejumlah pengusaha, ekonom, dan kelompok masyarakat merasa sektor riil macet. Menurut *Investor Daily*, kesenjangan persepsi tersebut terjadi karena indikator-indikator positif yang diklaim pemerintah tidak linier dengan realitas yang terjadi di masyarakat, seperti hidup semakin sulit, kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, naiknya harga sejumlah bahan pokok, bangkrut-

nya industri padat karya, dan sebagainya.

Dalam konteks itu, harian ini mengharapkan pemerintah lebih menggairahkan sektor riil dan menggenjot investasi. Juga memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi sehingga kapasitas ekonomi dalam mengurangi kemiskinan dan menyerap tenaga kerja lebih baik. Pemerintah, termasuk pemerintah daerah juga perlu memperbaiki birokrasi pencairan anggaran sehingga APBN benar-benar mampu bertindak sebagai stimulus perekonomian.

Topik yang sama juga menjadi sorotan harian sore *Suara Pembaruan* (30/5). Disebutkan, di Indonesia, peran pasar modal dalam membiayai pembangunan masih kalah dibanding perbankan. Karena itu, menurut harian ini, pemerintah dan pelaku pasar modal harus mempunyai tekad mengembangkan pasar modal. Bila perlu harus melebihi peran perbankan. Karena kecenderungan di dunia juga seperti itu. Semakin maju ekonomi suatu negara, semakin besar pula peran pasar modal dalam membiayai pembangunan. Untuk tujuan itu, langkah pertama yang bisa dilakukan pemerintah adalah menarik investor baru sebanyak-banyaknya. Langkah berikutnya adalah dengan membuat produk yang lebih variatif, instrumen baru yang memberi keuntungan lebih tinggi dibanding perbankan. Dan yang tak kalah penting adalah, sosialisasi pentingnya peran pasar modal dalam membiayai pembangunan nasional.

Nada yang sama ditulis harian sore lainnya, *Sinar Harapan* (30/5). Menurut harian ini, bursa efek telah menjadi sebuah kantong ekonomi yang luar biasa. Kontribusinya terhadap perekonomian nasional sangat berarti karena besarnya kapitalisasi maupun nilai bentuk-bentuk transaksi lain di kalangan para pelaku. Boom perekonomian pada periode 1980-an antara lain juga disebabkan BEJ yang saat itu tengah mengalami zaman keemasan. BEJ memberi kontribusi karena perusahaan-perusahaan yang *listed* memanfaatkan dana yang diperoleh buat membayar utang dan mendirikan berbagai kegiatan bisnis. Upaya untuk meningkatkan kontribusi bursa terhadap sektor riil adalah dengan mendorong perusahaan-perusahaan untuk mencatatkan diri di bursa. Untuk itu, pemerintah, penyelenggara dan pengawas bursa bisa merangsang calon emiten dengan menyediakan berbagai insentif, antara lain seperti keringanan pajak atau menghadirkan perusahaan berkategori *blue chip*. ■ MS

Selamat Jalan Saha



foto-foto: berindo wilson

Berita Indonesia kehilangan seorang wartawan terbaik yang mendedikasikan waktu dan tenaga melebihi panggilan tugas dan tanggung jawabnya.

Sutan Henry Maruwasas Purba, SH, sebuah nama yang tidak mungkin akan kami lupakan. Saat *Berita Indonesia* memulai rapat redaksi perdananya Juni 2005, Maruwasas, begitu kami memanggilnya, sudah turut hadir dan memberi kontribusi meski dalam kapasitas sebagai penulis kontributor. Satu setengah tahun berselang, 2007, ia mulai mencurahkan perhatiannya dalam kegiatan penulisan dan peliputan berita. Bahkan dua bulan terakhir ini, ia terjun secara penuh memutar roda redaksional sebagai Koordinator Liputan. Komitmennya untuk memberi diri secara penuh di *Berita Indonesia* ibarat lilin di tengah kegelapan. Rapat redaksi setiap Senin menjadi semakin hidup dengan kehadi-

rannya. Suasana kerja di kantor yang sebelumnya sarat dengan rutinitas yang menjemukan menjadi lebih bersemangat dan berwarna. Bila pembaca *Berita Indonesia* memperhatikan, inisial 'MH' sering menutup setiap tulisan-tulisan di *Berita Utama* dan *Berita Ekonomi* yang dipegangnya.

Kami mengenalnya sebagai sosok jurnalis yang idealis dan berintegritas. Selama bekerja, lajang kelahiran Matiti, Dolok Sanggul, 7 April 1968 ini tidak pernah mau menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadinya. Ia tidak pernah mau menerima uang makan harian dan transport setiap kali pergi meliput. Sikap yang diambilnya ini kami pahami sebagai isyarat bahwa ia bekerja bukan karena diberi uang makan atau uang transport melainkan karena tanggung jawab yang penuh atas tugas-tugasnya. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab terhadap apa yang di mulainya, sangat perhatian terhadap keluarga dan suka memberi dorongan kepada teman-temannya.

Salah satu nilai tambah terbesarnya adalah totalitasnya untuk memikirkan semua aspek manajerial di *Berita Indonesia* baik dari segi redaksional hingga efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Ia ingin *Berita Indonesia* menjadi sebuah majalah berita yang bermutu, mempunyai kekuatan penulisan yang berbeda dengan majalah lainnya serta disokong oleh penyajian berita yang eksklusif hasil peliputan di lapangan. Ia juga ingin menggerakkan raksasa-raksasa tidur di dalam struktur sidang redaksi, yang

bila dibangun, akan menjadi sebuah kekuatan besar yang bisa membawa perubahan yang cukup berarti bagi bangsa ini. Baginya, semua tulisan harus memberi arti dan nilai tambah bagi setiap pembaca.

Semasa hidupnya, pria yang rajin menyambangi para narasumber untuk diwawancarai ini, benar-benar mencurahkan hidupnya di dunia jurnalistik. Ia memegang kuat etika profesi dan berani berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Bila perlu, ia siap berdebat mempertahankan pendapatnya. Semuanya itu sudah ia pupuk ketika ia masih menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan. Semasa kuliah, ia mulai menyadari bahwa ia terpenggil sebagai wartawan. Saat itu, untuk menambah uang saku dan menutupi biaya hidup sehari-hari, ia rajin mengirimkan tulisannya ke beberapa media di Medan, seperti *Harian Analisa* dan *Harian Waspada*. Demi menggapai harapan yang lebih besar dan hidup yang lebih baik, ia hijrah ke Jakarta menjadi wartawan di *Majalah Tugas*. Sebelum bergabung secara penuh dengan *Berita Indonesia* ia aktif menjadi wartawan di *Majalah Berita* dari Slipi terbitan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Semua yang sudah dilakukannya dan semua yang akan dilakukannya di *Berita Indonesia* menyentuh sanubari kami masing-masing. Itulah sebabnya, saat kami mendengar kabar kematiannya yang mendedak, dunia seakan runtuh. Kami semua tidak percaya, ia pergi begitu saja tanpa ada tanda-



Sahabat Kami

tanda dan pesan apapun. Kamis malam itu (31/5), sepulang dari tugas peliputan sejak siang hingga sore, ia masih sibuk mengumpulkan bahan-bahan dari koran di rumah kontrakannya di Pondok Gede. Namun, saat itu, sesuatu sedang terjadi di dalam tubuhnya. Malam itu, ia muntah darah lalu bergegas menelepon keluarganya yang tinggal tidak jauh dari situ. Ia pun segera dibawa ke Rumah Sakit Asrama Haji Pondok Gede untuk ditangani oleh dokter. Namun malang, menjelang 1 Juni dini hari, ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jasadnya kemudian dikebumikan di Dolok Sanggul, Humbahas, 2 Juni.

Kami tidak menyangka ia akan pergi secepat itu. Kami tidak pernah mendengar ia mengeluh menderita suatu penyakit. Masa-masa tenggat pekerjaan yang sering membuat begadang ia lakoni dengan enjoy. Bahkan, selama seminggu terakhir di akhir bulan Mei, ia masih bekerja dengan seluruh semangat dan totalitasnya. Senin dan Selasa ia mengantar surat wawancara, mewawancarai sejumlah narasumber dan menulis berita. Rabu malam (30/5), ia mewawancarai mantan Ketua Umum PGI, Natan Setiabudi di sebuah *foodcourt* di Mall Taman Anggrek. Kamis, ia masih menemui sejumlah narasumber dan menulis berita. Namun, Jumat dinihari, ia pergi begitu saja membuat kami sedih dan syok tak terkatakan.

Menurut visum dokter, ia meninggal karena penyakit paru-paru kronis yang berimplikasi ke saluran darah di jantung. Kemungkinan besar di-

sebabkan oleh gaya hidupnya yang tidak sehat – perokok berat dan *workaholic* (pecandu kerja). Untuk urusan rokok, dia memang sulit melepaskannya. Sedangkan untuk urusan *workaholic*, juga sudah menjadi gaya hidupnya yang tidak ingin membuang waktu sia-sia dan harus mengisinya dengan sesuatu yang berguna. Ia rela bekerja siang dan malam demi menjemput sejumlah impian yang sudah lama ia harapkan. Salah satunya menerbitkan sebuah buku. Di meja kerjanya terdapat setumpuk kertas ratuan halaman yang sudah ia susun menjadi *outline* (contoh buku). Buku itu merangkum hasil kajian ilmiahnya di 25 kabupaten kota di Sumatera Utara dengan menyoroti peluang dan tantangan Sumatera Utara di era globalisasi. Masih dalam tumpukan yang sama, terdapat selebar surat tertanggal 11 Mei 2007 yang meminta kesediaan Bapak Syamsul Arifin SE, Bupati Langkat menerbitkan buku itu sebagai pelengkap visi dan misi Bupati sebagai calon gubernur di Sumatera Utara periode 2008-2013.

Berita Indonesia benar-benar kehilangan seorang sahabat sekaligus wartawan tulen yang idealis, sarat gagasan, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan dan tugas yang diberikan kepadanya. Ia memberi diri melebihi tuntutan tanggungjawab pekerjaannya.

Selamat jalan sahabat dan saudara kami, Maruasas Henry Purba. Kami semua tidak akan pernah melupakanmu...

Sidang Redaksi Majalah Berita Indonesia, 1 Juni 2007. ■

Innalillahi wa inna ilaihi raji'un

Telah berpulang ke rahmatullah

H. Yusuf Landa

(Tutup usia 75 tahun)

Ayahanda H. Syahbuddin Hamzah

Pada hari Selasa, 29 Mei 2007,
di Desa Tenga, Bima, Nusa Tenggara Barat

*Semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah SWT,
dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran.*
dari:

Pimpinan, staf dan karyawan
Majalah

BERITA INDONESIA

Innalillahi wa inna ilaihi raji'un

Telah berpulang ke rahmatullah

Sukainah Binti Basri Husien

(Tutup usia 59 tahun)

Ibunda Prana Citra

(Koresponden Majalah *Berita Indonesia*)

Pada hari Senin, 14 Mei 2007, pukul 05.30
di Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Propinsi Bangka Belitung

*Semoga arwah almarhumah diterima di sisi Allah SWT,
dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran.*
dari:

Pimpinan, staf dan karyawan
Majalah

BERITA INDONESIA



Ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani (10/5) mengatakan keadaan sekarang mirip dengan kondisi Asia sebelum tahun 1997, banyak orang yang menanggapi sebagai pernyataan yang mengejutkan. Padahal faktanya, pernyataan itu hanya sebuah pembenaran pendapat para pakar dan banyak pembahasan di media massa.

Wacana yang acapkali dikemas Majalah *Berita Indonesia* yang mengarah pada perlunya pemerintah memberi perhatian khusus terhadap *bubble economy* (ekonomi busa). Majalah ini sekaligus mengingatkan perlunya sikap hati-hati dari pemerintah di dalam mengelola kebijakan moneter, sehingga aliran investasi portofolio tidak sampai menimbulkan fenomena ekonomi busa.

Pernyataan Sri Mulyani bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi merupakan saripati dari hasil pembahasan para menteri keuangan Asia di Tokyo, beberapa hari sebelumnya. Ironis, bilamana pemerintah menyalahkan Sri Mulyani sembari meyakinkan fundamental ekonomi Indonesia sekarang cukup kuat dibandingkan tahun 1997.

Asumsi pemerintah yang menyebutkan fundamental ekonomi Indonesia kuat masih perlu diperdebatkan. Yang jelas, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat rendah karena hanya didorong oleh konsumsi. Ekspor yang terkesan tinggi, hanya dilihat dari nilai yang tinggi akibat naiknya harga sejumlah komoditi. Sedangkan volumenya masih rendah, sehingga belum cukup signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menggunung karena sektor riil tidak bergerak. Dan jumlah penduduk miskin cukup tinggi, karena sulitnya memperoleh lapangan kerja dan menaikkan pendapatan.

Sebenarnya, yang paling mirip dengan keadaan tahun 1997 adalah penyangkalan pemerintah terhadap keadaan yang sesungguhnya. Dulu, pejabat-pejabat pemerintahan selalu bersikukuh menyatakan fundamental ekonomi Indonesia kuat, karena tingkat pertumbuhannya yang sangat tinggi, yaitu 8,2% pada Produk Domestik Bruto (PDB). Faktanya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berarti apa-apa lantaran risiko keuangan yang tercipta dari utang luar negeri yang



Pemicu krisis financial yang paling dahsyat sangat mungkin datang dari Bursa Efek Jakarta.

Nikmat Memba

sangat besar. Tak pelak lagi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi terjun bebas hingga minus 14%. Dan yang lebih tragis, setelah 10 tahun, perekonomian Indonesia belum juga bangkit kembali.

Drama Krisis 1997

Pemicu krisis tahun 1997 dan sekarang ini kemungkinan besar tidak sama. Tetapi muaranya mengerucut ke arah krisis finansial; goncangan nilai tukar dan kelangkaan permodalan. Krisis tahun 1997 merupakan efek domino yang ditimbulkan kejatuhan bursa saham Thailand, yang kemudian merembet ke Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Indonesia, hingga seluruh Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Hulu dari semua itu adalah fundamental perekonomian yang rapuh di tengah-tengah tingginya tingkat korupsi di negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara.

Dengan kredibilitas yang rendah, goncangan kecil sekali pun dapat memicu ketidakpercayaan investor, sehingga mereka membawa kembali modalnya keluar dari seluruh instrumen investasi portofolio yang ada. Pelarian modal ini merupakan satu langkah awal memasuki krisis finansial, karena memicu ledakan permintaan dolar AS sehingga menekan nilai rupiah. Sebab, seluruh investasi yang masuk ke

Indonesia dirupiahkan, kemudian didolarkan kembali ketika dibawa pulang oleh para investor asing.

Ketika terjadi lonjakan permintaan dolar AS untuk membayar utang luar negeri, baik utang pemerintah maupun swasta yang sudah jatuh tempo, maka nilai rupiah pun otomatis anjlok. Kurs rupiah terhadap dolar yang tadinya hanya berkisar 2.300 sampai 2.500, terjun bebas ke angka Rp 16 ribu, dalam Januari dan Februari 1998.

Dampak lanjutannya, semua harga-harga terkoreksi. Harga-harga komoditi barang manufaktur yang memiliki komponen luar negeri (diimpor dengan satuan harga dolar AS), melambung setara dengan apresiasi nilai dolar AS. Di satu sisi, kondisi ini menekan daya beli, dan di sisi lain, menekan kinerja sektor industri.

Lesunya sektor industri tidak hanya disebabkan oleh rendahnya daya beli, tetapi juga melambungnya harga-harga bahan baku impor akibat apresiasi nilai dolar AS. Soalnya, kinerja perindustrian sangat tergantung pada komponen impor, sehingga kenaikan harga bahan baku dan bahan baku penolong, sangat memengaruhi kinerja sektor industri. Namun demikian, kenaikan harga baru pukulan pertama.

Pukulan berikutnya, dan yang paling dahsyat, hilangnya kepercayaan perban-

kan dunia internasional terhadap prospek perekonomian Indonesia. Hampir seluruh *letter of credit* (L/C) yang diterbitkan bank-bank lokal tidak diterima oleh bank-bank di negara-negara tujuan impor atau ekspor. Walhasil, pelaku industri harus mengimpor bahan bakunya dengan uang tunai, sementara dolar di dalam negeri sedang langka.

Akibat gempuran daya beli yang melemah dan langka serta mahalannya bahan baku, sektor industri mati suri. Banyak di antara pelaku industri yang bankrut total. Sedangkan yang masih bisa bertahan hanya mampu mengoperasikan industrinya dengan kapasitas terbatas. Konsekuensinya, hilangnya lapangan kerja dan pendapatan negara dari ekspor. Kehilangan pendapatan masyarakat memicu peningkatan angka kemiskinan.

Membawa Sengsara

Yang menjadi pertanyaan, apakah drama krisis yang menimpa perekonomian Indonesia tahun 1997, sebagaimana yang diprediksi ekonom Tim Indonesia Bangkit (TIB), terulang kembali tahun

lihan finansial yang sangat labil.

Peringatan tentang ancaman krisis di berbagai media massa, sudah mendapat pembahasan sejak beberapa bulan terakhir. Persisnya, sejak aliran modal asing memasuki investasi portofolio Indonesia secara besar-besaran (*massive*). Media massa sudah memberi peringatan bahwa serbuan modal asing ke berbagai investasi portofolio hanya menciptakan gelembung ekonomi. Balon atau gelembung ekonomi bisa sewaktu-waktu mengempis atau bahkan meledak seketika di saat terjadinya arus deras modal keluar (*capital outflow*). Keadaan ini mendorong timbulnya krisis moneter yang berdampak pada krisis ekonomi yang lebih besar.

Pemicu krisis, bisa muncul dari titik mana saja di sektor finansial. Dari bursa efek, pasar obligasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan pasar Valas. Namun di antara seluruh bentuk investasi portofolio yang ada, pemicu krisis finansial yang paling dahsot sangat mungkin datang dari Bursa Efek Jakarta (BEJ).

Lebih dari 60% perdagangan saham di BEJ saat ini dilakukan oleh investor asing.

hati di dalam mengelola kebijakan moneter, sehingga aliran investasi portofolio tidak sampai menimbulkan fenomena gelembung ekonomi.

Keuntungan Sementara

Fenomena aliran modal portofolio global, yang bergerak menuju Asia dari segenap penjuru dunia, semata-mata karena pasar portofolio di Asia, kecuali Jepang, masih *favourable* (menguntungkan) ketimbang kawasan-kawasan lain seperti Amerika dan Uni Eropa serta Jepang. Ketiga raksasa dunia tersebut sedang mengalami stagnasi ekonomi, sehingga tidak mudah bagi para pemain di lantai bursa mengambil banyak keuntungan dari pergerakan saham.

Tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (*The Fed-Federal Reserve*), misalnya, yang hanya 5,5% tidak akan memberikan keuntungan apa-apa bagi para investor jika suku bunga deposito di perbankan AS sudah mencapai 5%. Demikian juga dengan Jepang, walau pun sudah melepaskan diri dari kebijakan tingkat suku bunga 0% sejak awal tahun, namun para investor global belum melihat adanya keuntungan yang bisa diraih dari tingkat suku bunga *Bank of Japan* (BoJ-Bank Sentral Jepang).

Hal sangat berbeda mereka temukan di Indonesia. Sebab dengan tingkat suku bunga obligasi, baik obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah (SUN) maupun perusahaan swasta (obligasi korporasi), sekitar 8,75 sampai 8%, memberi keuntungan yang cukup besar dibandingkan dengan suku bunga deposito hanya 6,75%. Dengan menggunakan dana asuransi dan dana pensiun yang disimpan di bank sekalipun, para investor masih dapat meraih keuntungan sebesar 2-2,25%.

Di sisi lain, para investor global berharap memanfaatkan momentum kinerja moneter di negara-negara kawasan Asia yang tengah melakukan konsolidasi. Negara-negara di kawasan Asia yang baru saja melepaskan diri dari efek krisis moneter tahun 1997, mulai mencoba memperkuat makro ekonominya, dengan menekan laju inflasi, menaikkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat nilai tukar mata uang mereka.

Hampir semua negara di kawasan Asia menggunakan instrumen suku bunga tinggi untuk menarik investor asing. Maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang berpotensi terjebak dalam ancaman krisis moneter, tetapi juga negara-negara lain di kawasan Asia. Hal ini memperlemah sistem pertahanan keuangan masing-masing negara mereka. Karenanya, kawasan Asia sangat rentan terhadap efek beruntun yang ditimbulkan oleh fenomena larinya modal asing. ■ MH

awa Sengsara

2008? Tentu itu bukan hal yang tidak mungkin. Bahkan, fenomena krisis keuangan di berbagai negara selalu meniru konfigurasi tsunami, di mana tepian pantai tampak semakin luas, namun tiba-tiba air laut menjangkau berkilo-kilometer ke daratan.

Dalam fatamorgana, memang terlihat aliran modal dalam jumlah yang sangat besar, sepertinya mendorong perekonomian melaju dengan kecepatan tinggi, menghapus kemiskinan dengan menciptakan banyak lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Kenyataannya aliran investasi itu hanyalah pemburu rente (*yield*) atau bunga uang yang tidak mungkin mendorong penyediaan lapangan kerja baru. Bahkan, bila berpikir sedikit lebih kritis, aliran investasi portofolio justru bisa memperburuk kinerja perekonomian, bila sewaktu-waktu serentak berbalik arah, keluar dari Indonesia (*capital outflow*).

Bersamaan dengan itu fenomena gelembung ekonomi muncul jadi kenyataan aktual dengan seluruhkses-kses yang ditimbulkannya. Fenomena seperti ini mirip dengan premis "Nikmat Membawa Sengsara". Arus investasi asing ke instrumen-instrumen portofolio Indonesia telah menggiring opini pemulihan ekonomi, namun sebenarnya hanya pemu-

Maka, ketika investasi itu keluar, dengan sendirinya membuat bursa rontok. Harga-harga saham akan terkoreksi tajam, bahkan menjadi tidak berharga karena seluruh investor akan berlomba menjual sahamnya, namun pada saat yang bersamaan tidak ada yang berminat membeli.

Yang perlu disadari, ketika investor asing keluar dari bursa, para manajer keuangan yang mengorganisir investor lokal pun cenderung mengikuti fenomena *capital outflow* dan mencari bentuk-bentuk investasi yang paling menguntungkan, termasuk investasi portofolio di luar negeri. Akibat keluarnya investor lokal dari BEJ bisa memberi pukulan yang semakin berat bagi pasar uang di Indonesia.

Tidak hanya itu. Jika instrumen portofolio saham melemah, maka dengan sendirinya akan diikuti oleh melemahnya instrumen-instrumen portofolio lainnya, seperti pasar obligasi, dan pasar uang. Potensi ancaman yang bakal muncul dari aliran investasi portofolio, sepertinya mengingatkan kembali pada keadaan yang sama sebelum krisis moneter yang bermula pertengahan tahun 1997.

Berita Indonesia sudah berulang kali mewacanakan perlunya pemerintah memberi perhatian khusus terhadap gelembung ekonomi. Juga mengingatkan agar pemerintah mengambil sikap hati-



BAGIAN SATU

PENGANTAR:
Menyongsong hari ulang tahun (milad) Sewindu Al-Zaytun, 27 Agustus 1999 - 27 Agustus 2007, kami menyajikan kilas balik kiprah dan persembahan emas Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian, ini dalam memaknai perjalanan kehidupan bangsa ini di tengah bergulirnya arus reformasi, terutama dalam hal pencerdasan kehidupan bangsa, kemandirian bangsa, demokrasi, toleransi dan perdamaian. Dalam delapan tahun kehadiran lembaga pendidikan terpadu ini, di bawah pimpinan Syaykh Dr Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, telah mengukir karya dan persembahan yang membangkitkan semangat Indonesia yang kuat. Tulisan ini kami sajikan dalam tujuh seri mulai Edisi 40 sampai Edisi 46.

Penulis

M E N Y O N G S O N G

SEWINDU AL-ZAYTUN

Kami awali dengan pemaparan sejarah Al-Zaytun, lembaga pendidikan sistem satu pipa yang dikelola Yayasan Pesantren Indonesia (YPI). Sekilas sejarah, yang antara lain memaparkan visi dan misi serta keyakinan kuat Syaykh Abdussalam Panji Gumilang untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan terpadu di atas lahan ribuan hektar dan jauh dari keramaian kota, yang semula dianggap banyak orang hanya sebuah mimpi yang tidak mungkin diwujudkan. Kehadirannya juga penuh kontroversi. Tapi, karya nyata Al-Zaytun selama sewindu, telah menjadi jawaban nyata.

Tanggal 27 Agustus 1999, mempunyai makna sejarah yang amat berarti bagi Al-Zaytun. Sebab pada hari itu, Presiden Republik Indonesia ke-3 Prof Dr BJ Habibie meresmikan berdirinya lembaga pendidikan terpadu ini dalam suatu upacara peresmian. Ketika itu, Presiden BJ Habibie mengabadikan peresmian dan pembukaan pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian ini, sebagai lembaga pendidikan formal (*pesantren spirit but modern system*), dengan menandatangani Prasasti Resmi dengan ucapan Basmalah.

Kesediaan kepala negara secara langsung dan resmi menandatangani prasasti peresmian kampus ini adalah tidak berlebihan bila disebut bermakna sebagai manifestasi sambutan, dukungan, dan rasa memiliki (*sense of belonging*) bangsa Indonesia atas lahirnya lembaga pendidikan (pesantren) komprehensif ini. Maka patutlah tanggal dan bulan ini - 27 Agustus - ditetapkan sebagai hari lahir kampus Al-Zaytun.



Sebagaimana mestinya, sesuai perjalanan (siklus) hari, bulan, dan tahun, setiap tanggal 27 Agustus tiba, bertambahlah usia lembaga ini satu tahun. Setiap tahun tiba, tanggal dan bulan kelahiran ini, pastilah segenap civitas menyambut dengan rasa syukur kepada Allah swt dan sekaligus berterima kasih kepada berbagai pihak

SEKILAS SEJARAH AL-ZAYTUN

yang memberi dukungan demi kelangsungan kampus ini dalam mengemban misi mulianya.

Setiap 27 Agustus bagi Al-Zaytun merupakan sebuah halte untuk melanjutkan perjalanan menuju hari esok yang lebih baik. Sebagaimana sebuah sabda Nabi Muhammad saw, kita akan menjadi orang yang merugi jika hari ini lebih buruk dari hari kemarin atau jika hari esok tak lebih baik dari hari ini. Setiap tiba pada 27 Agustus perenungan itu mengemuka.

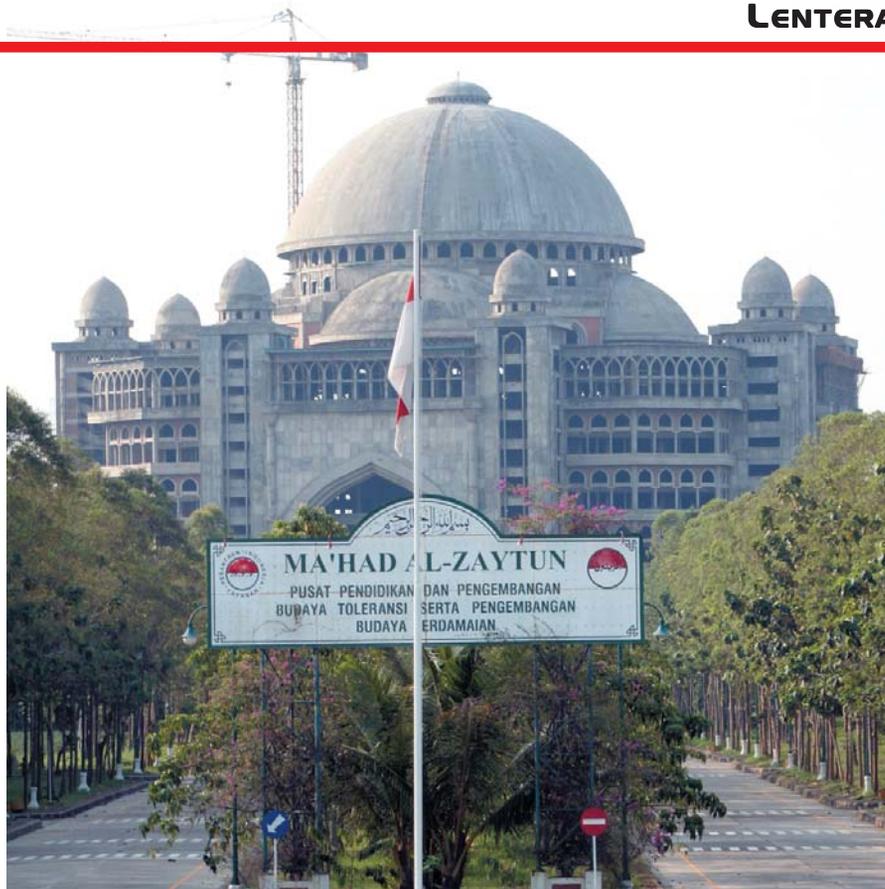
Terlebih pada 27 Agustus 2007 ini, menjadi lebih istimewa, sebab Al-Zaytun genap berusia satu windu (delapan tahun). Sewindu Al-Zaytun telah memberi persembahan emas bagi bangsa ini untuk menjemput masa depan Indonesia yang kuat, Indonesia yang cerdas, mandiri dan sejahtera, Indonesia yang mampu berperan besar dalam pergaulan dunia.

Perayaan sewindu Al-Zaytun, ini menjadi lebih istimewa dari tahun-tahun sebelumnya. Perayaan hari ulang tahun (milad) tahun ini, selain dimaknai sebagai ajang evaluasi, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, juga akan dimaknai dengan peresmian waduk Windu Kencana, sebagai persembahan emas.

Pada tahun-tahun sebelumnya pengasuh Al-Zaytun lebih memberi penekanan khusus pada setiap siklus tiga tahunan untuk memperingati miladnya. Siklus tiga tahun itu, menurut Syaykh Al-Zaytun, ditempuh karena laku lampah Al-Zaytun selama tiga tahun dipandang sudah bisa dijadikan landasan untuk menggenjot langkah tiga tahun ke depan. Menurutnyanya, hasil tiga tahun itu sudah *qurrata a'yun*. Itu artinya, milad bermakna juga sebagai ajang evaluasi. "Jika setahun sekali terlalu cepat, banyak program belum terlaksana sehingga khawatir banyak bicara, sedikit sekali kerja," jelas Syaykh Panji Gumilang.

Siklus tiga tahunan ini telah berjalan empat kali. Siklus pertama berlangsung antara tahun 1993-1996, siklus kedua tahun 1996-1999 dan siklus ketiga 1999-2002, siklus keempat 2002-2005. Siklus tiga tahun pertama 1993-1996, adalah sebagai titik awal dan persiapan yang ditandai adanya kesepakatan untuk mendirikan sebuah badan hukum yang dinamakan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) pada tanggal 1 Juni 1993, ketika itu bersamaan dengan Hari Raya Qurban 1413 H.

Kurun waktu tiga tahun pertama ini, YPI melakukan berbagai persiapan untuk mewujudkan impiannya yang termaktub di dalam program utamanya,



yakni ikut berperan serta mencerdaskan bangsa dengan menempuh jalan pendidikan dan ekonomi.

Kemudian, siklus tiga tahun kedua 1996-1999 adalah kurun waktu dimulainya proyek pembangunan fisik dan persiapan pengiriman agen-agen Ma'had Al-Zaytun (Kampus Al-Zaytun) berupa para koordinator mulai dilaksanakan. Sedangkan siklus tiga tahun ketiga 1999-2002 ditandai tahun pertama penerimaan santri dan pelaksanaan pembelajaran. Siklus tiga tahun keempat 2002-2005 dimaknai dengan tekad, visi dan misi membangun budaya sehat dan bersih menuju terwujudnya *science technology society* dan membentuk *Zone of Peace and Democracy*.

Jika dirunut dari sejak proses terwujudnya kesepakatan pendirian Yayasan Pesantren Indonesia, yang merupakan induk kampus ini, yakni tanggal 1 Juni 1993, maka pada tahun 2007 ini, kurun waktu persiapan, pertumbuhan dan perkembangan lembaga ini sudah memasuki tahun ke enambelas (dwi windu). Dalam kurun waktu dwi windu, selama enam tahun merupakan fase persiapan menuju kelahirannya secara resmi pada tanggal 27 Agustus 1999. Hal ini menandakan bahwa kelahiran Al-Zaytun sungguh diprogram secara matang.

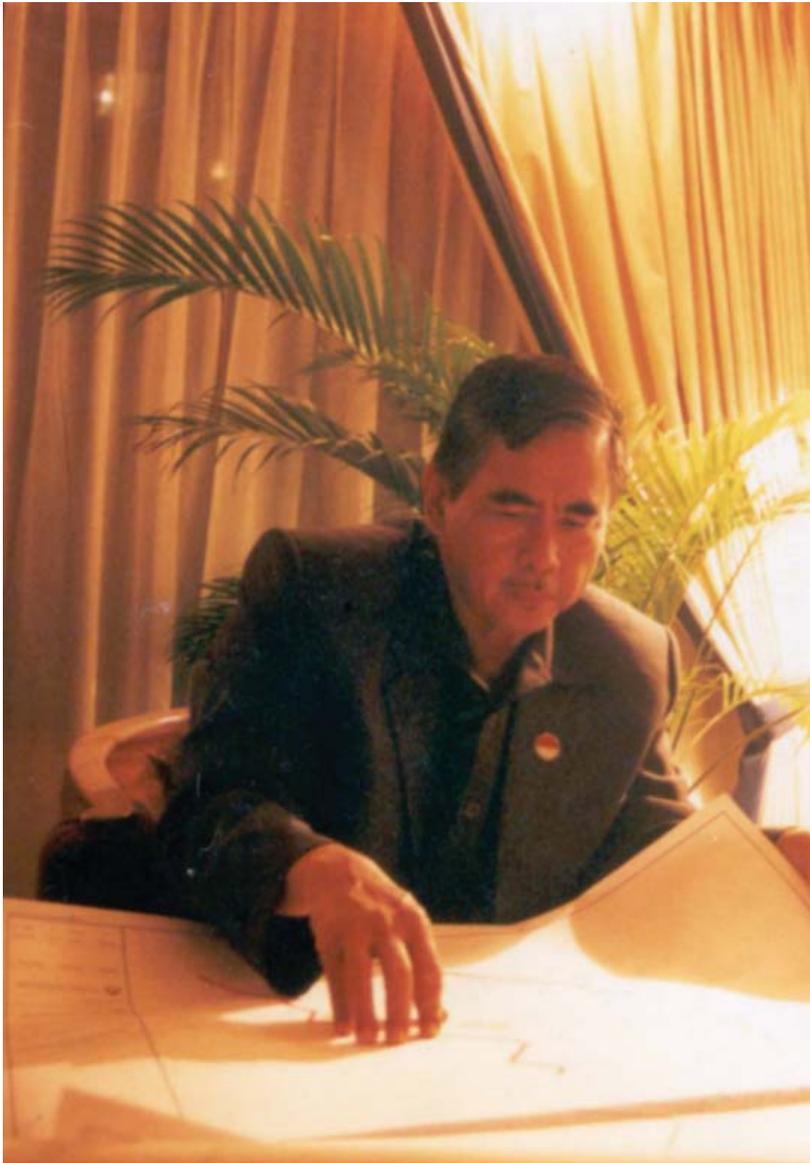
Belum lagi bila dirunut pada tahun-

tahun sebelumnya yang merupakan saat proses perenungan dan pemantapan ide-ide cemerlang tentang lembaga pendidikan terpadu ini. Bahkan periode perenungan ini mungkin saja merupakan masa paling signifikan dalam proses sejarah lahirnya lembaga ini. Sebuah mimpi dan ide besar yang bagi banyak orang dianggap mustahil, bahkan gila. Maka sangat mungkin periode perenungan inilah yang paling sulit untuk dilampaui.

Menyadari akan hal itu, penulisan sejarah Al-Zaytun, ini kami mulai dari proses perenungan itu. Kemudian dilanjutkan poses kesepakatan pendirian Yayasan Pesantren Indonesia, pencarian lokasi ke mana-mana dan ditemukannya tanah gersang, penamaan Ma'had Al-Zaytun, penataan lahan dan peletakan batu pertama, proses awal penerimaan santri dan awal pembelajaran serta upacara peresmian, serta proses pembangunan infrastruktur lainnya dan pengelolaan lahan.

Ketika Perenungan Panjang

Proses berdirinya lembaga pendidikan Al-Zaytun, diawali perenungan, mimpi dan cita-cita yang amat panjang. Bak pepatah kuno, Roma tak dibangun hanya sehari. Begitupun pesantren komprehensif dengan sarana dan prasarana serba spektakuler yang akan menjadi sebuah monumen abad 21 itu,



SYAYKH AL-ZAYTUN yakin, lembaga pendidikan yang diimpikannya kelak merupakan media, tempat atau wahana sebagai titik tolak untuk mengajak bangsa ini menjadi manusia yang intelektual, menguasai sains dan teknologi, mengimbangi kemajuan bangsa lain namun memiliki moral tinggi, berwawasan internasional dan kental dengan rasa kemanusiaan, toleransi dan perdamaian.

adalah buah hasil dari rentang proses perenungan dan perjuangan panjang dari seorang AS Panji Gumilang bersama sahabat-sahabatnya.

Perenungan dan perjuangan tentang betapa perlunya sebuah wadah pendidikan dalam membentuk kualitas manusia dengan menggali pengetahuan sekaligus berakhlakul karimah. Karena itu, sosok gemerlap dan kemegahan, hanyalah sebuah sampul buku. Masyarakat boleh terpesona dengan sampul indah dan kemasan menarik. Namun makna isi buku, adalah lebih mulia untuk disimak.

Cita-cita mulia dari Syaykh AS Panji Gumilang, dengan segala kemampuan yang ada, untuk menyambung dan membangun peradaban umat di dunia agar tak terputus, merupakan bagian tujuan dari lembaran sosok Al-Zaytun.

Mewujudkan sebuah angan, tak

semudah melangkahkan kaki. Waktu berjalan seperti memacu pula keinginan dirinya. Dua sisi yang mengusung pemikiran untuk perwujudan sebuah cita-cita besar.

Layakkah bagi dirinya untuk mengusung sebuah angan besar dan lalu merealisasikannya? Kelayakan sosok manusia menjadi absah manakala semua angan itu ibarat tunas pepohonan yang terus disiram, dipelihara dan dijaga untuk kemudian terus berpikir, merenung, bekerja dan melangkah dengan berbagai upaya.

Barangkali tak begitu perlu membandingkan dengan Thomas Alfa Edison yang bermimpi tentang lahirnya konsep energi yang tumbuh dari sistem pemanasan, sehingga harus mengerami telur ayam di masa kecilnya. Ini adalah sebuah angan-angan lain yang tak kalah mulia bagi kemaslahatan manusia dalam pembentukan mental spiritual dan intelektual untuk membangun umat yang beradab.

Ide yang sudah melambung dalam benaknya sejak masa muda. Sejak ia masih belajar di Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo, angannya untuk menjadi seorang guru dan membangun sebuah lembaga pendidikan sudah melambung. Angan dan mimpi itu berkembang sampai ketika ia kuliah dan menjadi dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta di Ciputat (kini menjadi Universitas Islam Negeri - UIN). Dia terus menelurkan inspirasi dan membagikannya kepada sahabat, bangsa dan semua umat di dunia. Bentuknya adalah pendidikan terpadu dan ini bukanlah sebuah angan yang melambung tanpa dasar.

Dia yakin, lembaga pendidikan yang diimpikannya kelak merupakan media, tempat atau wahana sebagai titik tolak untuk mengajak bangsa ini menjadi manusia yang intelektual, menguasai sains dan teknologi, mengimbangi kemajuan bangsa lain namun memiliki moral tinggi, berwawasan internasional dan kental dengan rasa kemanusiaan, toleransi dan perdamaian.

Ide yang dilatarbelakangi oleh perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan sejarah umat manusia di dunia. Abad lalu, abad 20 adalah abad yang perlu diiktibari karena terjadinya berbagai perang. Angannya menerawang, ke depan tidak boleh terjadi perang lagi di dunia ini seperti abad lalu. Begitu pula, setidaknya, Indonesia harus damai!

Diilhami hal itu, ide itu mengembang dan melahirkan solusi bahwa untuk menciptakan keseimbangan dunia yang

damai itu, minimal terjadi di Indonesia, Indonesia yang damai, hanya dengan keseimbangan intelektual.

Keseimbangan intelektual itu dapat diwujudkan dengan menciptakan pendidikan yang baik. Pendidikan yang bervisi pengembangan budaya toleransi dan budaya perdamaian. Pendidikan yang menyamai interdependensi dalam interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta interaksi dunia.

Menata angan, pemikiran, perenungan dalam mengarah ke perwujudannya, selama di IAIN Syarif Hidayatullah, ia mulai sering berkumpul dengan kawan-kawannya, dan mulai merencanakan mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bisa mewakili kebangkitan Indonesia.

Keinginan-keinginan itu semakin kuat. Sayang, dalam kurun waktu tertentu tak pernah kunjung terwujud. Tak mudah membentuk sebuah lembaga, apalagi lembaga pendidikan yang berorientasi panjang dan mengarah pada pemikiran menggglobal. Namun dia tak pernah menyerah. Dia terus bermimpi, bergerak dan berkarya.

Dalam upayanya itu, ia membuat beberapa rancangan. Rancangan dalam bentuk gambar dan lain sebagainya serta tentu saja konsep sebuah lembaga pendidikan yang diimpikan. Berpikir, bagaimana dapat merealisasikan konsep tersebut yang kemudian diperlihatkan dan disosialisasikan kepada kawan-kawannya.

Seperti yang diperkirakan, pada awalnya kawan-kawannya tidak begitu mudah percaya, bahkan menganggap idenya itu suatu hal yang tidak masuk akal.

"Ah...kamu ini gila, bagaimana kita bisa membuat seperti ini," begitulah sambutan sebagian kawannya ketika itu.

Namun dia bergeming. Dia tetap yakin dengan konsepnya. Dia pun mantap menjawab. "Oh...semuanya bisa kalau kita buat. Kalau nggak kita buat, memang nggak bisa," katanya meyakinkan.

"Kapan?" tanya kawannya itu lagi.

"Jangan tanya kapan, tapi mau apa tidak?" jawabnya lagi pada kawannya. Ternyata kesabaran dan upayanya meyakinkan kawan-kawannya itu berhasil juga. Akhirnya, mereka mau bergabung.

Kesepakatan dan dukungan sahabat, merupakan modal yang amat besar bagi dirinya. Inilah sebuah penanaman motivasi yang mendorong gerak roda angannya mulai melaju. AS Panji Gumilang tak lagi merasa sendiri. Konsep 'kekitaan'nya pun mulai

tersentuh dengan musyawarah yang kerap dilakukan untuk memulai langkah rencana besar tersebut.

Mengawali perjalanan, sekali lagi harus melalui pemikiran dan perencanaan yang matang. Meski konsep secara tertulis atau tertuang dalam lembaran kertas *master plan*, belumlah merupakan sebuah kesempurnaan manakala belum melihat sebuah perbandingan lain.

Perjalanan pun dilakukan. Dia melangkah masuk ke dalam berbagai lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri. Melakukan studi banding dan mengamati setiap lembaga yang dikunjunginya. Ia pun banyak berjalan dan belajar. Saat dia ke Eropa, Australia, New Zealand, Timur Tengah dan berbagai negeri, bukan untuk *shopping*,



tapi selalu melangkah mengunjungi pendidikan yang baik. Belajar membaca apa yang ada di dunia ini, melihat mana kelebihan dan kekurangannya.

Kesimpulan pemikiran sejak pertama, lokasi pendidikan haruslah dapat mengekspos segala kegiatan umat manusia, baik segi ekonomi, energi, *environment* dan lainnya. Karena itu, tempat berdirinya lembaga pendidikan yang diimpikannya itu harus memiliki luas tanah yang cukup.

Maka, setelah ada kesepahaman, visi dan misi yang sama dengan sahabat-sahabatnya, kesepakatan pendirian sebuah lembaga pun disepakati.

YPI (Yayasan Pesantren Indonesia)

Kesendirian berpikir dan berjuang telah menjadi kebersamaan dan kekitaan. Berpikir dengan banyak kepala pastilah lebih baik dari pada hanya satu

kepala. Melihat dengan banyak pasang mata pastilah lebih jeli dari pada hanya sepasang mata. Melangkah dengan banyak kaki pastilah akan menapak lebih jauh dan lebih luas daripada dengan hanya sepasang kaki. Bekerja dengan banyak pasang tangan pasti pula lebih ringan dari pada hanya dengan sepasang tangan. *Team work!*

Bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha 10 Dzu Al-Hijjah 1413 H, pada tanggal 1 Juni 1993, sebagian kecil dari umat Islam Indonesia, AS Panji Gumilang dengan para sahabatnya, bersepakat untuk mendirikan sebuah badan hukum yang dinamakan dengan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI). Kemudian, kesepakatan ini secara resmi dituangkan dalam Akta Pendirian Yayasan Pesantren Indonesia tertanggal 25 Januari 1994 No. 61 oleh notaris Ny. Ii Rokayah Sulaeman, SH, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 28-01-1994, dengan pertama kalinya ber Kantor sekretariat di Kabupaten Subang.

Kemudian pada tanggal 17-05-1995 didirikan cabang YPI di Kabupaten Indramayu dengan nomor akte 34 oleh notaris yang sama, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 22-05-1995, beralamat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Para pendiri yayasan ini adalah umat Islam yang bersatu keyakinan membangun suatu lembaga dan wahana untuk membangun pendidikan umat dan bangsa yang kuat. Mereka bersepakat membangun sesuatu yang hasanah dalam arti kata dan makna yang seluas-luasnya, yang mereka tuangkan dalam program utamanya: Ikut berperan serta mencerdaskan bangsa dengan menempuh jalan pendidikan dan ekonomi. Konsep dasarnya adalah menjadikan pendidikan sebagai gula dan ekonomi sebagai semutnya.

Jadi secara legal formal YPI adalah pemilik kampus ini. Namun lebih dari pada legal formal itu, dalam buku *Mengenal Al-Zaytun* disebutkan bahwa kampus ini adalah milik umat. Timbul dari umat dan untuk umat bangsa Indonesia. Artinya, Al-Zaytun ada di mana-mana dalam kalangan umat dan bangsa seluruhnya. Pendirinya adalah umat Islam yang bergabung dalam Yayasan Pesantren Indonesia. Begitu pula perihal pendanaan pembangunannya diperoleh dari umat Islam bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain secara sukarela. Jadi Al-Zaytun merupakan hadiah dari umat

Mereka berkeyakinan bahwa untuk menjalankan program pendidikan, harus ditopang oleh kekuatan ekonomi yang memadai, sehingga perjalanannya akan mapan dan terus berkembang maju, yang dapat terus berinovasi menyelaraskan diri dengan segala kemajuan yang terus bergerak dengan cepat. Maka diperlukan lahan yang cukup luas sebagai wadah pewujudan program pendidikan yang terpadu dengan kekuatan ekonomi itu.

Islam Indonesia yang diperuntukan bagi umat seluruh dunia, khususnya bangsa Indonesia.

Kemudian untuk mencapai maksud dan tujuan (program utama) itu Yayasan melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan/atau yang diizinkan oleh yang berwajib/berwenang. Antara lain mendirikan pendidikan-pendidikan dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Mereka berkeyakinan bahwa untuk menjalankan program pendidikan, harus ditopang oleh kekuatan ekonomi yang memadai, sehingga perjalanannya akan mapan dan terus berkembang maju, yang dapat terus berinovasi menyelaraskan diri dengan segala kemajuan yang terus bergerak dengan cepat. Maka diperlukan lahan yang cukup luas sebagai wadah pewujudan program pendidikan yang terpadu dengan kekuatan ekonomi itu.

Menemukan Tanah Gersang

Perenungan panjang dan pencetusan ide telah menjadi kesepakatan dan kesepakatan, menjadi visi dan misi bersama, untuk membangun pendidikan terpadu berskala global demi kebangkitan bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam. Kini langkah sudah menjadi gerakan dan tanggung jawab bersama. Pencarian lahan, yang dipersyaratkan ribuan hektar, makin diintensifkan. Syaykh AS Panji Gumilang dan para sahabat melangkah bersama ke pelbagai penjuru negeri, Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Sayang, *qadla* Allah belum mengizinkan.

Suatu ketika langkah tim menemukan lahan di bilangan Cikampek, Purwakarta. Luasnya belum ribuan hektar. Namun tim survei yang langsung dipimpin Syaykh Panji Gumilang melakukan kesepakatan dengan 'camat' (calo maton), istilah bagi perantara jual beli tanah, untuk melakukan pembebasan lahan. Tapi, rupanya lagi-lagi *qadla* Allah belum tiba waktunya. Pada detik-detik terakhir, 'camat' itu menggelembungkan harganya. Kemudian memberikan lahan tersebut kepada peminat lain yang berani membayar lebih tinggi.

Namun hal itu tidak menyurutkan semangat dan langkah. Itu hanya sebuah tantangan kecil dibandingkan dengan misi mulia yang mereka usung. Apalagi mereka tidak merasa sendirian: Ada Allah yang menuntun setiap gerak langkah mereka.

Benar saja, pada suatu hari, tahun 1994, Syaykh AS Panji Gumilang dan para sahabat melangkah kaki ke



Haurgeulis (HG), Indramayu. Mereka bergerak ke arah Timur hingga sampai di persimpangan HG. Dituntun oleh kekuatan Ilahi, mobil jeep yang mereka kendarai memasuki pintu gerbang Desa Gantar. Nama yang mirip dengan Desa Gontor di Ponorogo, tempat berdirinya Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Kemiripan nama ini membuat Syaykh AS Panji Gumilang (sebagai alumni Gontor) lebih tertarik.

Mereka singgah di sebuah warung di Desa Gantar (kini telah dimekarkan menjadi Desa Sandrem), beberapa kilometer di pinggir kota kecamatan Haurgeulis. Di sinilah, mereka bertemu dengan warga setempat yang akhirnya menunjukkan ratusan hektar lahan gersang yang kabarnya siap dijual oleh pemiliknya.

Bermula, seseorang bertanya: "Apakah bapak-bapak mencari tanah?" "Tidak, tidak...!" jawab Syaykh Panji Gumilang, masih trauma ulah 'camat' di Cikampek.

Tapi seseorang yang bertanya itu tampak tak percaya. Ia malah



melanjutkan pembicaraan: “Di ujung sana, ada tanah jelek.”

Mendengar kata tanah jelek itu, Syaykh Panji Gumilang menanggapi dengan lebih tertarik. “Tanah jelek bagaimana?” tanggap Syaykh.

“Iya jelek, gersang, tidak tumbuh apa-apa selain ilalang!” jelas orang itu.

“Berapa luas,” tanya Syaykh, makin tertarik, tetapi masih dengan mimik menyembunyikan ketertarikannya.

“Bapak perlu berapa luas?” orang itu balik bertanya.

“Iya seberapa aja,” jawab Syaykh masih menyembunyikan kebutuhannya.

“Duaratus hektar, ada!” kata orang itu.

“Kalau butuh ribuan hektar juga ada di situ,” celetuk seseorang lagi.

Mendengar ada ribuan hektar itu, Syaykh dan timnya sejenak saling memandang. Mereka makin tertarik. “Kalau begitu, ayo kita lihat,” ajak Syaykh.

Mereka pun menelusuri jalan setapak menuju lokasi tanah jelek itu. Benar saja ada ‘tanah jelek’ dengan hamparan

ilalang. Namun dalam benak, Syaykh berkata: “Ini bukan tanah jelek, ini tanah emas!” Lahan yang sesuai dengan angan dan impiannya. Suara hatinya berkata: “Allah menuntun kami ke tanah impian ini.”

Setelah mengamati beberapa saat, Syaykh bertanya: “Mau dijual berapa tanah jelek begini?”

Kemudian prosesi tawar-menawar dan jual-beli tanah pun berlangsung dalam hari-hari berikutnya. Caranya, tim yang ditunjuk Syaykh AS Panji Gumilang untuk melakukan transaksi langsung bertatap muka dengan para pemilik lahan yang jumlahnya puluhan. Pembayaran dilakukan langsung kepada pemiliknya setelah menunjukkan surat-surat tanah tersebut.

Pada tahap awal, 60 hektar lahan dibebaskan. Kemudian proses pembelian terus berlangsung secara perlahan hingga lahan yang dimiliki YPI menjadi seluas 1.200 hektar lebih.

Sambil melakukan perluasan lahan melalui pembelian-pembelian itu, proses penataan lahan pun dimulai.

Problem utama lokasi Al-Zaytun ini adalah kegersangan lingkungan. Merupakan lingkungan terbuka tanpa penyangga pepohonan yang berarti, dan tanpa dukungan irigasi. Maka orang desa menyebutnya tanah jelek. Menyadari akan hal tersebut, langkah pertama yang ditempuh adalah penataan lahan, ditetapkan *site plan* yang jelas, yang diharapkan dapat menjadi rujukan dan keteraturan (*orderliness*) dalam melaksanakan pembangunan berterusan yang akrab lingkungan.

Maka sejak persiapan awal, penghijauan lingkungan sudah dilakukan sebagai suatu yang mutlak. Berbagai tanaman keras yang dapat diharapkan mampu menyangga kelestarian lingkungan, sekaligus mempunyai nilai ekonomis tinggi ditanam secara tertata dan terencana. Pusat-pusat cadangan air pun dipersiapkan, baik berupa waduk, penataan selokan-selokan air maupun parit-parit yang dapat memudahkan pelaksanaan manajemen air, serta menormalisir sungai-sungai kecil musiman, yang bila musim hujan datang merupakan aliran sumber air hujan yang sangat bermanfaat. Resapan-resapan air hujan pun dibuat, tatkala air melimpah diserapkan ke dalam perut bumi, sehingga dapat menjadi cadangan air tanah yang kokoh.

Penghijauan dan manajemen air seperti yang dilakukan di Al-Zaytun ini memerlukan kesabaran dan kontinuitas (mudawamah) yang tiada henti-hentinya. Mereka menyadari usaha seperti ini tidak secepatnya dirasakan hasilnya, kalau tidak dengan kesabaran yang tinggi sudah barang pasti tidak dapat dirasakan hasilnya.

Sambil melakukan perluasan dan penataan lahan, proses pembangunan gedung pun dimulai pada tahun 1996. Hanya dengan tiga puluhan karyawan pembangunan proses penggalan pondasi Gedung Abu Bakar Assiddiq dilakukan secara manual. Sementara itu, proses pembuatan IMB dilakukan. “IMB bangunan-bangunan yang dalam *master plan* Al-Zaytun dibuat dalam satu paket,” cerita Syaykh.

Setelah proyek percontohan Abu Bakar berjalan mulus, proyek percontohan pembangunan gedung asrama menyusul dilakukan. Gedung asrama pertama empat lantai itu diberi nama Al-Mushtafa. Setelah itu menyusul kemudian pembangunan Masjid Persiapan Al-Hayat yang dibangun dalam masa seratus hari. Disusul pembangunan gedung-gedung lainnya. ■

Setelah lama ditunggu-tunggu, satu dari sekian banyak janji kampanye Presiden SBY, akhirnya mulai digulirkan, yakni membagi-bagikan tanah pada rakyat miskin atau sering disebut dengan istilah *land reform*. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto mengungkapkan hal itu kepada wartawan seusai mengikuti Rapat Terbatas tentang Reformasi Agraria di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/5).

Joyo Winoto menjelaskan, ada tiga kriteria tanah yang dibagikan kepada penduduk miskin. Pertama, tanah-tanah yang menurut undang-undang bisa didistribusikan, termasuk tanah-tanah hasil *land reform* sebelumnya, seluas 1,1 juta ha. Kedua adalah tanah-tanah yang berasal dari hutan produksi konversi seluas 8,5 juta ha. Ketiga adalah tanah yang sedang diidentifikasi Departemen Kehutanan dan BPN.

Dalam tulisannya di sebuah harian terbitan ibukota, Rabu (23/5), Joyo Winoto menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan reforma agraria adalah melakukan penataan atas penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah (P4T) atau sumber-sumber agraria menuju suatu struktur yang berkeadilan dan langsung mengatasi persoalannya.

Menyangkut lahan-lahan yang akan dibagikan, Joyo Winoto menjelaskan lebih rinci, bahwa presiden SBY mengalokasikan 8,5 juta ha tanah yang berasal dari kawasan hutan, dan 1,1 juta ha yang berasal dari berbagai sumber lainnya, termasuk diantaranya tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* yang telah ditetapkan berdasarkan UU tetapi masih belum didistribusikan, tanah-tanah negara yang haknya telah berakhir, tanah-tanah yang pemanfaatannya dan penggunaannya tidak sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya, tanah-tanah yang secara fisik dan secara hukum terlantar, dan jenis-jenis tanah lainnya yang telah diatur UU.



Presiden SBY mengalokasikan 8,5 juta ha tanah yang berasal dari kawasan hutan.

Land Reform dan Setumpuk Hambatan

Janji manis pemerintah membagi-bagikan lahan kepada masyarakat miskin dalam rangka reforma agraria, kemungkinan besar tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Setumpuk hambatan masih akan mengganjal program ini, baik dari sisi masyarakat, ketersediaan lahan, maupun masalah hukum.

Namun demikian, menurut Joyo Winoto, program *land reform* ini belum serta merta dilaksanakan, karena saat ini jajaran BPN di seluruh Indonesia masih sedang mempersiapkan desain tahapan dan perkembangan implementasi dari reformasi agraria tersebut. Menurutnya, PP itu akan mengatur mekanisme reformasi agraria, yang dalam waktu dekat akan dikeluarkan.

Kendala

Jika bertitik tolak dari keberadaan lahan yang akan dibagi-bagikan, kemungkinan besar program *land reform* era

SBY ini tidak serta merta berjalan mulus. Beberapa persoalan yang menghambat pendistribusian tanah ini, diantaranya minat warga masyarakat karena menyangkut lahan-lahan yang tidak dilengkapi dengan infrastruktur, seperti yang terjadi pada lahan-lahan transmigrasi yang banyak ditinggalkan masyarakat transmigran.

Di samping itu, bentuk pendistribusian juga menjadi sumber persoalan. Apakah lahan-lahan dikelola secara nasional dan didistribusikan secara nasional ataukah oleh masing-masing daerah? Kalau

dikelola secara nasional, berarti ada mobilitas penduduk (transmigrasi dan ruralisasi) dari satu daerah ke daerah lain, terutama dari perkotaan ke pedesaan. Dalam hal ini harus diingat bahwa pergerakan penduduk seperti ini, berpotensi menjadi kendala, sebagaimana keengganan masyarakat bertransmigrasi.

Sementara jika dikelola secara lokal, pada satu sisi memang akan lebih mendorong perpindahan penduduk karena tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka sebelumnya, namun pada lain sisi juga terkendala dengan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk miskin dengan ketersediaan lahan yang akan dibagi-bagi.

Di samping masalah mobilitasi penduduk, perangkat hukum pelaksana dan perangkat teknis juga masih belum tersedia. Bahkan program reforma agraria ini, bukan tidak mungkin memicu terjadinya duplikasi hak atas tanah. Apa yang dimaksud dengan tanah *absentee*, tanah-tanah yang pemanfaatannya dan penggunaannya tidak sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya, tanah-tanah yang secara fisik dan secara hukum terlantar, dan jenis-jenis tanah lainnya yang telah diatur UU.

Resistensi dan konflik antara pemerintah dan masyarakat menjadi sangat memungkinkan muncul, karena tidak seluruh tanah yang dimiliki masyarakat dan dimiliki pemerintah disertifikasi. Dengan demikian, masing-masing dapat mengklaim tanah itu sebagai haknya. Dalam kondisi yang demikian, masalah reforma agraria yang dimaksudkan untuk kesejahteraan dan keadilan, bisa berubah menjadi malapetaka, seperti yang terjadi pada reforma agraria tahun 1960.

Sebagaimana diketahui, Presiden Soekarno meluncurkan program reforma agraria pada tahun 1960 berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun program itu tidak banyak berhasil karena hak-hak atas tanah pada saat itu belum sepenuhnya tertata. ■ MH



Perusahaan induk asal Singapura Temasek Holdings telah melakukan praktek monopoli di Indonesia.

No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Inti dari UU No. 5/1999 adalah larangan kesepakatan, aktivitas, dan penyalahgunaan dari dominasi suatu perusahaan," kata Fadhil.

Kesepakatan yang dilarang oleh UU itu termasuk praktek oligopoli, penentuan dan diskriminasi harga, *predatory pricing*, pembagian pasar, *group boycotts*, kartel, persekrikatan antar perusahaan, oligopsoni, *vertical integration*, *exclusive dealing* seperti persekongkolan dalam penawaran, mendapatkan rahasia perusahaan saingan dan perjanjian dengan pihak asing yang dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat.

Tarif Ponsel Mahal

Dilihat rasio-rasio keuangan

lain yang digunakan Fadhil, seperti *market power hypothesis*, dan uji ekonometri disimpulkan kekuatan pasar yang dikendalikan Temasek dimaksudkan untuk memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi.

"Sehingga dapat disimpulkan bahwa operator-operator seluler di Indonesia sangat diuntungkan dengan struktur industri telepon seluler yang mengarah ke bentuk oligopoli," kata Fadhil. Tetapi, menurutnya, besarnya profit yang diperoleh oleh para operator karena adanya *market power*, pada dasarnya merupakan *welfare cost*. Artinya, ada kesejahteraan pelanggan yang hilang karena tingginya tarif ponsel, tahun 2006 lalu mencapai lebih dari Rp 6 triliun.

Masukan ke KPPU

Ketua Komisi Pengawas Per-

Monopoli Industri Ponsel Digugat

Kajian berdasarkan berbagai disiplin ilmu ekonomi menunjukkan Temasek Holdings terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat di industri ponsel GSM Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sejak 23 Mei melanjutkan pemeriksaan terhadap perusahaan induk asal Singapura itu.

Presiden Direktur PT INDEF Eramadani, Dr. M. Fadhil Hasan dalam sebuah seminar di Jakarta Rabu (30/5), mempresentasikan hasil kajiannya tentang persaingan usaha yang tidak sehat di industri telepon seluler (ponsel) GSM di Indonesia. Didasarkan pada ilmu ekonometri yang rumit dan njelimet, Fadhil berhasil membuktikan perusahaan induk asal Singapura Temasek Holdings telah melakukan praktek monopoli di Indonesia.

Temasek melalui anak perusahaan STT Singapore, dalam hal ini ICL memegang saham 41% di Indosat, dan melalui Singtel memegang saham 35% di Telkomsel.

Fadhil mengatakan, Telkomsel dan Indosat adalah operator GSM terbesar di Indonesia yang menguasai total 84,4% dari

52.876.012 pelanggan GSM. Masing-masing Telkomsel menguasai 56,72% (29.987.000 pelanggan), dan Indosat menguasai 27,71% (14.655.238 pelanggan), sisanya 15,57% (8.233.774 pelanggan) dikuasai Exelcomindo Pratama.

Temasek melalui dua operator yang dimiliki itu, dapat mengakibatkan mekanisme pasar menjadi tidak dapat bekerja secara optimal. Perang tarif antara Indosat dan Telkomsel menjadi semu, karena pasar ponsel GSM sesungguhnya berstruktur duopoli. Dua perusahaan berbeda tetapi tidak menunjukkan perilaku kompetitif.

Dengan penguasaan yang dominan itulah Fadhil menduga terdapat praktek-praktek kurang sehat yang bertentangan dengan tujuan liberalisasi sektor telekomunikasi. Persisnya, Temasek telah melanggar UU

Indosat, Tekomsel, dan Exelcomindo operator yang memiliki tingkat efisiensi paling tinggi adalah Telkomsel, dimana rasio antara biaya dan pendapatan pada tahun 2005 adalah sebesar 42%. Sedangkan, Indosat mencatat rasio 69% dan Exelcomindo 81%.

Diukur segi profitabilitas antara lain EBITDA, EBIT, RoA dan RoE juga menunjukkan Telkomsel memiliki kinerja paling baik. Rasio EBITDA terhadap pendapatan Telkomsel sekitar 73%, lalu Indosat 58% dan Exelcomindo 57%.

Nilai EBITDA yang tinggi menunjukkan ketersediaan kas bersih, yang dapat digunakan untuk melakukan ekspansi seperti pembangunan infrastruktur jaringan. Tetapi, EBITDA yang tinggi menjadi salah satu alasan pula mengapa tarif ponsel di Indonesia lebih mahal dari beberapa negara lain.

"Menurut sumber dari Ditjen Postel, para operator beralih tingginya tarif yang mereka tetapkan adalah untuk menutup biaya infrastruktur, terutama untuk memperluas jaringan," kata Fadhil.

Berdasarkan metoda analisa

saingan Usaha (KPPU), M. Iqbal yang turut hadir dan menjadi pembicara dalam seminar, mendengarkan saksama paparan Fadhil. "Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan bagi KPPU untuk mengambil putusan soal dugaan monopoli Temasek ini," kata Fadhil.

M. Iqbal mengatakan KPPU sudah mengamati, bahkan menerima laporan dari masyarakat soal adanya dugaan praktek monopoli industri ponsel GSM oleh Temasek.

Dan bila terbukti terdapat praktek monopoli, kata Iqbal putusannya bisa berupa menjatuhkan sanksi denda kepada Temasek, dan/atau memerintahkan Temasek untuk melepas sahamnya di salah satu perusahaan Indosat atau Telkomsel.

Anggota DPD RI Marwan Batubara menyatakan harga dirinya sebagai anak bangsa Indonesia sangat terusik dengan penjualan Indosat ke pihak asing, yang menyebabkan lepasnya Saham Serie A milik pemerintah. Marwan mengatakan, saat ini untuk dapat menjadi direktur utama Indosat setiap calon yang orang Indonesia harus pergi ke Singapura untuk diuji oleh orang Temasek. ■ HT



foto: repro republica

Ribuan massa mendatangi Kedubes Australia di Jakarta. Mereka menuntut Australia meminta maaf atas kasus pelecehan terhadap Gubernur Sutiyoso saat berada di Sidney.

Bang Yos Dilecehkan Australia

Gubernur Sutiyoso yang berada di Australia dalam rangka program *sister city* Jakarta – Sidney memprotes sikap polisi setempat yang arogan. Australia akhirnya secara resmi minta maaf.

Ini pengalaman buruk yang sangat membekas bagi Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan juga bangsa Indonesia. Selasa sore (29/5) itu Bang Yos, panggilan akrab Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, sedang beristirahat di kamar Hotel Shangri-La, Sidney. Dia berada di kota itu memenuhi undangan resmi Gubernur Negara Bagian New South Wales (NSW), Morris Lemma, dalam rangka program *sister city* Jakarta - Sidney.

Sebelumnya Bang Yos mengunjungi *Australian National Maritime Harbour* dan malam harinya dijadwalkan bertemu pengusaha Indonesia di Australia. Karena ada jeda waktu dua jam, Bang Yos memutuskan untuk istirahat di kamar hotel.

Namun tiba-tiba sekitar pukul 16.30 waktu setempat, dia

dikejutkan dengan kedatangan dua anggota kepolisian New South Wales (NSW) yang masuk ke kamarnya menggunakan *master key*. Mereka meminta Sutiyoso menghadap Pengadilan New South Wales keesokan harinya (30/5) untuk memberi keterangan seputar kasus pembunuhan lima wartawan Australia di Balibo Timor Timur (sekarang Timor Leste) pada tahun 1975.

Sutiyoso jelas sangat tersinggung atas sikap arogan anggota polisi itu yang senaknya masuk ke kamar dan mengganggu hak pribadinya. Dia kemudian meminta protokol NSW menyampaikan rasa tersinggungnya kepada Gubernur Negara Bagian NSW, membatalkan kunjungannya ke Canberra (30/5) dan segera kembali ke Jakarta.

Sebagai pejabat negara yang berdaulat, Sutiyoso merasa

dilecehkan dengan kejadian itu. Dia pun mendesak pemerintah Australia meminta maaf. "Saya marah karena diperlakukan tidak wajar," kata Sutiyoso setibanya di Jakarta (30/5).

Purnawirawan Jenderal TNI berbintang tiga ini menyatakan tidak ada urusan atau kaitan dirinya dengan pengadilan setempat. Pada tahun 1975 Sutiyoso masih berpangkat kapten dan menjabat sebagai wakil komandan tim. Selama periode itu dia mengaku tidak pernah bertugas di Balibo. Dia menduga ada LSM Australia anti Indonesia yang memberi informasi keliru tentang kasus ini.

Atas insiden ini Sutiyoso menyatakan program *sister city* antara Jakarta-Sidney akan dipikirkan kembali. "Kalau mereka arogan, apa perlu kita lanjutkan hubungan dengan Australia," paparnya.

Sikap pemerintah Australia ini jelas membuat kecewa pemerintah dan rakyat Indonesia. Tanpa dikomando, ribuan massa mendatangi Kedubes Australia di kawasan Kuning-

an, Jakarta Selatan. Mereka berdemo dan memprotes sikap arogan negara Kangguru itu.

"Pemerintah harus memprotes keras. Australia juga harus meminta maaf kepada Indonesia," kata Ketua DPR Agung Laksono di gedung DPR. Hal senada juga dikemukakan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita. "Peristiwa ini telah mempermalukan pemerintah dan bangsa Indonesia dalam pergaulan di antara masyarakat bangsa-bangsa," tegasnya.

Menlu Hassan Wirayuda mengambil langkah diplomatik dengan memanggil Dubes Australia untuk Indonesia, Bill Farmer. Dalam pertemuan di Deplu selama 45 menit, menurut Jurubicara Deplu Kristiarto Legowo, Menlu menyampaikan protes pemerintah RI kepada pemerintah Australia. "Indonesia menilai apa yang dilakukan polisi negara bagian NSW itu tidak patut. Ini tidak bisa diterima," katanya.

Langkah yang diambil pengadilan negara bagian itu justru berpotensi mengganggu hubungan RI-Australia. Sebagai pejabat yang memiliki kekebalan diplomatik, dan berdasarkan UU *Foreign Immunity Act* Australia, pejabat asing tidak bisa semena-mena dipanggil. "Dalam kaca mata pemerintah federal, Sutiyoso tak berkewajiban memenuhi panggilan tersebut," ujarnya.

Belakangan, Pemerintah Negara Bagian NSW akhirnya meminta maaf atas kejadian tersebut. Permintaan maaf Gubernur NSW, Morris Lemma, melalui pernyataan resmi tertulis, disampaikan langsung oleh Dubes Australia Bill Farmer kepada Sutiyoso di Balai kota Jakarta (31/5). Dalam suratnya itu juga dijelaskan, Komisioner Polisi Federal NSW mengusut tindakan tak sopan kedua polisi itu.

Sutiyoso bisa menerima permintaan maaf tersebut dan menyatakan, apa yang disampaikan Lemma melebihi apa yang diharapkannya. "Tapi untuk urusan Indonesia dan Australia saya serahkan pemerintah pusat melalui Menlu," katanya. ■ SP, HT



foto: berindo wilson

Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto saat akan memberikan keterangan kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap.

Insiden Berdarah di Pasuruan

Sengketa tanah antara warga dan pihak TNI AL di Grati, Pasuruan memicu bentrok berdarah. Empat warga tewas dan tujuh lainnya terluka kena tembakan. Panglima TNI menyesalkan kejadian itu dan memerintahkan KSAL segera mengusut tuntas.

Siang itu cuaca terik. Matahari tepat berada di atas kepala saat sejumlah anggota Marinir TNI AL dipimpin Letda (Mar) Budi Santoso tengah melakukan patroli rutin setelah sebelumnya mereka melakukan apel di markasnya di Ksatrian, Grati, Desa Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur.

Entah mengapa prajurit Marinir yang bertugas di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Grati, Pasuruan itu kemudian terlibat bentrok dengan warga yang saat itu berada di lahan sengketa. Yang jelas sebanyak 4 warga penduduk setempat akhirnya tewas dan tujuh lainnya terluka kena peluru yang ditembakkan.

Versi penduduk setempat, Sholihin, seperti ditulis *Media*

Indonesia (31/5) menyebutkan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 12.00. Kala itu 40 personil TNI AL dan 150 warga berada di lokasi sengketa. "Kami berusaha mendekati aparat, tapi langsung dihujani tembakan ke semua arah sehingga mengenai warga yang berada di rumah," ujar Sholihin.

Sementara Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Stafzen Noerdin menyatakan, tindakan melepaskan tembakan itu terpaksa dilakukan anak buahnya karena terdesak diserang warga yang membawa senjata tajam berupa clurit, kayu dan batu. Dengan kondisi terjepit seperti itu mereka berusaha meredam warga agar tidak mendekat dengan menembakkan senjata ke atas dan ke bawah. Namun,

tembakan itu memantul hingga mengenai warga.

Buntut kasus ini, ratusan warga kemudian melakukan protes dan demo. Mereka menutup jalan sehingga memacetkan arus lalu lintas Pasuruan - Probolinggo hingga puluhan kilometer.

Bentrok antara warga dengan prajurit Marinir ini dipicu adanya sengketa tanah seluas 539 hektar yang sebagian kini diduduki warga Pasuruan. Pengadilan Negeri setempat memenangkan TNI AL dalam kasus sengketa ini. Sementara warga tetap bertahan menguasai tanah tersebut.

Insiden berdarah yang meminta korban jiwa ini sangat disesalkan banyak pihak. Kejadian ini setidaknya juga mencoreng citra TNI yang terbina baik selama ini. Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto selain meminta maaf kepada keluarga korban yang meninggal dan terluka juga telah memerintahkan KSAL Laksamana TNI Slamet Subianto mengusut tuntas kasus ini sebaik-baiknya.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Mayjen Syafzen Noerdin. "Kami menyesalkan kejadian ini. Untuk itu kami mohon maaf," ujarnya. Terkait kasus ini Syafzen juga telah mencopot Komandan Puslatpur Grati, Pasuruan, Mayor (Mar) Husni Sukarwo untuk meredam emosi warga dan sebagai bentuk tanggung jawab komandan.

Sementara terhadap 13 prajurit Marinir yang terlibat dalam kasus ini telah ditetap-

kan sebagai tersangka dan dalam pemeriksaan pihak POM TNI di Surabaya.

Kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Marsekal Djoko berharap pemberitaan tentang TNI hendaknya dilakukan secara berimbang.

Dia memberi contoh, kalau ada bentrok dengan masyarakat, seolah-olah TNI yang mendahului. Padahal laporan yang dia terima biasanya mereka (para prajurit) yang didahului.

Ditegaskannya, bila memang ada prajurit TNI yang melakukan hal seperti itu, maka dirinya selaku Panglima dan juga para Kepala Staf pasti akan menindak tegas mereka yang melakukan pelanggaran.

Dalam kasus Pasuruan ini Panglima yakin tidak mungkin ada kesengajaan yang direncanakan prajurit untuk menembak langsung ke masyarakat. "Secara logika (tuduhan menembak langsung) itu tidak kita terima," jelasnya.

Namun Panglima tidak ingin berpolemik tentang hal ini dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada Puslabfor Polri dan POM TNI serta POMAL yang sudah bekerja di sana.

Soal sengketa tanah di kawasan Puslatpur Grati, Pasuruan, Panglima menyatakan segera diselesaikan karena sudah ada komitmen dengan masyarakat melalui aparat pemerintah setempat seperti bupati, camat dan kepala desa. Masalah yang sudah lama terbengkalai itu memang perlu diselesaikan dengan baik. ■ RON, SP



Bocah korban penembakan pasukan Marinir.

foto: repro media indonesia

Dalam rencana, tahun 2009 terowongan raksasa yakni terowongan (subway) dan terowongan bawah tanah diharapkan dapat mengatasi masalah banjir di masa mendatang.

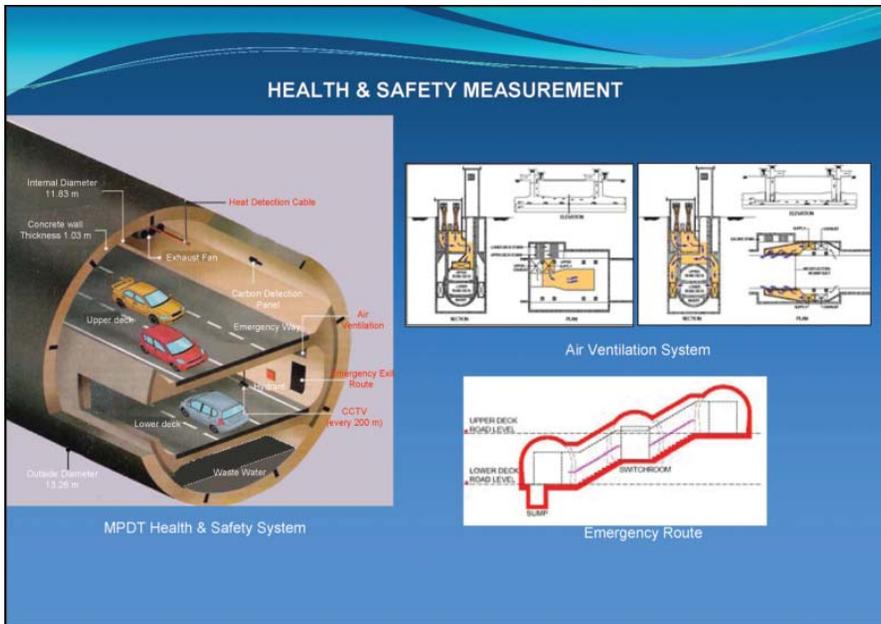
Jakarta terapan. Jakarta punya monorail. Oke! Dialog yang diucapkan seorang lanjut usia dalam iklan sebuah *situs* di televisi menggambarkan informasi tentang Jakarta.

Jakarta, maunya tak harus sering tenggelam dalam genangan. Dalam realita, arus dinamika memacu kota metropolitan ini menjadikan sebagian wajah wilayahnya terpoles modernisasi. Sayangnya, Jakarta memiliki dasar rupa nan kurang cantik. Betapa tidak, dataran rendah di wilayah pesisir yang awalnya berawar-rawa, dialiri 13 sungai yang pada era kemerdekaan dipenuhi gubuk liar akibat urban yang membabi buta, acapkali dikunjungi air berlebih dari wilayah hulu. Pemerintah Hindia Belanda yang pernah menguasainya dengan sebutan Batavia-pun sering dibuat kalang kabut manakala kota ini berulang kali dilanda banjir besar. Sungai Ciliwung sering dianggap menjadi biang keladi utamanya.

Kini, masalah menjadi lebih kompleks. Tak hanya karena genangan banjir, tapi juga tenggelam dalam kemacetan, berselimut lingkungan kumuh dan terancam krisis bahan baku air bersih.

Menghadapi air, Jakarta memang rumit. Tatakala air berlebih, Jakarta menjadi korban bencana banjir. Di lain waktu, Jakarta malah kesulitan akan bahan baku air bersih. Ini merupakan problem lebih besar di masa mendatang. Banjir tahun 2007 disebutkan telah merugikan hingga mencapai nilai Rp 5 triliun dan kerugian lain akibat rusaknya infrastruktur.

Soal upaya menghindari dari bahaya kemacetan lebih parah di masa mendatang, moda angkutan massal cepat merupakan bagian dari Pola transportasi makro yang digagas Gubernur Sutiyoso segera direalisasikan. Berbentuk kereta api bawah tanah, jika tidak ada aral melintang akan dimulai pembangunannya tahun 2009. Membujur dari Lebak Bulus menuju Jakarta Kota, jalur bawah tanah (subway) akan melintasi antara Ratu Plaza Senayan hingga Harmoni. Secara tehnik, terowongan akan dibangun dengan cara menerobos bawah tanah dan ditangani oleh investor dari Jepang.



Konsep Deep Tunnel untuk Jakarta.



Seminar internasional tentang Deep Tunnel di Hotel JW Marriott, Jakarta.

foto: berindo wilson

Dua Terowongan Untuk

Jakarta membangun proyek terowongan moda angkutan massal di bawah tanah multi fungsi. Keduanya akan mengatasi masalah Jakarta yang cukup krusial dan mendatang

Pada tahun yang sama, terowongan bawah tanah multi fungsi atau yang disebut *Multi Purpose Deep Tunnel* juga direncanakan dibangun. Proyek besar yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini telah disepakati Pemerintah Pusat. Menerobos bumi, di bawah sungai Ciliwung sepanjang 12 Km, sejak dari jalan Haryono MT -Kampung Melayu-Bukit Duri-Pintu Air Manggarai- Karet-Pintu air Grogol hingga di Muara Angke, proyek ini diperkirakan menelan biaya sebesar Rp 16,7 triliun. Menurut Menteri PU, Joko Kirmanto, karena keterbatasan anggaran pemerintah, proyek ini akan mengundang investor swasta, dengan asumsi bahwa jika terbangun, proyek ini akan menghasilkan sekitar Rp 3 triliun per tahun. Kontribusi ini didapat dari perhitungan hasil jalan tol bawah tanah dan pengolahan air bersih. Terowongan bulat, berdiameter 12 meter dan 15 meter di bawah tanah memiliki 2 lapisan (*deck*) yang berfungsi sebagai jalur jalan tol dan di lapis bawah berupa tandon air ini, dikendalikan teknologi tinggi yakni sistem robot *global positioning satellite* (GPSD). Seperti yang telah diberitakan pada edisi sebelumnya, tandon air diperkirakan dapat menampung limpahan banjir selama 18 jam dan terintegrasi dengan Banjir Kanal Timur serta Banjir Kanal Barat dan akan dikelola oleh sebuah Badan Otorita atau BUMD.

Dr. Ir. Firdaus Ali, MSc peneliti dari FTUI yang sekaligus staf ahli dari Sutiyoso menyodorkan konsep terowongan bawah tanah yang kelak memiliki fungsi sebagai pengendali banjir, penyelamatan dari kelangkaan bahan baku air, penanganan limbah cair dan pengolahan yang menghasilkan gas, mengatasi kemacetan dengan fungsi sebagai jalan tol dari dan menuju Bandar Udara Soekarno Hatta dan juga sebagai jalur kabel bawah tanah.

Disertai penataan bangunan-bangunan liar di sepanjang sungai Ciliwung untuk dialihkan pada pemukiman lebih layak, warga tersebut dilibatkan pada aspek ekonomi dari pembangunan terowongan tersebut. Menurut Firdaus, idealnya pelaksanaan pembuatan terowongan bersamaan dengan pembenahan lingkungan

di atasnya. Dia optimis, karena masyarakat akan menjadi bagian dari kegiatan pembuatan terowongan tersebut. Perkara sistem pemanfaatan air sungai Ciliwung yang posisinya berada di atas terowongan tersebut, akan tersimpan pada tandon di lapis paling bawah. Kemudian melalui proses pengolahan limbah cair yang juga akan menghasilkan gas yang dapat dimanfaatkan, air yang sudah terproses tersebut dialirkan ke penampungan yang kelak menjadi air bersih.

Keuntungan dari pembuatan Deep Tunnel

Beberapa keuntungan lain atau kelebihan dari pembuatan Deep Tunnel menurut Firdaus antara lain bisa mengatasi masalah banjir tahunan di lokasi padat penduduk tertentu dengan menyalurkan luapan air sungai secara "by pass" melalui terowongan ke arah hilir sungai yang sama, sungai lain, kolam penampung dan/atau langsung ke laut.

Pembebasan tanah untuk keperluan terowongan inipun relatif kecil, yaitu hanya pada bagian ujung terowongan yang muncul ke permukaan tanah dan beberapa titik untuk keperluan ventilasi dan keselamatan (*evakuasi*). Sistem terowongan yang berfungsi sebagai saluran tertutup, tidak mengganggu dengan perilaku masyarakat sekitar sebagaimana halnya dengan saluran terbuka (membuang sampah, MCK dsb) dan pengoperasian serta pemeliharannya relatif tidak membebani anggaran pemerintah.

Keuntungan lain adalah pelaksanaan pembangunan akan lebih cepat karena menggunakan sistem bor TBM.

Terungkap pada seminar internasional mengenai hal ini di Hotel JW Marriott, Jakarta, proyek serupa telah diterapkan di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Optimis mendapat sambutan dari para investor, beberapa panelis dari luar negeri meyakinkan secara teknis bahwa pembuatan terowongan ini sangat memungkinkan di Jakarta yang tanahnya relatif stabil. Sementara upaya yang telah dilakukan Sutiyoso selaku Gubernur DKI Jakarta adalah

mengundang Islamic Development Bank (IDB) ketika menghadiri pertemuan *sister city* bulan April 2007 di Beirut, Lebanon. Dalam pertemuan itu, IDB sangat tertarik dengan tawaran Bang Yos untuk membangun proyek raksasa tersebut.

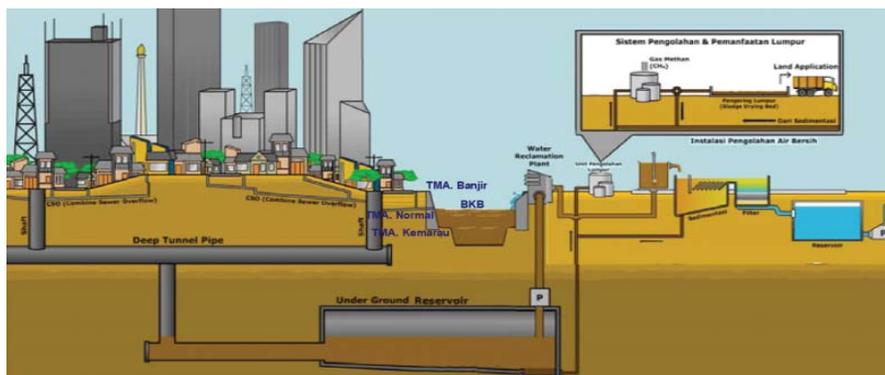
Ketertarikan IDB telah mendorong Pemprov. DKI Jakarta untuk menginstruksikan tim Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta untuk segera mempresentasikan rencana Mega Proyek sebagai penyelamatan masa depan Jakarta ini. Sementara, dalam kunjungan ke Jepang, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengajak investor dari Jepang untuk terlibat dalam proyek raksasa ini.

Pengendalian dan pemanfaatan air menyeluruh

Sejak berulangnya banjir Jakarta, sebenarnya pemerintah pusat telah mempersiapkan rencana pengendalian air sejak dari hulu antar lain rencana membuat sodetan antara sungai Ciliwung dari Katulampa hingga ke sungai Cisadane. Sayangnya menurut Dr. Ir. M. Donny Azdan, direktur dari Directorate of Water Resources and Irrigation Bappenas, Otonomi Daerah memiliki kewenangan wilayah untuk menerima atau menolaknya. Provinsi Banten langsung memberi reaksi keras karena rencana tersebut dianggap akan mengalihkan banjir ke wilayahnya.

"Padahal, sebenarnya mereka akan beruntung karena akan mendapat kesempatan suplai bahan baku air sangat bersih karena langsung mengalir dari hulunya," ucap Donny.

Ketika seorang peserta memprotes, mengapa harus membangun Deep Tunnel yang relatif berbiaya mahal dan tidak melakukan rehabilitasi sungai Ciliwung, mengembalikan atau melebarkan kembali seperti semula, Donny menyebutkan, biaya yang harus dikeluarkan justru tidak lebih menguntungkan, karena akan membutuhkan sekitar 10 triliun. Bandingkan dengan membuat Deep Tunnel sekitar Rp 16,7 triliun yang bersifat multi guna dan menguntungkan dengan beroperasinya jalan tol dan penyelamatan dan pengolahan bahan baku air. ■ DEN



Konsep Deep Tunnel untuk Jakarta.

Jakarta



Arena MTQ di kompleks Masjid Istiqlomah Tanjung Selor.

foto: humas pemda kab. bulungan

MTQ Kaltim di Bulungan

Untuk kelima kalinya Bulungan menjadi tuan rumah MTQ Tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Seluruh komponen masyarakat memberi respon positif.

Tanjungselor, ibu kota Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, yang selama ini dikenal adem ayem, berubah semarak. Sepanjang jalan dipenuhi umbul-umbul, di setiap sudut nampak spanduk ucapan selamat dari berbagai elemen masyarakat. Gedung, perkantoran, toko dan rumah penduduk dihiasi *gaba-gaba* dan lampu warnawarni. Ini membuat suasana kota yang terletak di tepi Sungai Kayan itu makin meriah.

Kabupaten Bulungan, kembali mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Musyabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)* ke 29 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur. "Ini, kali kelima - setelah pertama tahun 1973, 1979, 1985, dan 1995, tapi karena banjir pindah ke Tarakan, dan kelima tahun 2007, yang berlangsung hari Sabtu-Kamis (12-17/5)", kata Drs H Budiman Arifin, M.Si. Bupati Bulungan.

MTQ yang berlangsung setiap tahun merupakan wadah untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengkaji dan memaha-



Hj. Sri Wahyuni, SE

rumah merupakan berkah, dan sekaligus uji kemampuan seluruh masyarakat di *Bumi Tengyuan* menjadi tuan rumah yang baik. Dan, itu dibuktikan dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat menjadikan Kota Tanjungselor sebagai kota ibadah. "Bukan hanya saat berlangsung MTQ, tetapi dari dulu sampai sekarang, Kabupaten Bulungan paling kondusif di semua aspek kehidupan termasuk kehidupan beragama," kata Wiyono Adie M, SE. MPPM Ketua Badan Musyawarah Gereja Kristen (BMGK) Kabupaten Bulungan kepada SL Pohan dari *Berita Indonesia*.

mi kandungan ilmu Al Qur'an. Al Qur'an, bukan semata kitabullah yang hanya dipajang, tetapi justru di dalamnya banyak mengandung pelajaran berharga bagi orang-orang yang mau berpikir dan bertakwa. Sebagaimana firman Allah SWT: *Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi yang bertakwa (QS Al Baqarah: 2)*. "Itu sebabnya untuk lebih memasyarakatkan dan membukakan Al Qur'an diantaranya dengan memperlombakan seni baca Al-Qur'an melalui MTQ," kata Budiman pada acara MTQ yang dibuka Gubernur Kaltim Yurnalis Ngayoh.

Kepercayaan menjadi tuan

rumah merupakan berkah, dan sekaligus uji kemampuan seluruh masyarakat di *Bumi Tengyuan* menjadi tuan rumah yang baik. Dan, itu dibuktikan dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat menjadikan Kota Tanjungselor sebagai kota ibadah. "Bukan hanya saat berlangsung MTQ, tetapi dari dulu sampai sekarang, Kabupaten Bulungan paling kondusif di semua aspek kehidupan termasuk kehidupan beragama," kata Wiyono Adie M, SE. MPPM Ketua Badan Musyawarah Gereja Kristen (BMGK) Kabupaten Bulungan kepada SL Pohan dari *Berita Indonesia*.

MTQ, kata Wiyono Adie, memberikan suatu kontribusi bagi keberadaan umat secara keseluruhan, terutama umat Kristiani. Bagaimana menciptakan suatu sinergi dalam kerukunan antar umat beragama, dan itu diimplementasikan kepada seluruh denominasi gereja untuk mendukung terselenggaranya MTQ ini, baik itu pengamanan secara internal, dukungan dalam bentuk spanduk, kebersihan dan lain-lain. "Tidak hanya di Kota Tanjungselor, tapi di semua gereja yang ada di Kabupaten Bulungan, pada acara-acara kebaktian, kami memajukan doa-doa khusus

agar pelaksanaan MTQ ke 29 Tingkat Provinsi Kaltim ini berjalan dengan baik dan sukses," aku Ketua BMGK Bulungan ini.

Sementara Koordinator Publikasi dan Dokumentasi Panitia Pelaksana, Drs Yahdiannur, M.Si. mengatakan, pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Kaltim ke 29 yang dipusatkan di kompleks Masjid Istiqlomah, Tanjungselor, tentunya menjadi momentum yang paling membanggakan warga masyarakat Kabupaten Bulungan, terutama bagi umat muslim.

"Syukur alhamdulillah, MTQ ini dapat berlangsung sukses dan lancar seperti harapan kita bersama serta memberikan kepuasan bagi semua pihak yang mengikuti. Namun, ada pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak. Dan, untuk itu, atas nama panitia penyelenggara, mohon maaf atas segala kekurangan kami," kata Yahdiannur yang juga Kabag Humas Pemda Kabupaten Bulungan, usai acara penutupan kepada wartawan media lokal, luar daerah dan Jakarta.

Terdapat 614 kafilah berkompetisi di MTQ ke 29 Tingkat Provinsi Kaltim ini. Kota Samarinda mengirimkan 60 peserta, Kota Balikpapan 52 peserta, Kota Bontang 50 peserta dan Kota Tarakan 52 peserta. Dari Kabupaten Kutai Kartanegara, mengutus 67 peserta, Kabupaten Kutai Timur 60 peserta, Kabupaten Kutai Barat 50 peserta, Kabupaten Berau 60 peserta. Lalu, Kabupaten Malinau 45 peserta, Kabupaten Paser 55 peserta, Kabupaten Penajam Paser Utara 57 peserta dan Kabupaten Nunukan 48 peserta. Sementara Kabupaten Bulungan sebagai tuan rumah 60 kafilah.

Akhirnya, tampil sebagai juara umum kafilah Kabupaten Berau. Daerah yang dijuluki Kabupaten *Bumi Batiwakkal* ini berhasil sebagai juara umum untuk kedua kalinya. Sebelumnya, kafilah Berau tampil sebagai juara umum pada MTQ ke 28 Tingkat Provinsi Kaltim di Tanjungredeb, Berau, tahun 2006 lalu. ■ ASM, SLP, SP

Bupati Lily Hambali Puji Wartawan

Bupati Purwakarta memberi apresiasi yang tinggi kepada pers di daerahnya. Dia memuji kerja wartawan yang didukung keuletan, kesabaran dan ketelitian serta berpedoman pada UU tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Bupati Purwakarta Drs H.Lily Hambali Hasan M.Si menilai, tugas jurnalistik seperti mencari bahan berita, mengolah dan menyajikannya di media massa, layak mendapatkan apresiasi yang tinggi dari semua pihak.

Selama ini kepercayaan terhadap pers telah tumbuh dan berkembang di hati masyarakat. Kepercayaan tersebut harus terus dipelihara dengan menjaga citra dan nama baik pers nasional. "Karena hanya wartawan profesional yang akan memberikan kontribusi konkrit bagi kepentingan pembangunan," katanya pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2007 di Purwakarta.

Lily menyadari bahwa keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang, khu-

susnya di Purwakarta, tidak terlepas dari kontribusi dan hasil karya insan Pers. Karena itu menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta memfasilitasi kegiatan jurnalis sesuai aturan dan ketentuan yang ada.

Kabag Humas Pemkab Purwakarta, Hj. Nina Meinawati SH kepada *Berita Indonesia* menyatakan kebanggaannya karena para wartawan mampu menyajikan dan menyebarkan informasi secara komprehensif. Ia juga mengakui besarnya peran wartawan dalam mendorong pembangunan di Purwakarta.

Nina berharap Kode Etik Jurnalistik yang merupakan pegangan wartawan dalam bekerja hendaknya dapat diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Wartawan diharapkan menyadari posisi dan



Bupati Purwakarta Drs. H. Lily Hambali Hasan M.Si didampingi Kabag Humas Hj. Nina Meinawati SH

tugasnya sebagai "pemburu berita". Jadi sangat tepat jika kesejahteraan insan pers sangat ditentukan oleh profesionalismenya di lapangan.

Nina juga menyadari pentingnya komitmen untuk melakukan koordinasi antar-instansi dan bekerjasama dengan pers. Dengan demikian, sinergi antara instansi dengan insan pers akan terus bisa ditumbuhkembangkan.

Di tengah semaraknya peringatan HPN, Endang Abdullah,

SH, MH, seorang wartawan senior di Purwakarta, mengharapkan wartawan selalu berpedoman kepada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurutnya, wartawan profesional harus memiliki integritas, ketajaman analisa, responsif dan bertanggung jawab. Apresiasi tinggi yang diberikan Bupati Lily, menurutnya, harus lebih mendorong insan pers di daerah ini terus berbenah diri dan meningkatkan profesionalismenya. ■ BND, SBR, SP

DR. Bruce Walker di SMPN 4 Purwakarta

DR. Bruce Walker, Konsultan Global Partner, di sela-sela waktunya memberi pembelajaran bicara fasih bahasa Inggris bagi guru-guru di Purwakarta, berkunjung ke SMPN 4 Purwakarta. Program kerja sama Depdiknas dengan lembaga Global Partner ini mendapat apresiasi tinggi di Kabupaten Purwakarta.

Di tengah para guru dan siswa SMPN 4, DR. Bruce melakukan dialog interaktif. Para guru dan siswa menggunakan bahasa Inggris sedang DR. Bruce menjawabnya dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

DR. Bruce juga mengungkapkan rahasia belajar bahasa secara mudah, tak terkecuali bahasa apapun. Menurutnya, selama ini para siswa sering harus mengeluarkan banyak energi bahkan memusingkan kepala karena terjebak oleh tata bahasa. Padahal yang terpenting adalah bagaimana orang bisa berbicara atau berkomunikasi dengan baik. Untuk itu model yang benar adalah bagaimana orang mau mencoba memakai bahasa tersebut.

"Saya bisa berbahasa Indonesia bukan belajar

tata bahasa tapi saya latihan berbahasa Indonesia. Jadi rahasia belajar bahasa Inggris yang menjadi misi lembaga Global Partner adalah memotivasi latihan berbicara bahasa Inggris," kata Bruce yang sudah empat tahun tinggal di Indonesia.

Farah Kirani siswa kelas III SMPN 4 Purwakarta dalam dialog interaktif menggunakan bahasa Inggris bertanya kepada DR. Bruce mengapa mau tinggal di Indonesia, bagaimana kurikulum di Indonesia, dan bagaimana memberantas korupsi di Indonesia. DR. Bruce menjawab sangat senang tinggal di Indonesia karena hubungan silaturahmi di negeri ini sangat baik, hubungan tetangga tertata baik. Sedang di negerinya, Amerika Serikat, orang hanya sibuk kerja. Tentang kurikulum sudah baik, tinggal latihan-latihan. Kalau memberantas korupsi, menurutnya, itu harus muncul dari gerakan intelektual muda yang ingin membawa perubahan sesuai disiplin ilmu yang ditekuninya.

Drs.Nanang Mustaran MED Dosen STIE Wikara Purwakarta dan Kepala Sekolah SMPN 4 Purwa-



DR. Bruce Walker

karta, Ade Nandang Suryana, S.Pd, mengakui motivasi para siswa-siswanya sangat luar biasa. Itu terlihat dari banyaknya siswa silih berganti berdialog menggali ilmu dan mencoba berdialog dengan DR. Bruce. "Untuk itu guru-guru se Kab. Purwakarta yang ikut pelatihan di kampus STIE Wikara dapat mengajarkannya di sekolah masing-masing," tambah Ade Nandang. ■ BND, SP

Guna mewujudkan Bandung Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan Bersehat), Pemda telah menancangkan sejumlah program, antara lain berupa Visi *Bandung Sehat 2007*. Visi ini merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan Kota Bandung.

Perjalanan panjang Pemkot Bandung untuk mencapai visi *Bandung Sehat 2007* tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini harus diawali dengan strategi membangun paradigma sehat.

Ada 9 strategi operasional pelayanan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat Kota Bandung. Yakni dengan menggerakkan semua potensi pembangunan berwawasan kesehatan, meningkatkan kualitas promosi kesehatan, memahami dan melaksanakan berbagai kewenangan bidang kesehatan, meningkatkan manajemen kualitas sumber daya, mengoptimalkan kualitas sistem informasi kesehatan, meningkatkan advokasi proporsi anggaran kesehatan dan pembiayaan kesehatan.

Untuk kelurahan sehat, upaya penanggulangan penyakit menular berbasis lingkungan seperti pada DBD, TBC, penyakit pernafasan akut telah dilakukan. Upaya tersebut berupa gerakan kemitraan lingkungan perkotaan kumuh dan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Bertujuan untuk mengaktifkan dan menyadarkan masyarakat agar selalu melakukan pembersihan lingkungan dan pemberantasan sarang penyakit serta menekan kasus flu burung.

Terobosan tersebut memang tidak sia-sia. Ini terbukti dengan keberhasilan Pemkot Bandung meraih penghargaan "Manggala Karya Bhakti Husada Arutala" dari Departemen Kesehatan RI beberapa waktu lalu.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bandung Dr. Gunadi Sukma Binekes M.Kes. yang mengutip pernyataan Wali Kota Bandung Dada Rosada, keberhasilan Kota Bandung dalam meraih penghargaan di bidang



Pemerintah Kota Bandung akan terus berupaya meningkatkan prestasi di bidang kesehatan

Menuju Bandung Sehat 2007

Masih tingginya tingkat kematian bayi dan ibu, rendahnya gizi di kalangan wanita hamil dan balita, serta masih maraknya praktek perkawinan dini di kalangan remaja merupakan masalah utama pembangunan Kota Bandung sekarang ini.

kesehatan tidak lepas dari partisipasi masyarakat Kota Bandung.

Dengan adanya komitmen itu, Pemkot Bandung berhasil meningkatkan 9 indikator yang telah ditetapkan. Yakni usia harapan hidup menjadi rata-rata 72,23 tahun, dan diharapkan meningkat lagi menjadi 75 tahun pada tahun 2007.

Selain itu, Kota Bandung juga mampu menekan angka kematian bayi dan balita hingga ke tingkat paling rendah di Jawa Barat (32/1000) dan angka kematian ibu hamil dan melahirkan (200/10.000 KH). Cakupan air bersih 85 %, pelayanan Ibu dan Anak 85 %, peserta KB Aktif 83 %; imunisasi bayi (ICU); gizi buruk kurang dari 1%; proporsi anggaran kesehatan terhadap APBD 155.

Pada pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN), peran serta warga Kota Bandung juga tertinggi di Jawa Barat. "Terlebih lagi, di Kota Bandung tidak terjadi kasus polio liar maupun flu burung tandasnya.

Indikator prestasi-prestasi itu merupakan keberhasilan walikota membuat komitmen dengan masyarakat, yang dijadikan kriteria sebagai penilaiannya," kata Gunadi.

Dikatakannya, penghargaan ini bukan merupakan akhir upaya Pemkot Bandung dalam meningkatkan kesehatan warganya. "Pemerintah Kota Bandung akan terus berupaya meningkatkan prestasi di bidang kesehatan, salah satunya, melalui Perda K-3. Kalau Perda tersebut bisa dilaksanakan semuanya, warga Kota Bandung bisa dikatakan akan se-

hat," jelas Gunadi.

Menurut Gunadi, perencanaan Visi Bandung Sehat 2007, disesuaikan dengan Program Rencana Strategis (Renstra) Dinkes Kota Bandung. Program ini dimaksudkan agar di masyarakat dapat berkembang perilaku bersih dan sehat, memberdayakan masyarakat dalam memelihara, meningkatkan, melindungi kesehatan sendiri serta lingkungannya.

Peluang untuk mewujudkan program-program tersebut di Bandung sangat mungkin. Itu bisa dilihat dari aspek SDM-nya secara kuantitatif sangat potensial. Ketersediaan akan sarana kesehatan sudah cukup memadai. Terhitung ada sekitar 4.662 sarana kesehatan yang tersedia baik swasta maupun pemerintah. ■ AW, SBR

DPRD OKI Bertandang ke Kukar



foto-foto: dok. tokohindonesia

Banyak daerah ingin tahu implementasi Program Gerbang Dayaku di Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sudah menjadi tujuan utama kunjungan kerja para anggota DPRD dari berbagai kabupaten di seluruh Indonesia.

Kunjungan rombongan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Kepulauan Riau, ke Tanggarong, ibukota Kukar akhir Mei lalu semakin memperkuat posisi Kukar sebagai daerah yang dijadikan tujuan utama studi banding oleh berbagai instansi pemerintah. Dalam kunjungannya itu, para wakil rakyat OKI dari Komisi C yang berjumlah 11 orang itu ingin bertukar ilmu dan pengetahuan di bidang pemerintahan khususnya implementasi program Gerbang Dayaku.

Dalam sambutannya, Ilyas Panji Alam MM, sebagai pemimpin rombongan mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kukar yang telah menerima rombongan dengan baik. Lebih lanjut ia mengatakan, kedatangan anggota Komisi C DPRD OKI dalam rangka studi komparatif, meliputi kajian tentang pembuatan

peraturan daerah (Perda) inisiatif Dewan, mekanisme Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban Bupati (LKPj), pengelolaan retribusi terminal, pelaksanaan kegiatan proyek multiyears, kerja sama pihak ketiga, serta pengelolaan tata ruang dan pendapatan asli daerah (PAD) Kukar. Pertemuan yang berlangsung singkat ini lebih banyak dipandu Asisten IV Bidang Hubungan Masyarakat dan Kesra Setkab Kukar HM Gufron Yusuf SH MM.

Pada kesempatan itu, salah satu anggota DPRD OKI Aswan ST dari Fraksi Golkar, menanyakan tentang pengelolaan pendidikan di Kukar. Gufron Yusuf kemudian menjelaskan bahwa Pemkab Kukar melalui Program Gerbang Dayaku Tahap II menempatkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), melalui bidang pendidikan dan kesehatan, sebagai strategi unggulan. Termasuk mengenai pe-

ingkatan sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, untuk mengantisipasi berkurangnya Sumber Daya Alam (SDA) di Kukar.

Demi meningkatkan kualitas SDM, Pemkab Kukar telah menggulirkan program belajar 12 tahun, dibarengi pembebasan SPP dari SD sampai SLTA. Baik itu sekolah berstatus negeri maupun swasta. Kemudian peningkatan kualiti-

tas guru dengan diklat-diklat maupun melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana (S1), pemberian insentif guru dan lain sebagainya. Guna tercapainya target pendidikan yang diharapkan, pemerintah daerah telah menjadi salah satu *pilot project* program Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA), di mana para orangtua tidak ada lagi yang mempekerjakan anak guna menghidupi keluarga tanpa memperhatikan pendidikannya.

Menyambung jawaban Gufron Yusuf tersebut, Sekretaris DPRD OKI Drs Ishak Idrus MSi ingin mengetahui lebih jauh tentang Dana Bantuan Desa (DBD). Ghufon Yusuf menjawab, Kukar tidak menerapkan dana bantuan desa, seperti ditetapkan pemerintah daerah lain. Namun sejak program Gerbang Dayaku (GD) dilaksanakan, Kukar telah mengucurkan dana sebesar Rp 2 miliar per desa, tergantung klasifikasinya, untuk program GD tahap I. Sedangkan pada program GD tahap II besaran-nya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing desa. Yakni tipe A Rp 2 miliar, tipe B Rp 1,75 miliar dan tipe C Rp 1,5 miliar. Terobosan ini diyakini melebihi dari anggaran yang ditetapkan pemerintah daerah lain melalui Dana Bantuan Desa. ■



Gedung DPRD Kutai Kartanegara.

Fauzi Gandeng Prijanto

Fauzi Bowo akhirnya menggandeng Prijanto sebagai cawagub. Kombinasi sipil-militer dinilai paling ideal memimpin Jakarta

Setelah lama ditunggu-tunggu, calon Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Mayjen TNI Prijanto sebagai calon wakil gubernur. Mantan Asisten Teritorial (Aster) KSAD ini akan mendampingi dalam Pilkada DKI Jakarta bulan Agustus mendatang.

Deklarasi pasangan Fauzi – Prijanto ini diumumkan Ketua DPD Partai Demokrat Ferial Sofyan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (1/6) lalu. “Kami sepakat mengusung Dr Ing. Fauzi Bowo dan Prijanto sebagai Cagub dan Cawagub DKI Jakarta,” kata Ferial di depan ribuan massa yang memenuhi halaman di depan tugu proklamasi.

Tercatat 13 parpol mendukung pasangan ini. Yakni Partai Golkar, PDI-P, Partai Demokrat, PPP, PBB, Partai Damai Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, PKPB, PPD, PKNU, PPD, PBS dan PPIB.

Dipilihnya tanggal 1 Juni sebagai hari pendeklarasian pasangan ini, menurut Ferial, bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila dan hari raya Waisak, sebagai perlambang keberagaman Jakarta.

Pendeklarasian pasangan ini cukup mengejutkan banyak kalangan di masyarakat. Karena nama Prijanto sebelumnya tak pernah terdengar dan disosialisasikan. Bahkan yang santer disebut-sebut sebagai pendamping Fauzi Bowo selama ini adalah mantan Pangdam Jaya Mayjen TNI (Purn) Slamet Kirbijanto yang dijagokan PDI-P dan mantan Dan Puspom Mayjen TNI (Purn) Djasri Marin yang diusung Golkar.

Prijanto yang hadir mengenakan pakaian Betawi saat itu menyatakan kesiapannya mendampingi Fauzi Bowo. Dia pun bertekad membangun Jakarta ke depan yang lebih baik.

Prijanto juga bukan merupakan sosok yang asing bagi warga Jakarta. Sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Koman-



Fauzi Bowo dan Prijanto saat tampil di Tugu Proklamasi, Jakarta.

foto: repro indopos

dan Korem 051/Wijayakarya, Kepala Staf Garnizun (Kasgar) Ibukota Jakarta dan Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya.

Tawaran sebagai cawagub DKI Jakarta, menurut Prijanto datang dari Fauzi Bowo melalui KSAD Jenderal TNI Djoko Santoso. Pria berusia 56 tahun ini juga menyatakan telah mendapatkan izin dari Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto. Dia pun telah mengajukan pensiun. Karena sesuai ketentuan di TNI tidak boleh ada rangkap jabatan.

Gubernur Sutiyoso menilai pasangan kepala daerah yang berlatar belakang sipil – militer merupakan kombinasi yang paling ideal untuk memimpin DKI Jakarta. Menurutnya, Jakarta sebagai barometer stabilitas nasional harus dipastikan aman oleh pemimpin yang berkarakter tegas dan mengerti pola stabilisasi wilayah, yang biasanya didapat dari kalangan

militer. Sedangkan pemimpin dari kalangan sipil diperlukan karena memiliki kemampuan manajerial dan birokrasi yang lebih baik.

Sutiyoso yang akan mengakhiri masa jabatannya yang kedua tahun ini merestui pencalonan Prijanto yang merupakan

pilihan pribadi Fauzi. Namun dia menolak anggapan kalau pencalonan Prijanto merupakan tekanan darinya kepada Fauzi. Bang Yos bahkan secara tegas menyatakan dirinya tidak ingin campur tangan dalam masalah pencalonan pilkada DKI Jakarta. “Saya kenal semua jenderal yang dicalonkan sebagai wakil gubernur, tetapi saya tidak memaksakan satu pun menjadi cawagub,” katanya.

Dengan dideklarasikannya pasangan Fauzi Bowo – Prijanto, maka sudah tiga pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta yang disampaikan ke publik. Pasangan lainnya itu adalah Adang Darajatun – Dani Anwar yang diusung PKS dan pasangan Sarwono Kusumaatmadja – Jeffrie Geovanie. Namun pasangan Sarwono – Jeffrie masih harus melengkapi dukungan dari partai lain selain PAN dan PKB. ■ RON, SP

JADWAL PILKADA DKI 2007

- ▶▶ 1- 7 Juni KPUD DKI Jakarta membuka pendaftaran bagi para calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung oleh partai politik.
- ▶▶ 8 -15 Juni: KPUD DKI Jakarta melakukan pemeriksaan berkas yang diserahkan Cagub dan Cawagub.

- ▶▶ 16 Juni: Semua Cagub dan Cawagub yang telah lolos verifikasi ditetapkan sebagai pasangan calon secara resmi oleh KPUD DKI Jakarta.

- ▶▶ 22 Juli-4 Agustus: Para Cagub dan Cawagub akan menjalani kampanye tatap muka dengan warga Jakarta.

- ▶▶ 5 Agustus-7 Agustus: Hari tenang. Semua atribut kampanye para kandidat dibersihkan baik berupa spanduk, pamflet, maupun bendera-bendera.

- ▶▶ 8 Agustus : Pemungutan suara.

Sumber: KPUD DKI Jakarta

PPRC TNI Kuasai Tarakan

Sekitar 2.200 personil Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI dilibatkan dalam latihan gabungan Kilat XXIII di Tarakan, Kalimantan Timur. Latgab ini punya nilai strategis meningkatkan profesionalitas prajurit TNI. Sekaligus uji coba menjelang latihan besar TNI tahun 2008.

Kota Tarakan, Kalimantan Timur yang merupakan bagian terluar wilayah Indonesia diduduki musuh. Untuk merebut kembali wilayah NKRI tersebut segera dikerahkan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI. Sekitar pukul 03.15 WITA pasukan Marinir di bawah hujan deras menyusup ke Tarakan lewat dua arah. Satu tim menyusup lewat Pelabuhan Tengkeyu I dan tim lainnya lewat Dermaga Kayu Lingkas Ujung.

Sukses menyusup, tim memberi sinyal cahaya merah bagi pasukan Amphibi untuk mendarat. Sekitar 1.000 pasukan Marinir yang tergabung dalam operasi amphibi dengan penuh kewaspadaan bergerak ke bibir pantai untuk mencapai Dermaga Kayu. Kehadiran pasukan ini disambut "lawan". Kontak senjata pun tak terelakkan. Setelah 15 menit bertempur, pasukan 'lawan' menyerah. Bersamaan dengan itu sekitar 600 anggota pasukan Batalyon Lintas Udara 502 Divisi II Kostrad diterjunkan dengan pesawat Hercules TNI AU untuk merebut Bandar Udara Juwata. Dalam waktu singkat, pasukan 'lawan' dapat dilumpuhkan dan wilayah Tarakan, termasuk Bandara Juwata dapat dikuasai kembali.

Itulah skenario latihan gabungan PPRC TNI Kilat XXIII yang digelar di Kota Tarakan selama enam hari, 19 hingga 24 Mei lalu. Melibatkan 2.200 personel gabungan dari unsur TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Mencakup pasukan Batalyon Linud 502/Kostrad, Marinir, dan Pas-khas, dengan mengerahkan peralatan perang seperti 6 kapal perang, 3 pesawat tempur F 16, dan 10 pesawat Hercules untuk penerjunan pasukan. Latihan ini bertujuan untuk mencapai kesiapsiagaan operasional yang tinggi serta terciptanya sistem K3I secara optimal.

Seperti ditegaskan Panglima TNI Marskal TNI Djoko Suyanto dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Wakasad Letjen TNI Herry Tjahjana pada upacara penutupan latihan, kegiatan ini memiliki bobot yang penting dengan nilai strategis bagi upaya meningkatkan profesionalitas prajurit TNI. Melalui geladi lapangan ini Komando PPRC akan memiliki konsep rencana operasi yang sudah diuji untuk

ini perhatian pemerintah tertuju kepada daerah perbatasan, maka TNI perlu pula meningkatkan dan memantau tingkat kerawanan yang mungkin ada.

Selain itu, terpilihnya Tarakan juga menyangkut pelaksanaan latihan besar TNI yang akan dilakukan tahun 2008 mendatang. Latgab PPRC TNI Kilat XXIII



foto: dok. pen kostrad

Penerjunan pasukan PPRC di Tarakan.

menghadapi kemungkinan kontijensi dan bentuk ancaman militer yang dapat membahayakan kedaulatan negara.

Garda Terdepan

Meski latihan-latihan PPRC dilaksanakan di wilayah perbatasan seperti di Tarakan atau Natuna, Letjen TNI Herry Tjahjana menyatakan itu bukan unjuk kekuatan atau ancaman terhadap negara lain. "Ini latihan rutin. Bagaimana pun juga, tugas TNI antara lain menjaga kedaulatan dan keutuhan negara," tegasnya menjawab pertanyaan wartawan.

Soal digelarnya latihan di Tarakan, kawasan ini merupakan garda terdepan wilayah NKRI dengan negara tetangga. Dengan demikian perlu dikenali medannya agar dalam kurun waktu tertentu bila ada ancaman dari pihak luar, prajurit TNI bisa mendeteksi lebih dini dengan terjadinya kontijensi tersebut.

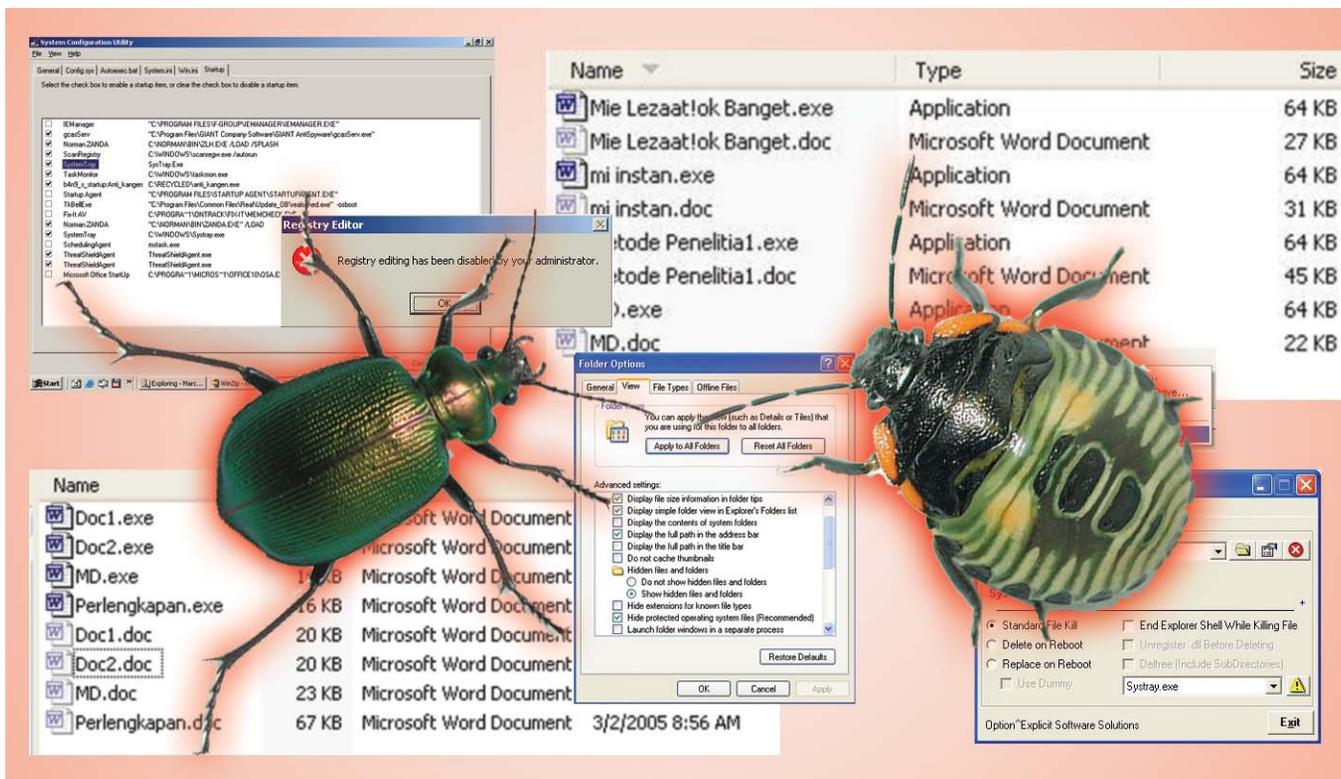
"Tidak ada kepentingan apa-apa, latihan besar ini bisa dilakukan di mana saja," kata Tjahjana. Hanya saja, karena saat

ini akan dijadikan sebagai ujicoba medan guna memantapkan kota Tarakan sebagai wilayah yang akan digunakan dalam latihan gabungan TNI 2008 tersebut.

Letjen TNI Herry Tjahjana menambahkan, dalam pelaksanaan Latgab tahunan ini pihaknya sudah memperhitungkan segalanya, termasuk kerusakan lingkungan yang selama ini sebagian orang mengkhawatirkannya. Sehingga segala kemungkinan yang terjadi dapat segera ditangani.

Menurut Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Erwin Sudjono, ada dua kriteria pemilihan lokasi latihan PPRC. Yakni, daerah itu sebelumnya jarang menjadi lokasi latihan atau merupakan bagian dari pulau terluar Indonesia. "Pulau-pulau terluar perlu juga kita amankan. Tarakan juga bagian dari pulau terluar, jadi perlu juga latihan di sini," katanya.

Dia juga menyebutkan, PPRC memiliki kemampuan untuk diterjunkan di daerah manapun di Indonesia dalam tempo maksimal 24 jam sejak diperintahkan. ■ **RON, SP**



Membasmi Tuntas V

Anda bingung mencari cara membasmi virus-virus lokal yang makin ganas dan membandel? Ini solusinya.

Menyebarkan! Satu kata untuk virus-virus lokal yang makin menganas tahun ini. Bagi mereka yang akrab dengan warnet dan *flashdisk*, kehadiran virus lokal yang kian santer mengusik pengguna komputer di Indonesia sejak tahun 2003 ini sudah cukup sering membuat pusing kepala.

Virus-virus lokal mempunyai ciri khas yang bisa langsung dikenali. Pada awal kemunculannya, virus-virus lokal ini hanya memalsukan *icon* MS Word atau *icon* Folder dan tak mengubah "tipe" file sehingga pengguna komputer bisa langsung mengidentifikasi bahwa file atau folder palsu tersebut adalah virus yang menyamar dengan *icon* MS Word atau folder. Dalam per-

kembangan selanjutnya, selain *icon* file dipalsukan, virus juga mengganti "tipe" file .exe (executable) menjadi File Folder sehingga siapapun sulit mengenali apakah folder tersebut adalah virus atau folder asli.

Virus-virus lokal juga secara aktif melakukan manipulasi terhadap *registry system* dan menonaktifkan (*disable*) beberapa *tools* di Windows seperti *Regedit.exe* (*registry editor* yang sering digunakan untuk membersihkan virus), *Cmd.exe* (untuk menjalankan perintah dos seperti *Attrib*), *taskmgr.exe* (*task manager* untuk mematikan/menutup aplikasi/proses yang sedang aktif), *Folder Options* (virus akan menset komputer untuk "Do not show hidden files and folders"), *System Restore*, *Notepad*, *Shutdown*, *Run*,

Find dan klik kanan mouse. Bandelnya lagi, hampir semua virus lokal ini tetap aktif meski komputer digunakan dalam status *safemode*.

Pada umumnya virus lokal dibuat menggunakan bahasa

pemrograman "sejuta umat" Visual Basic. Pada virus-virus generasi awal, virus lokal bisa dibasmi dengan teknik menghapus file *MSVBVM60.DLL* yang berfungsi menjalankan Visual Basic. Teknik ini segera

Cegah Virus Masuk Lewat Flashdisk

Cara efektif mencegah penyebaran virus lokal yang memanfaatkan fitur *autorun* adalah dengan mematikan fungsi *autorun* pada semua *drive* di komputer. Bisa melalui *registry system*, *group policy* atau melalui aplikasi tambahan *Tweak UI* *Powertoy*s *Setup*. Cara paling mudah melalui *registry system*:

1. Klik menu [Start | Run | pada dialog box RUN ketik *regedit*]
2. *Browse* ke alamat *registry* berikut:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
3. Kemudian klik kanan pada string *NoDriveTypeAutoRun*.
4. Isi value data dengan *ff* yang berarti fungsi *Autorun* akan dimatikan pada 255 drive.
5. Klik Tombol [OK].
6. Keluar dari "Registry Editor".
7. Restart komputer agar perubahan ini berjalan. ■

diatasi oleh para pembuat virus dengan melakukan *backup* atas file MSVBVM60.DLL pada direktori lain dan akan melakukan otomatis loading jika MSVBVM60.DLL dihapus.

Sepak terjang virus-virus lokal ini juga terus berkembang. Pada awal kemunculannya, virus hanya aktif bila pengguna mengklik file yang terinfeksi virus di dalam *flash-disk*. Namun sekarang, semenjak kemunculan virus W32/Aksika (4k51k4), virus sudah aktif otomatis tanpa harus menunggu interaksi dari pengguna. Virus didesain sedemikian rupa agar bisa memanfaatkan fitur *autorun* pada *flashdisk* seperti pada hardware lain (CD/DVD ROM). Jadi, saat *flashdisk* ditancapkan ke slot USB di komputer, saat itu pulalah virus aktif lalu berulah menggrogoti sistem komputer.

Ulah virus-virus lokal ini pun bermacam-macam. Ada

membasmi program antivirus tertentu (Dago), membuat file duplikat bervirus yang 'sangat mirip' dengan file dokumen MS Word (Kangen), dan menginfeksi file-file yang ber ekstensi .exe (Bacalid).

Meski virus-virus lokal ini mudah dikenali ciri khasnya, tidak halnya dengan berbagai *software* antivirus populer buatan luar negeri yang sudah banyak digunakan. Berdasarkan pengalaman *Berita Indonesia*, berbagai *software* antivirus populer memang handal mengatasi virus-virus populer di dunia, namun untuk membasmi virus-virus lokal, sebagian besar antivirus ini gagal mendeteksi virus dan tidak tuntas membersihkan sistem yang telah dijangkiti virus. Antivirus masih menyisakan beberapa *file* virus di *harddisk*, situs yang masih terblok, pesan *registry error*, *Folder Options* yang masih menghilang, hingga virus yang bisa aktif

Virus Lokal

virus yang membuat komputer *restart* terus-menerus meski komputer dalam status *safe-mode* (Kumis dan Rontokbro), membuat Windows XP tidak bisa *login* sekalipun *username* dan *password* yang benar sudah dimasukkan (Flu Burung),

kembali. Ada memang *software* luar bernama Norman Virus Control yang sangat direkomendasikan oleh vaksincom untuk membasmi virus-virus lokal. Sayangnya antivirus ini juga berbayar dan masih memiliki *interface*

PC Media Anti Virus (PCMAV)

Situs: pcmedia.co.id

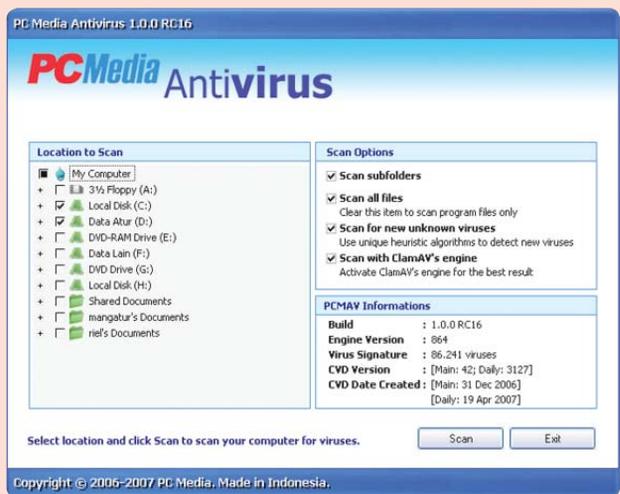
About: PC Media yang dimotori Anton R. Pardede mengklaim bahwa PCMAV buatan timnya sanggup membasmi virus lokal hingga ke akar-akarnya termasuk virus Brontok yang dikenal sulit diberantas karena mengganti file dan *key*-nya secara acak. Semenjak *launching* pertama kali akhir Maret 2006, PCMAV sudah menjadi *software* antivirus lokal yang ditunggu-tunggu versi terbarunya setiap bulan.

Ukuran File: 733 KB.

Platform: Microsoft Windows.

Harga: Software ini gratis dan tidak perlu diinstal.

Ulasan: PCMAV hingga Juni 2006 sudah memasuki versi R16. Sama seperti OgAV, selain memanfaatkan *engine*-nya sendiri untuk membasmi virus lokal, PCMAV memanfaatkan database antivirus ClamAV yang *open source*. Oleh sebab itu, PCMAV juga mampu mengatasi virus-virus populer di dunia. Tim PC Media masih mengembangkan pendeteksian heuristik yang unik agar PCMAV mampu mendeteksi virus-virus baru yang belum sempat diidentifikasi dalam *signature* antivirus. Sebelum memeriksa *file* yang ada di *drive* tujuan, PCMAV akan memeriksa *memory*, lalu *registry*. PCMAV yang memiliki tampilan cukup bagus ini menawarkan sejumlah pilihan seperti *scan subfolders*, *scan all files*, *scan for new unknown viruses*, dan *scan with ClamAV's engine*. ■



Ognizer Anti Virus (OgAV)

Situs: ognizer.net

About: Sebuah komunitas bernama Ognizer menawarkan sejumlah *software* gratis yang bisa meningkatkan efisiensi, produktivitas dan keamanan komputer. Dalam bidang keamanan dibuatlah *software* antivirus OgAV yang pertama kali dikenalkan ke publik pada Februari 2007 lalu. OgAV juga sudah lulus tes oleh Softpedia, satu lembaga yang memeriksa keabsahan satu aplikasi secara internasional.

Ukuran File: 749 KB.

Platform: Microsoft Windows.

Harga: Software ini gratis dan tidak perlu diinstal.

Ulasan: Tampilannya dominan warna abu-abu dan biru dengan tombol (*button*) ala MacOS. Fitur standar untuk men-*scan drive* atau folder berdasarkan pilihan pengguna juga disediakan. Antivirus ini menyediakan *update* definisi (*signature*) virus yang bisa didownload dari situsnya. Antivirus yang dibuat oleh Bobby Erlanto ini baru memasuki versi 0,1 Beta 4 awal Maret lalu namun sudah mampu mendeteksi 105.000 jenis virus yang bertebaran di internet. Sama seperti PCMAV, kemampuannya mendeteksi hingga ratusan ribu virus didukung oleh database antivirus ClamAV. OgAV juga mampu men-*scan*



file-file yang berada di dalam jaringan *local area network* (LAN) dan bisa mengkarantina *file-file* yang ditengarai sebagai virus meski belum terdapat dalam daftar definisi virus. ■

(tampilan) yang kurang menarik.

Kegagalan antivirus populer buatan luar negeri ini membuat pengguna komputer di tanah air bertanya-tanya, apakah ada software antivirus gratis yang cukup handal membasmi virus-virus lokal. Dulu sempat beredar software antivirus keluaran majalah Mikrodata, MAV/Mikrodata

Antivirus.

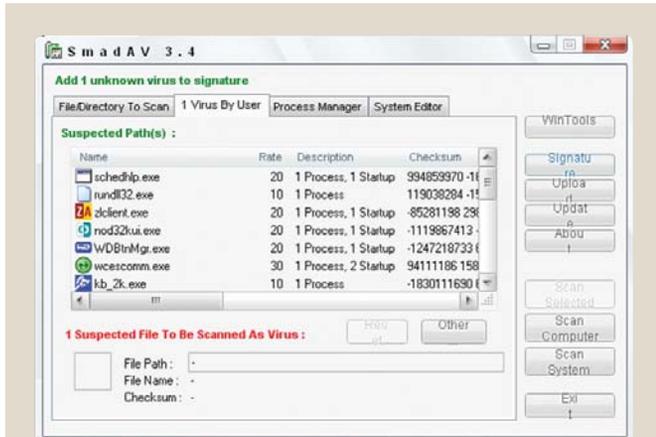
Begitu pula majalah komputer populer CHIP pada awal-awal terbitnya juga sempat merilis antivirus buatan sendiri, spesifik untuk virus-virus tertentu. Namun, dalam perjalanannya, software-software antivirus buatan lokal mengalami stagnasi dan tidak banyak dikenal orang.

Syukurlah, seiring dengan

makin maraknya virus-virus lokal ini, marak pula kehadiran software antivirus lokal yang cukup handal membasmi virus lokal. Berdasarkan penelusuran *Berita Indonesia*, software antivirus yang cukup dikenal sekarang adalah PC Media Anti Virus (PCMAV) keluaran Majalah PC Media.

Software antivirus yang *launching* sejak setahun lalu

dan terus diperbaharui ini biasanya disisipkan dalam dalam bonus CD/DVD setiap kali majalah PC Media terbit. Ada pula Ognizer Anti Virus (OgAV) yang kemampuannya tidak kalah bahkan mirip dengan PCMAV. Sebagai pe-lengkap, kita juga bisa memanfaatkan Smada AntiVirus (SmadAV), dan CompactByte Antivirus (CAV). ■ MLP



Smada AntiVirus (SmadAV)

Situs: smadav.co.nr

About: Software antivirus lokal buatan Zainuddin Nafarin yang sekolah di Palangkaraya ini dikhususkan untuk mengatasi virus-virus lokal ataupun mancanegara yang beredar di Indonesia. Nafarin kelahiran September 1990 ini mengklaim antivirus buatannya menggunakan *engine* antivirus-nya sendiri dan ditambahkan dengan algoritma heuristik sehingga varian virus (baik varian terbaru ataupun varian lama) yang belum ada di database SmadAV dapat dideteksi dengan mudah.

Ukuran File: 144 Kb.

Platform: Microsoft Windows (khususnya Windows 2000 dan Windows XP).

Harga: Software ini gratis dan tidak perlu diinstal.

Ulasan: Dari segi tampilan, SmadAV terbilang standar dan masih perlu banyak perbaikan. Teks yang menjadi label tombol (*button*) tersusun tidak rapi. SmadAV yang sudah memasuki versi 3.4 ini menawarkan sejumlah menu dalam bentuk *tab* yaitu File/Directory To Scan, 1 Virus by User, Process Manager, dan System Editor. Selain itu disediakan juga menu untuk mengakses *registry editor*, *system configuration utility* (msconfig) dan *task manager*. Saat melakukan *scan drive* atau folder misalnya, pengguna disajikan informasi tentang virus apa yang terdeteksi, nilai *registry* apa saja yang sudah diubah atau ditambah oleh virus, dan file atau folder apa saja yang disembunyikan oleh virus. Berdasarkan informasi *signature* antivirus ini, terdapat 316 virus lokal populer yang sudah bisa dideteksi diantaranya Aksika, Babon, Bacalid, Brontok, CoolFace, Jablay, KamaSutra, Kangen, Lapindo, MariaEva, dan MyBro. ■



CompactByte Antivirus (CAV)

Situs: compactbyte.com/cav/

About: CompactbyteAV (CAV) yang dibuat oleh Yohanes Nugroho ini ditujukan sebagai antivirus lengkap seandainya antivirus lokal lainnya gagal mendeteksi virus lokal. Oleh karena itu, Yohanes menganjurkan untuk *scan* dulu komputer dengan antivirus utama sebelum menjalankan CAV.

Ukuran File: 90 Kb.

Platform: Microsoft Windows.

Harga: Software ini gratis dan tidak perlu diinstal.

Ulasan: Software antivirus berversi 0.94 ini dirilis 6 Maret 2007. Tampilannya terbilang standar dan minimalis. Pilihan untuk *scan* ada dua yaitu *scan all drive* secara otomatis dan *scan folder/drive* berdasarkan pilihan pengguna. Bila ada virus yang terdeteksi, software ini memberikan pilihan 'Ask Each Time', pengguna dimintai konfirmasi setiap kali virus ditemukan, 'Always Delete', software langsung menghapus virus tanpa ada konfirmasi dari pengguna, dan 'Ignore (report only)', software tidak membasmi virus hanya melaporkannya saja. Software ini juga bisa *scan file zip, rar, dan gz*. Selain itu, disediakan juga menu untuk memperbaiki sistem operasi. Misalnya menu untuk mengubah Windows Registration Info, memperbaiki *file association*, menampilkan kembali file atau folder yang disembunyikan oleh virus, dan menghapus file yang ditengarai mengandung virus meski virus tersebut belum terdapat dalam *signature* virus milik CAV. Antivirus ini sudah mengenali 172 virus lokal populer diantaranya Brontok, Armora, JagoanNeon, Borax, SitiNurhaliza, Dian Sastro, EmangEloh, GelasPecah, FluBurung, Kangen, Moonlight, PatahHati, Aksika, Aksika, dan Inul. ■





foto: berindo wilson

PSK, termasuk kaum waria, salah satu penyebab tingginya resiko penularan HIV/AIDS.

HIV/AIDS merupakan kasus yang sangat serius di Papua. Penularannya harus diminimalisir secepat mungkin. Sampai 31 Maret 2007, data dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua mencatat ada 3.252 kasus HIV/AIDS. Yang terbanyak di Kabupaten Mimika, sebanyak 1.182 kasus. Namun diperkirakan jumlah sebenarnya lebih besar, sekitar 11.000-12.000 kasus.

Begitu seriusnya Pemprov Papua menanggulangi penyebaran HIV/AIDS yang terus meluas ini, maka dialokasikan dana Rp 20 miliar untuk mengatasi HIV/AIDS. Prioritas yang mesti ditolong, tentunya para pekerja seks komersial (PSK) dan waria.

Anak-anak Rentan

Dengan kondisi sedemikian rupa, anak-anak di Papua menjadi rentan tertular HIV/AIDS. Karena itu World Vision Indonesia melalui Wahana Visi Indonesia (WVI) menggelar proyek Siaran (Sistem Informasi HIV/AIDS bagi Remaja dan Anak), di area Port Numbai dan Kabupaten Keerom.

haya HIV/AIDS.

Tim ini terdiri dari 20 siswa gabungan beberapa SMA dan SMK di Jayapura. Mereka datang ke sekolah-sekolah dan memberikan penjelasan mengenai bahaya dan cara mencegah HIV/AIDS dengan bahasa yang mudah dimengerti lewat *playback* teater dan *memperagakan Dance for Life* yang akan mengingatkan mereka untuk bertanggung jawab dan menjaga diri dari bahaya AIDS.

Tidak hanya melibatkan siswa SMA dan SMP saja, kampanye bahaya HIV/AIDS juga melibatkan mahasiswa. Seperti dilakukan pendeta Canon Gideon Byamugisha dari Uganda.

Pendeta Canon adalah pengidap HIV melalui transfusi darah, yang baru diketahuinya pada 1992. Kedatangannya ke Papua atas undangan World Vision Indonesia untuk membagikan pengalamannya sekaligus memberikan pemahaman bahaya virus mematikan itu kepada anak-anak muda di Papua.

Dia menekankan perlunya orang-orang yang terinfeksi virus ini untuk membuka diri.

Melawan AIDS di 'Puskesmas Turki'

HIV/AIDS merupakan kasus serius di Papua. Anak-anak dan remaja dalam situasi rentan.

Jika melintas dari arah Jayapura menuju Sentani menggunakan angkutan umum, sang sopir akan bertanya adakah penumpang yang turun di puskesmas. Jangan heran jika tak terlihat satupun puskesmas di lokasi itu. Sebab, yang dimaksud si sopir adalah 'pusat kesenangan mas-mas.'

Yang disebut puskesmas itu adalah pusat lokalisasi Tanjung Elmo, Sentani, Papua. Di tempat ini awalnya adalah tempat untuk merehabilitasi PSK. Kenyataannya berubah menjadi tempat transaksi seks. Nama lainnya adalah 'Turki', singkatan dari 'turun di kiri'. Sebab letaknya berada di sebelah kiri jalan jika datang dari arah Jayapura.

Banyaknya pekerja seks komersial, termasuk kaum waria, menjadi salah satu penyebab

tingginya risiko penularan HIV. Hal ini berbeda dengan Jakarta dimana angka pengidap HIV/AIDS terbanyak adalah pengguna jarum suntik. Apalagi seks bebas di Papua seringkali tidak menggunakan kondom.

Karena itu, pemerintah dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di Papua sangat gencar mengampanyekan pemakaian kondom, baik melalui baliho, poster, maupun iklan di radio. Bahkan juga menggunakan poster tim sepakbola Persipura dengan tulisan 'Kitorang Semua Pakai Kondom'. Poster-poster ini dipasang di tempat-tempat strategis, termasuk di Bandar Udara Sentani.

Proyek Siaran ini mendesak dilaksanakan karena UNAIDS/WHO melaporkan bahwa pada tahun 2005 sekitar setengah juta anak-anak di dunia yang berusia di bawah usia 15 tahun meninggal karena AIDS. Estimasi secara global pada tahun 2005, ada sekitar 2,3 juta anak sedang hidup dengan HIV/AIDS.

Upaya yang dilakukan Proyek Siaran antara lain dengan melibatkan anak-anak muda untuk memberikan pemahaman tentang bahaya HIV/AIDS kepada rekan-rekan sebayanya. Contohnya dengan menukarkan tim School's Tour yang datang ke sekolah-sekolah untuk mengampanyekan ba-

Menurutnya dengan melibatkan generasi muda sangat penting dilakukan agar sejak dini mereka terhindar dari penularan HIV/AIDS. Risiko terjadinya *lost generation* pun bisa dicegah.

Ada lima strategi promosi pencegahan yang dipaparkannya di depan anak-anak muda Papua. Antara lain memastikan mereka mendapat informasi yang tepat, menggunakan radio dengan mengundang dokter untuk siaran atau bisa menggunakan surat kabar, mengintegrasikan persoalan HIV/AIDS kedalam kurikulum pelajaran, melatih mereka sebagai kader sebaya untuk memberikan informasi kepada teman, dan setiap Jumat selama satu jam di semua sekolah diadakan diskusi mengenai HIV/AIDS. ■ RH



foto: repro figur

Setiawan Djody Kembali Ke Telkomsel

Sejak 1970-an Setiawan Djody dikenal sebagai pengusaha kapal tanker minyak. Lalu tahun 1995-an terbetik berita cucu Pahlawan Nasional HOS Cokroaminoto, yang juga budayawan ini rupanya salah seorang pemegang saham Telkomsel.

Telkomsel adalah perator kedua ponsel GSM, didirikan 26 Mei 1995. Awalnya sahamnya dimiliki oleh PT Telkom 77,7 persen, sisanya KPN Mobile 22,3 persen. Saham KPN Mobile ini secara bersama-sama dimiliki oleh perusahaan milik Djodi, Setdco Megacell Asia sebesar 5 persen, dan KPN Royal Dutch Telecom of The Netherlands sebesar 17,3 persen.

Dibangun dengan bercirikan karakter dan budaya Indonesia Telkomsel melejit menjadi entitas bisnis yang sangat prospektif. Tetapi di tengah jalan Djodi dengan terpaksa melepas kepemilikannya.

Sebab, akhir 2001 SingTel membeli seluruh saham milik KPN Mobile. Langkah SingTel berlanjut ke pertengahan 2002 membeli lagi saham milik Telkom sebesar 12,72. Karenanya SingTel Mobile, yang anak perusahaan Temasek Holdings asal Singapura ini merupakan memegang 35 persen saham Telkomsel, sisanya 65 persen dipegang PT Telkom.

Pria kelahiran Solo, 13 Maret 1949 ini mengatakan penjualan saham ketika itu dilatarbelakangi kesulitan likuiditas yang dialami KPN Mobile. Ditambah lagi dengan, "Situasi dan kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada saat itu belum kondusif," tuturnya.

Djodi mengatakan pada saat saham Telkomsel dijual, Setdco Megacell sudah menawarkan seharga 650 juta dollar AS. Setco sebagai bagian dari pemilik saham Telkomsel memiliki hak first right of refusal, menyatakan saat itu menyanggupi untuk membeli saham KPN tersebut.

Tetapi, "Akhirnya disetujui penawaran dari SingTel yang membayar sebesar 601 juta dollar AS untuk 22,3 persen saham Telkomsel." SingTel menawarkan lebih rendah tetapi justru dimenangkan ketika itu. Djodi menganggap transaksi itu tidak sah. Ia lalu menyurati pemerintah Singapura April 2007 lalu, sekaligus menyatakan minatnya membeli kembali apa yang menjadi haknya.

Karena itu belakangan ini mulai lagi ramai dibicarakan niat Setiawan Djodi untuk turun gunung membeli kembali semua saham asing yang ada di Telkomsel. Bahkan, uang 1,6 miliar dollar AS sudah disiapkan untuk membeli. Djodi mengungkapkan itu kepada pers, Minggu (20/5).

"Saya akan mengambil yang 22,3 persen, sedangkan saham yang 12,72 persen akan diserahkan kepada Telkom. Bagaimana nanti keputusannya, apakah akan dijual ke publik (*initial public offering/ IPO*), terserah saja," kata Djodi. Ia menilai kepemilikan SingTel pada Telkomsel, dan Singapore Technologies Telemedia di Indosat, sudah mengarah kepada monopoli telekomunikasi oleh Singapura. Karena saham kedua perusahaan tersebut dimiliki oleh Temasek Holdings. ■ HT

Hatta Rajasa Inisiator Perdamaian

"Dua gajah bertarung pelanduk mati di tengah-tengah", kata pepatah lama. Itulah kearifan yang memberi inspirasi kepada Mensesneg Hatta Rajasa, untuk berinisiatif mendamaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Ketua MPR RI HM Amien Rais.

Kedua tokoh negarawan itu sedang bertikai hebat terkait dengan isu dana kampanye ilegal pada saat berlangsung Pilpres 2004 lalu.

Bermula terungkapnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rokhmin Dahuri yang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Kabinet Gotong Royong menggelontorkan uang kepada setiap capres-cawapres. Hanya capres Amien Rais yang mengiyakan menerima dana itu. Dengan ketulusan pengakuannya, Amien sekaligus meminta pula agar hal yang sama diakui oleh capres lain yang juga terungkap turut dialiri dana nonbudgeter DKP. Tetapi Amien menambahi satu hal, ada pula aliran dana asing ke salah satu pasangan capres.

Nama SBY tak eksplisit disebut Amien. Tetapi rupanya SBY merasa terohok hingga membuat pernyataan bantahan keras di sebuah konferensi pers, berlangsung di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/5). Di kiri kanan SBY berdiri tegak Jubir Presiden Andi Mallarangeng, dan Mensesneg Hatta Radjasa. Dari Istana itulah SBY mengancam keras Amien.

Lalu media massa ramai memberitakan, termasuk memuat komentar balik Amien yang tetap konsisten untuk membongkar soal aliran dana DKP, direncanakan diungkap Minggu.

Suasana menjadi semakin memanas saja. Hingga timbullah opini, kondisi kenegaraan sudah layaknya seperti bunyi peribahasa dua gajah bertarung tetapi pelanduklah yang mati di tengah-tengah. Nasib rakyat menjadi taruhan apabila perseteruan tak segera diakhiri.

Lalu Esoknya, Hatta menghadap Presiden, melaporkan telah berkomunikasi dengan Amien, dan menyarankan agar SBY bersedia bertemu dengan mantan Ketua PP Muhammadiyah itu. Maka pada hari Minggu (27/5) berlangsunglah pertemuan singkat sekali, hanya selama 12 menit, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, beberapa saat sebelum Presiden bertolak ke Malaysia mengikuti forum pertemuan ekonomi Islam sedunia. Amien sendiri datang ke Jakarta dengan terbang langsung dari Yogya menuju Halim.

Pertemuan "secara adat" yang mendamaikan Amien-SBY baru terungkap ke media esoknya. Amien menggelar jumpa pers di rumahnya, di Pandeansari, Sawitri, Depok, Sleman, Yogyakarta. Beberapa saat kemudian Presiden

sa

an SBY-Amien



foto: berindo wilson

mengadakan jumpa pers mendadak tanpa tanya jawab di Kuala Lumpur, Malaysia. Potensi konflik antar dua negarawan besar akhirnya reda.

Tetapi peran Hatta Radjasa kelahiran Palembang 18 Desember 1953, politisi negarawan yang hidup religius ini hanya selintas saja disebut-sebut media. Mantan Ketua Senat Mahasiswa ITB Bandung yang membangun karir politik lewat Partai Amanat Nasioani (PAN), ini sangat mampu membedakan kapan mengabdikan kepada partai, kelompok, diri sendiri dan kepada negara.

Ia teguh memegang prinsip, "My loyalty to the party end when loyalty to the state began." Loyalitas Hatta kepada partai akan berakhir tatkala diminta mengabdikan kepada negara. Ketika dipercaya menjabat Menteri Perhubungan ia selalu muncul di setiap kecelakaan lalu lintas yang terjadi, hingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan dari sumber pertama sekaligus penanggung jawab tertinggi.

Hatta tak pernah lari dari tanggung jawab kendati pos Menhub sangat rawan untuk disabotase oleh lawan-lawan politik. Karena tanggung jawab pula Hatta tak pernah mau mundur dari Menhub, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden yang memiliki hak prerogatif. Maka pengagum Amien Rais, Bung Karno, dan Conrad Adenauer ini pun akhirnya naik pangkat diangkat menjadi Menteri Sekretaris Negara, sebuah pos yang sangat disegani. ■ HT



foto: berindo wilson

Akbar Tandjung

Dirikan Barisan Nasional

Masa depan politik Akbar Tandjung rupanya masih terbuka luas. Setelah disera-ang dari delapan penjuruan, lalu membuatnya harus melepaskan kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar pada Desember 2004, didirikannya Akbar Institute. Insinyur lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Jakarta, dan mantan Ketua Umum PB HMI ini lantas mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pascasarjana S-3 di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, mengambil jurusan ilmu politik.

Dan pada hari Minggu (20/5) di Tugu Proklamasi, suami Chrisnina Maharani ini terlihat mendeklarasikan Barisan Indonesia, disingkat Barindo. Ketua DPR RI periode tahun 1999-2004 ini duduk sebagai Ketua Dewan Pembina Barindo.

Di Tugu Proklamasi itulah Akbar menyatakan niat bersedia mengikuti konvensi Partai Golkar, untuk memilih calon presiden dari partai bentukan Orde Baru ini pada Pilpres 2009. Kata Akbar, kalau konvensi digelar, maka terbuka peluang bagi para calon, termasuk dirinya, untuk diusung Partai Golkar sebagai calon presiden. Tetapi sebelum itu Akbar masih akan mengevaluasi dan mempelajari aturan-aturan tentang konvensi, seperti yang pernah dilakukan Partai Golkar menjelang Pilpres 2004.

"Kalau memang peraturan perubahan tentang konvensi itu lebih objektif, lebih demokratis, lebih fair, saya akan memper-

timbangankan untuk ikut konvensi. Soal apakah akan berhasil atau tidak, kita lihat nanti," ujar ayah tiga orang putri ini. Ia wanti-wanti Barindo bukanlah kendaraan politiknya menuju Pemilu 2009. Juga membantah kabar dirinya akan disandingkan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Tetapi politisi negarawan kelahiran Sibolga, 14 Agustus 1945 ini tak menanggapi keinginan Partai Bela Negara (PBN), Eddy Hartawan, yang ingin menyandingkannya dengan Sutiyoso.

Begitu melepaskan kursi ketua umum Partai Golkar, Akbar segera menyebutkan hampir semua jabatan politik sudah pernah disandanginya. Jadi, tak lagi pantas ditanyakan kepadanya soal ambisi politik. Kearifan sebagai negarawan adalah ciri yang belakangan ini lalu ditunjukkannya di hadapan publik. Iapun memiliki penilaian positif tersendiri terhadap keberhasilan semua pemimpin bangsa.

Politikus piawai ini mengapresiasi mantan Presiden Soeharto berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan dan pemerintahan; Prof BJ Habibie meletakkan dasar perundang-undangan untuk pemilu demokratis; KH Abdurrahman Wahid mencitrakan lembaga kepresidenan sebagai lembaga milik rakyat, serta mendorong nilai egalitarianisme dan demokratis; Megawati Soekarnoputri mendorong program kerakyatan; dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong perdamaian, penegakan hukum, dan penghapusan utang luar negeri. ■ HT



foto: repro galtra

Hukuman diperberat karena kejahatan narkotika tergolong kejahatan berskala internasional.

Bikin Ekstasi Pasti Mati

Hukuman diperberat karena kejahatan narkotika tergolong kejahatan terorganisasi berskala internasional.

Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk memperberat hukuman tujuh terdakwa warga negara asing (WNA) kasus pabrik ekstasi di Desa Cemplang, Jawilan, Serang, Banten. Dua orang warga negara Indonesia selaku pemilik pabrik sudah dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Banten dan MA memperkuat putusan tersebut. Selain itu, MA juga memperkuat putusan atas tiga terpidana dalam kasus yang sama dan sudah dijatuhi pidana 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Banten.

Dalam konferensi pers, MA melalui juru bicaranya Djoko Sarwoko, memutuskan kenaikan hukuman tujuh WNA dengan pertimbangan Gerardus dan Atlaoui sebagai dalang. Keduanya merupakan tenaga ahli yang turut memproduksi, psikotropika golongan I secara terorganisir. Sementara kelima teknisi

asal RRC terbukti melakukan tindak pidana yang diatur UU Narkotika dan KUHP.

Djoko juga menyatakan, hal lain yang memperberat hukuman mereka adalah kejahatan narkotika tergolong kejahatan terorganisasi dalam skala internasional. Perbuatan itu mengakibatkan kerusakan parah terhadap generasi muda dan membuat kaum muda menjadi generasi yang bodoh.

Kedua belas terdakwa itu merupakan sindikat pabrik ekstasi dan sabu-sabu yang digerebek aparat pada 11 November 2005. Pabrik itu berlokasi di desa terpencil yang merupakan perbatasan Kabupaten Serang dan Lebak.

Pabrik ekstasi di Desa Cemplang itu merupakan yang terbesar ketiga di dunia setelah pabrik di Fiji dan China. Kapasitas produksinya mencapai 200 ribu butir ekstasi per hari. ■ RH

Nasib Saudara di Negeri Jiran

Sebanyak 297 warga negara Indonesia (WNI) terancam hukuman mati di Malaysia karena telah melakukan tindak pidana berat. Namun, pemerintah telah mengajukan *mandatory notification* untuk mendapatkan informasi tentang semua WNI tersebut.

Kuasa Usaha Ad Interim Indonesia di Malaysia AM Fachir, mengungkapkan, seluruh WNI kini tengah menghadapi proses hukum di Malaysia. Ada yang baru tahap penuntutan, persidangan, maupun sudah vonis. Delapan WNI sudah divonis pengadilan dengan pidana mati. Kasusnya narkoba, perampokan ataupun pembunuhan.

Tidak semua WNI bermasalah itu adalah tenaga kerja Indonesia (TKI), ada juga yang sedang melancong ke Malaysia lalu diketahui membawa narkoba. Seluruh narapidana itu hasil pendataan KBRI dari penjara di seluruh Kuala Lumpur.

Masalah hukum ini menjadi salah satu perhatian Presiden SBY dalam kunjungannya selama tiga hari di Malaysia. Dalam pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, Presiden meminta langsung *mandatory notification* yang disanggupi Pak Lah, sapaan akrab sang perdana menteri.

Saat ini di Malaysia terdapat lebih dari 1,2 juta tenaga kerja asal Indonesia. Dengan adanya *mandatory notification* itu, diharapkan WNI yang terlibat tindak pidana di Malaysia mendapatkan bantuan hukum dari KBRI. Sesuai praktik dan hubungan bilateral kedua negara, Presiden mengharapkan pemerintah Malaysia dapat memberi keringanan kepada para WNI itu. Meski tidak dibebaskan, setidaknya terhindar dari hukuman mati. ■ RH

Kronologis Hukuman:

1. Ben Sudrajad alias Beni Oei alias Tandil Winardi dan Iming Santosa alias Budi Cipto

- ▶▶ Vonis PN Tangerang: hukuman mati
- ▶▶ Vonis PT Banten: hukuman mati
- ▶▶ MA: hukuman mati

2. Zhang Manquan, Chaen Hoengxin, Jiang Yuxin, Gan Chun Nyi, dan Zhu Xuxiong

(WN RRC)

- ▶▶ Vonis PN Tangerang: 20 tahun penjara
- ▶▶ Vonis PT Banten: 20 tahun penjara
- ▶▶ MA: hukuman mati

3. Nicolaas Garnick Yosephus Gerardus (WN Belanda) dan Serge Areski Atlaoui (WN Perancis)

- ▶▶ Vonis PN Tangerang: seumur hidup

- ▶▶ Vonis PT Banten: seumur hidup
- ▶▶ MA: hukuman mati

4. Samad Sani, Arden Christian/Kevin Saputra, dan Hendra Raharja/Agus Andreas Indriyanto

- ▶▶ Vonis PN Tangerang: 15 tahun
- ▶▶ Vonis PT Banten: 20 tahun
- ▶▶ MA: 20 tahun

Komando Haram dari Balik Jeruji



Fenomena peredaran narkoba di dalam penjara bukan hal baru.

foto: repro media indonesia

Meski ditangkap dan dipenjara, para gembong narkoba masih leluasa mengendalikan jaringannya.

Jika dulu jaringan narkoba di Indonesia dikuasai orang-orang kulit hitam dari Nigeria, kini yang berkuasa adalah jaringan Nepal. Jaringan Nigeria hengkang pascaoperasi Paniki 2006.

Pada 26 Maret lalu, Satuan Unit Narkotika Mabes Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggerebek jaringan ini di Hotel Santika dalam sebuah operasi penyamaran. Seorang perempuan Indonesia dan seorang warga negara Nepal ditangkap. Seperti dilaporkan *Republika*, 2 Juni 2007, tim yang dipimpin Kombes Pol Siswandi, Kepala Unit II Narkotik Direktorat IV/Tindak Pidana Narkoba

Mabes Polri, menyita 650 gram sabu-sabu.

Belakangan, polisi mengetahui bahwa keduanya adalah kaki tangan bandar narkoba dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika, Cipinang, Jakarta Timur.

Peredaran narkoba yang dikendalikan dari penjara tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah lain. *Republika*, 28 Mei 2007, melaporkan penemuan 6,9 kilogram ganja, 168 butir ekstasi dan 1,4 kilogram sabu-sabu di Rumah Tahanan Kelas I Medaeng, Sidoarjo.

Kualitas narkoba yang ditemukan termasuk kelas I. Selain itu ditemukan plastik kemasan sabu-sabu, ganja dan

ekstasi, juga uang tunai senilai Rp 33,4 juta yang diduga hasil transaksi narkoba tersebut. Hal ini membuktikan ada proses distribusi narkoba dari Rutan Medaeng untuk dipasarkan di luar.

Narkoba juga ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun. Kali ini dilaporkan *Media Indonesia*, 2 Juni 2007. Narkoba yang ditemukan di LP tersebut antara lain paket sabu sebanyak 7,9 gram, 27 paket ganja, dan 14 butir obat-obatan yang diduga narkoba. Tiga orang narapidana diamankan karena diduga terlibat.

Operasi razia narkoba yang digelar jajaran Polda dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur itu juga dilakukan di LP Kelas I Lowokwaru, Malang, dan LP Kelas I Pamekasan, Madura. Razia tersebut berkaitan dengan terungkapnya produksi

dan peredaran narkoba di LP Medaeng, Sidoarjo.

Setelah penggerebekan di LP Medaeng yang dilakukan Jumat (25/5) itu, diamankan 12 tersangka. Salah satunya adalah sipir LP tersebut.

Fenomena peredaran narkoba di dalam penjara tampaknya memang bukan hal baru. Dari catatan BNN pada 2006, ada 80 bandar dan pengedar narkoba yang menjalani hukuman seumur hidup atau menunggu hukuman mati ditahan di LP Cipinang, LP Tangerang dan LP Salemba. Sebanyak 44 orang diantaranya masih mengendalikan transaksi narkoba dari balik terali.

Kombes Siswandi yang juga Kepala Pelaksana Operasi BNN mengatakan, sindikat peredaran narkoba yang dikendalikan dari balik jeruji penjara sudah berlangsung lama. Tidak hanya bandar, pengedar dan kurir yang menjadi napi pun bisa melakukannya. Modalnya cukup bisa berkomunikasi dengan dunia luar LP.

Caranya bisa dengan menggunakan HP atau meminta bantuan petugas keamanan atau sipir. Bisa juga melalui kerabat yang berkunjung.

Ada tiga cara penggunaan HP yang dilakukan napi. Pertama, napi memiliki HP dan *sim card*. Kedua, napi hanya memiliki *sim card*. Ketiga, tidak memiliki HP atau *sim card*, tetapi dipinjami petugas. Napi memberikan kompensasi kepemilikan HP Rp 100-400 ribu kepada petugas. ■ RH

Memutus Rantai Jaringan

Badan Narkotika Nasional (BNN) memberikan opsi agar para bandar dan pengedar yang sudah berada di dalam LP tidak lagi bisa mengendalikan jaringannya di luar penjara. Pertama, bandar dan pengedar mesti divonis mati atau seumur hidup dan harus dipisahkan dari dunia luar. Mereka bisa dipenjara di LP Khusus Narkotika di pulau Nusakambangan.

Kedua, hukuman diperberat bagi narapidana kasus-kasus tertentu. Pemerintah harus menyusun

RUU Antinarkoba sebagai gabungan dari UU Narkotika dengan UU Psikotropika, supaya tidak rancu.

Perlu diketahui, jumlah uang yang beredar dalam bisnis ini tidak tanggung-tanggung. Menurut catatan BNN, bisa mencapai Rp 12 triliun per tahun. Tidak heran jika petugas keamanan maupun sipir tergiur menjadi kaki tangan jaringan narkoba ini. Jika ada razia di dalam LP, jaringan tersebut sudah mendapat bocoran sehingga petugas seringkali

tidak menemukan barang bukti apapun.

Persoalan peredaran narkoba dari dan keluar penjara juga dipengaruhi oleh penempatan para narapidana di dalam LP. Bandar, pengedar dan kurir umumnya dicampur di satu LP, sehingga membentuk jaringan baru. Seringkali juga narapidana kasus narkoba dicampur dengan narapidana kasus non narkoba, sehingga menambah anggota baru sindikat. ■ RH

Korupsi BRR Tidak Diusut

Kasus yang kecil dan jarak yang terlalu jauh, membuat ongkosnya menjadi lebih mahal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami kendala dalam menangani kasus dugaan korupsi dalam Proyek Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias. Menurut Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki, kasus tersebut sudah diserahkan ke kejaksaan tinggi dan Polda Sumatera Utara.

Menurutnya, kasus korupsi BRR memang ada yang masuk ke KPK, namun tidak signifikan ditangani dilihat dari jumlah dan lokasinya. Jarak yang terlalu jauh, membuat ongkosnya menjadi lebih mahal. Sementara kasusnya pun termasuk kecil.

Namun demikian, seperti dilaporkan *Koran Tempo*, 31 Mei 2007, KPK tetap melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus tersebut dengan meminta laporan perkembangannya.

Dalam rapat dengar pendapat KPK dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir 2007, Komisi Antikorupsi menyatakan 22 kasus laporan dugaan korupsi di BRR tidak ditindaklanjuti. Sembilan lainnya masih dalam proses diperiksa KPK. Namun menurut Ruki, 22 kasus tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak



foto: repro tempo

Besarnya uang yang beredar di Aceh dalam rangka rehabilitasi dan konstruksi butuh pengawasan.

ditemukan indikasi korupsi.

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana rehabilitasi, KPK telah meminta Gubernur NAD menginventarisasi aset-aset dana bantuan pascatsunami. Besarnya uang yang beredar di Aceh dalam rangka rehabilitasi dan konstruksi itu membutuhkan pengawasan.

Gubernur NAD Irwandy Yusuf menjawab permintaan KPK dengan segera membentuk unit khusus yang langsung berada di bawah komandonya selaku gubernur. Unit itu bertugas meneliti kemungkinan kebocoran pelaksanaan bantuan dan menelusuri laporan dugaan penyelewengan.

BRR sendiri menyatakan komitmennya dalam pembe-

rantasan korupsi. Karena itu selain dengan KPK, badan ini juga bekerja sama dengan

Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal pengawasan penggunaan dana. ■ RH

Saksi Kunci Pembunuhan Munir

Setelah gonjang-ganjing pria berambut gondrong misterius yang disebut-sebut terlihat bersama mendiang Munir di Bandara Changi, Singapura, akhirnya polisi menetapkan si gondrong itu menjadi saksi kunci.

Pria gondrong yang kemudian diketahui bernama Ongen Latuihamalo itu kini mendapat perlindungan khusus dari polisi.

Setelah diteliti di laboratorium di Seattle, AS, disimpulkan oleh ahli toksikologi forensik bahwa terjadinya pembunuhan terhadap aktivis HAM tersebut adalah di Bandara Changi. Arsen yang masuk ke tubuh korban adalah jenis AS+3 dan AS+5. Intake arsen ke tubuh korban terjadi antara 8-9 jam sebelum kematian. Padahal, Munir meninggal dunia diperkirakan tiga jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schipol, Amsterdam, Belanda. Sementara waktu tempuh penerbangan Singapura-Belanda adalah 12 jam.

Karena itulah para saksi yang tampak bersama Munir saat transit di Singapura menjadi saksi kunci. Selain Ongen, disebutkan pula oleh saksi mata bahwa Pollycarpus Budihari Priyanto berada di dekat Munir saat di Changi. ■ RH

Hanya Koruptor yang Diburu

Persoalan perjanjian ekstradisi dengan Singapura masih terus bergulir. Tampaknya banyak yang mengira perjanjian ekstradisi itu mencakup pengembalian orang maupun aset yang dibawa kabur para koruptor.

Namun, menurut Direktur Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan Departemen Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, perjanjian ekstradisi itu bertujuan mengembalikan orang, bukan aset.

Hal itu berlaku umum di dunia internasional. Sementara itu pengembalian aset atau *asset recovery* diperlukan perjanjian terpisah.

Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ditolak untuk diratifikasi oleh mayoritas anggota DPR, karena dinilai hanya menguntungkan Singapura saja. Sikap itu bahkan didukung beberapa tokoh nasional.

Perlu diketahui, perjanjian ekstradisi yang

diteken 27 April 2007 itu bisa dibatalkan secara sepihak hanya dengan sebuah nota diplomatik, baik dari pihak Singapura maupun Indonesia.

Dalam setiap perjanjian ada klausul pengakhiran (*termination clause*) yang mengatur kapan suatu perjanjian berakhir dan bagaimana mengakhirinya. Perjanjian Indonesia dengan negara-negara lainnya juga dibuat dengan model yang sama, yakni *UN Model Treat on Extradition*. ■ RH

SCTV Music Awards 2007

Kejayaan Ungu

Bertema *Back to School*, SCTV menggelar SCTV Music Awards 2007 di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Jumat (25/5). Empat penghargaan diraih grup band Ungu di ajang tersebut, yakni untuk kategori Album Ngetop, Album Pop Rock Duo/Grup Ngetop, Album Religi, dan Video Paling Ngetop untuk lagu Andai Kutahu.

Kempat penghargaan itu mengukuhkan Ungu sebagai salah satu grup band terbaik di negeri ini. Keempat penghargaan itu mencakup lagu-lagu dalam dua albumnya, album religi Surga-Mu dan album pop rock Melayang.

Ungu mengalahkan beberapa grup band lainnya yang sejenis, seperti Samsons, Nidji, dan Ada Band. Bahkan untuk album serta lagu religi, Ungu mengalahkan grup Radja, Gigi dan



Empat penghargaan untuk band Ungu

foto: repro suara pembaruan

duet Opick-Melly Goeslaw.

Grup band pendatang baru, Letto, juga meraih penghargaan Pendatang Baru Ngetop lewat lagu Ruang Rindu di album perdana mereka Truth, Cry and Lie.

Bunga Citra Lestari tak menyangka malam itu akan mendapat kejutan yang manis. Pemain sinetron yang baru mengeluarkan album perdana Cinta Pertama ini meraih penghargaan Album Pop Solo Ngetop. Lagu Cinta Pertama dalam album ini memang sem-

pat merajai tangga lagu.

Kali ini Ratu Ngebor Inul Daratista juga harus menerima kekalahan dari Titi Kamal yang meraih penghargaan Album Dangdut Ngetop lewat album *original soundtrack* Mendadak Dangdut yang melejitkan lagu Jablay.

Acara ini digelar sebagai pemberian penghargaan versi penonton *SCTV* bagi album musik dengan penjualan rata-rata di atas 100 ribu kopi. Dipilih oleh pemirsas melalui SMS. ■ RH

Pemenang SCTV Music Awards 2007

▶▶ Album Dangdut Ngetop

Penyanyi : Titi Kamal
Lagu : Jablay
Album : OST Mendadak Dangdut

▶▶ Album Religi Ngetop

Penyanyi : Ungu
Lagu : Andai Ku Tahu
Album : Surga-Mu

▶▶ Album Pendatang Baru Ngetop

Penyanyi : Letto
Lagu : Ruang Rindu
Album : Truth, Cry and Lie

▶▶ Album Pop Solo Ngetop

Penyanyi : Bunga Citra Lestari
Lagu : Cinta Pertama
Album : Cinta Pertama

▶▶ Album Pop Rock Duo/Grup

Penyanyi : Ungu

Lagu : Tercipta Untukku
Album : Melayang

▶▶ Album Ngetop

Penyanyi : Ungu
Lagu : Andai Ku Tahu
Album : Surga-Mu

▶▶ Video Paling Ngetop

Penyanyi : Ungu
Lagu : Andai Ku Tahu

Belajar di Desa Bahasa

Mau kursus bahasa secara gratis? Datang saja ke Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di desa ini bahasa yang bisa dipelajari adalah Inggris, Jepang dan bahasa Kawi (Jawa kuno).

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo meresmikan desa tersebut sebagai Desa Bahasa, Minggu (28/5).

Seperti dilaporkan *Kompas*, (29/1), desa ini adalah desa bahasa pertama di Indonesia. Secara mandiri dan alamiah, masyarakatnya mengembangkan dan mempelajari tiga bahasa tersebut.

Jika kelak dalam perkembangannya desa tersebut bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, pemerintah pusat akan menjadikan Desa Ngargogondo sebagai Desa Bahasa percontohan nasional yang dapat ditiru desa-desa lainnya. Lokasi desa yang hanya 2 km dari kawasan wisata Borobudur diharapkan berdampak pada pendapatan dan perekonomian warganya.

Menurut instruktur dan pendiri Desa Bahasa Hani Sutrisno, secara informal program itu telah berlangsung sejak 1998, dengan tujuan agar penduduk di sekitar kawasan wisata Borobudur itu bisa meningkatkan pendapatannya dengan keterampilan berbahasa. Program terbuka bagi siapapun dan tidak terbatas pada warga Desa Ngargogondo saja. Semua orang yang ingin meningkatkan kemampuan bahasanya bisa ikut kursus di desa tersebut dengan gratis.

Sejak berdiri, jumlah peserta kursus mencapai sekitar 400 orang, dengan total pengajar 12 orang. Jumlah lulusannya saat ini sudah mencapai 300 orang, dan yang masih aktif belajar sekitar 116 orang. ■ RH

Ligaya Ita Tumbelaka

Menjodohkan Raja Hutan

Totalitasnya menangkan harimau patut diacungi jempol. Satu-satunya perempuan yang menjadi *studbook keeper* harimau Sumatera.

Bagi orang awam, tugasnya kelihatan mudah. Padahal sebenarnya sangat sulit. Bayangkan betapa ruwetnya mengawinkan sepasang harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) agar bisa menghasilkan anak-anak harimau yang sehat, kuat dan berkelitas unggul.

Dr Ligaya Ita Tumbelaka, adalah satu-satunya perempuan Indonesia yang tercatat sebagai *studbook keeper* regional harimau Sumatera. Tantangannya sebagai 'mak comblang' antara lain tak semua harimau unggul mau dikawinkan. Bisa saja pasangan itu malah saling cakar dan mengakibatkan kematian.

Oko, demikian dia biasa disapa, menikmati pekerjaannya itu. Berkat usahanya, jumlah populasi harimau Sumatera yang di alam bebas hanya tinggal sekitar 600 ekor bertambah dengan lahirnya anak-anak harimau di penangkaran. Pada 1997, lahir tiga ekor anak harimau di Medan dan empat di Surabaya. Pada 1998, ia berhasil membantu kelahiran tujuh ekor anak macan loreng di Taman Safari Indonesia di Cisarua, Bogor.

Kecintaannya kepada hewan berawal sejak dia dilahirkan. Oko lahir di hutan, saat kedua orangtuanya bergerilya di tengah hutan, bergabung dengan pemberontak PRRI/Permesta. Lulus SMA, dia memutuskan kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB) jurusan kedokteran hewan, kendati orangtua-

nya menginginkan dia masuk fakultas kedokteran umum.

Lulus dari IPB pada 1984, Oko melanjutkan studi ke Animal Science Department Oregon State University, AS. Lalu dilanjutkan belajar di Clinical Medical Research Center Bowman Grey School of Medicine, Wake Forest University.

Persentuhannya dengan harimau terjadi begitu saja. Awalnya, Oko mengambil spesialisasi penangkaran dan kesehatan satwa primata, khususnya orangutan. Suatu hari dosen pembimbingnya bertanya hewan apa yang paling ingin dipelajarinya, Oko langsung menjawab harimau.

Tahun 1992, Yansen Manansang, pemilik Taman Safari Indonesia yang juga Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Administrasi IPB menawarinya menjadi *studbook keeper* harimau Sumatera. Oko menerimanya dengan senang hati.

Menjaga Kualitas Genetik

Tugas Oko sehari-hari adalah menjaga agar tidak terjadi perkawinan sedarah dan hanya mengawinkan betina unggul dengan jantan unggul untuk menjaga kualitas genetik satwa.

Studbook harimau harus mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang setiap harimau dalam penangkaran dan sejarah hidupnya. Mulai dari nama, jenis kelamin, nama induk, tempat lahir, asal dan perkiraan usia. Data tersebut berguna bagi pengelolaan pe-



foto: repro gatra

nantangan.

Oko menggunakan perangkat lunak bernama SPARK (*single population analysis & record keeping record*). Program itu hanya bisa didapat jika menjadi anggota International Species Information System. Program ini terhitung unggul karena mampu menganalisis data, misalnya, untuk mengetahui *inbreeding coefficient* atau diagram silsilah harimau.

Agar data riwayat hidup harimau itu akurat, identifikasi diperkuat dengan memberi nomor *studbook* berupa tato pada tubuh harimau. Atau dengan memasang transponder (*microchip*) pada harimau yang bersangkutan.

Meski sudah dijaga sedemikian rupa, tetap ada kemungkinan perkawinan se-

darah terjadi. Bahkan ada yang koefisien *inbreeding*-nya mendekati angka 1. Makin besar angka koefisiennya makin dekat pertalian darah di antara pasangan. Kalau masih 0,1 atau 0,25 tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah sampai 0,5, termasuk gawat. Hal itu memang risiko yang harus dihadapi penangkaran harimau di luar habitatnya.

Karena itu, tidak mengherankan jika kedatangan harimau baru yang berasal dari alam ke penangkaran tersebut merupakan hal yang patut disyukuri. Sehingga garis keturunannya (*inbreeding*) nol.

Kesungguhan Oko menangkan satwa yang nyaris punah ini patut dipuji. Kecintaannya kepada harimau bahkan menular pada keluarganya dan didukung dengan sepenuh hati. ■ RH



Anggota NLD demonstrasi di Yangon menolak perpanjangan tahanan rumah Suu Kyi.

Junta Militer Tak Bergeming

Pemerintah Myanmar kembali menganggap angin lalu seruan komunitas internasional yang tak henti menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi.

Tujuh belas tahun lalu, 27 Mei 1990, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin tokoh prodemokrasi Suu Kyi memenangi pemilu Myanmar secara telak. Namun kemenangan itu tak pernah terjadi karena junta militer menganulir hasil pemilu ini dan menahan para aktivis politik termasuk Suu Kyi. Pada Mei 2003, iring-iringan mobil Suu Kyi yang akan melakukan kampanye diserang kelompok pro-junta sehingga ia beserta para pendukungnya ditahan, dengan tuduhan menjadi "ancaman keamanan". Sejak itu, Suu Kyi tak pernah mengecap kebebasan. Terakhir, ia sempat menghirup kebebasan pada bulan November 2006, yaitu ketika ia diijinkan mengunjungi dan bertemu selama satu jam dengan Delegasi PBB pimpinan Ibrahim Gambari. Praktis, Suu Kyi (61), pemenang Nobel Perdamaian tahun 1988, menjalani 11 dari 17 tahun terakhir hidupnya dalam penahanan, di penjara maupun tahanan rumah.

Tahanan rumahnya yang berakhir Minggu (27/5) kembali diperpanjang selama satu tahun. Selain memperpanjang masa tahanan Suu Kyi, junta juga masih menahan sekitar 1.200 aktivis prodemokrasi. Padahal komunitas internasional sudah berulang kali menyerukan agar junta militer membebaskan Suu Kyi. Seruan itu juga secara terus-menerus didengung-



Aung San Suu Kyi

kan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kelompok senator perempuan AS bahkan menyerahkan surat kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon untuk menekan junta agar membebaskan Suu Kyi. Ibu Negara AS, Laura Bush, menghadiri peresmian kaukus perempuan untuk Myanmar tersebut. Hal serupa juga dilakukan 59 pemimpin internasional, yang mengirim surat ke pemimpin Myanmar, Jenderal Than Shwe, untuk

pembebasan Suu Kyi. Mereka yang menandatangani surat itu di antaranya mantan Presiden AS George Bush senior, Jimmy Carter, Bill Clinton, mantan PM Inggris John Major dan Margaret Thatcher, mantan PM Pakistan Benazir Bhutto, serta mantan PM Perancis Lionel Jospin.

Diperpanjangnya masa penahanan Suu Kyi mengundang aksi protes sekaligus menyemangati Suu Kyi. Sekitar 300 anggota NLD, ditambah para mantan aktivis mahasiswa yang menyebut dirinya Generasi 88, berkumpul di markas NLD. Sebagian besar dari mereka mengenakan kaus bergambar tokoh perdamaian itu. Lilin-lilin dinyalakan dan sekitar 100 balon bertuliskan "Bebaskan Suu Kyi" dilepaskan ke udara. Sejumlah diplomat, di antaranya dari Perancis, AS, dan Australia, hadir dalam pertemuan yang lokasinya tak jauh dari kediaman Suu Kyi itu. Sejak penahanan Suu Kyi diperpanjang, penjagaan di sekitar rumahnya semakin diperketat, termasuk penggelaran barikade kawat berduri. NLD juga mengeluarkan pernyataan yang menuntut pembebasan Suu Kyi dan sekitar 1.200 aktivis partai yang ditahan.

Perpanjangan penahanan Suu Kyi telah menimbulkan kejengkelan sebagian besar komunitas internasional yang selama ini tak henti mengimbau junta militer, mulai dari cara halus sampai penjatuhan embargo, untuk membebaskan Suu Kyi. Presiden AS, George W. Bush, misalnya, memperpanjang sanksi AS atas Myanmar berupa larangan investor AS menanamkan modal di Myanmar, melayani ekspor impor, serta mengimpor produk dari Myanmar. Namun, dampak embargo ekonomi terhadap Myanmar tak terlalu berarti karena negara yang kaya minyak dan gas itu belakangan ini menjalin kerja sama berskala besar seperti China, India, dan Thailand. China, yang merupakan sekutu dan mitra dagang utama Myanmar, selalu menolak mencampuri urusan domestik Myanmar. Pada Januari 2007 Rusia dan China bahkan memveto rencana PBB untuk memaksa Myanmar membebaskan semua tahanan politik. Seorang diplomat Asia di Yangon menuturkan, Myanmar tak merasakan adanya tekanan atau ancaman sepanjang Rusia, China, dan India tidak bergabung dengan Barat soal keadaan hak asasi manusia di Myanmar.

Diplomat itu memberi contoh soal sikap Rusia yang malah menawarkan bantuan untuk membangun reaktor nuklir air ringan, sementara Barat sudah mencoba menekan keras Myanmar. Rusia bersaing dengan India, China, dan Thailand untuk memanfaatkan kekayaan alam Myanmar demi pembangunan ekonomi. Belum lama berselang Rusia telah menandatangani kontrak eksplorasi minyak dan gas dengan rezim militer Myanmar. ■MLP

Rokok tercatat sebagai ‘pembunuh’ nomor dua di dunia. Ironisnya, kenyataan ini tidak membuat para perokok berhenti menghisap rokok.

Rokok telah menjadi hal biasa dalam kehidupan sehari-hari penduduk negeri ini. Meskipun secara norma masyarakat ada batasan umur untuk merokok, namun merokok tidak memandang umur dan status. Laki-laki-perempuan, anak sekolah, guru, jenderal, menteri, atlet hingga pelatih olahraga, siapa saja bisa menghisap rokok. Selain itu, rakyat Indonesia juga mempunyai kebiasaan merokok di sembarang tempat. Di sekolah, rumah makan, mal dan berbagai tempat umum tak ada area yang bebas asap rokok. Hal ini membuat semakin banyaknya jumlah ‘korban’ yang menjadi perokok pasif di Indonesia. Dengan kata lain, nikotin sudah menjadi sahabat bagi penduduk negeri ini.

Dari total populasi pria Indonesia, 69 persen diantaranya merokok. Presentase tersebut paling tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia, seperti Cina (53,4 persen) dan Thailand (29,4 persen). Para perokok di Tanah Air, berdasarkan sebuah penelitian lain, dapat menghabiskan 11 batang lebih rokok setiap hari. Berdasarkan Survei Kesehatan Nasional (Susenas) tahun 1995, sekitar 6 juta jiwa penduduk Indonesia terkena penyakit kronis akibat merokok, mulai dari jantung, paru-paru, kanker, impotensi dan gangguan kehamilan. Sekarang pun sudah terdeteksi banyak anak muda terkena penyakit paru-paru.

Bukan hanya Indonesia yang memiliki masalah dengan rokok. Masyarakat dunia juga diliputi masalah yang sama. Menurut sebuah survei, setiap delapan menit ada satu orang meninggal akibat merokok atau 180 orang meninggal dalam satu hari. Jika dihitung per tahun, jumlah orang yang “terbunuh” oleh benda berasap itu mencapai 65.700 orang. Untuk perokok pasif, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tiap tahun sekitar 700 juta anak-anak di dunia terkena asap rokok (perokok pasif). Anak-anak rentan terhadap asap rokok karena mereka menghirup udara lebih sering daripada orang dewasa. Organ anak-anak masih lemah dan rentan terhadap gangguan sehingga apabila terkena dampak buruk maka perkembangan organnya pun tidak sesuai dengan semestinya.

Pada tanggal 31 Mei 2007, seluruh dunia memperingati Hari Tanpa Tembakau. Peringatan yang bertepatan Smoke-Free



Larangan merokok di tempat umum masih belum tegas dilaksanakan.

Menabur Asap Menuai Maut

Environment atau Lingkungan Bebas Asap Rokok tersebut menjadi tanda ungkapan penghuni bumi ini yang merindukan dunia yang bebas tembakau karena asap rokok tercatat sebagai ‘pembunuh’ nomor dua di dunia. Ironisnya, kenyataan ini tidak membuat para perokok berhenti menghisap rokok. Perokok seringkali tetap terlihat asyik dengan diri mereka sendiri, menikmati keputihan asapnya.

Kendati ancaman kematian akibat rokok sangat tinggi, konsumsi tembakau di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi konsumsi tembakau terhadap total pengeluaran konsumsi makanan terus naik, yakni dari 8% pada 1996 menjadi 13,6% tahun 2003. Begitu dahsyatnya dampak yang ditimbulkan rokok, kampanye untuk tidak merokok di sem-

barang tempat bergaung di berbagai negara, termasuk Indonesia. Untuk menekan konsumsi tembakau, pemerintah terus menaikkan harga jual eceran (HJE) rokok, tetapi kebijakan itu tak banyak membawa hasil karena industri rokok telah menyumbang triliunan rupiah ke kas negara, selain menyerap banyak tenaga kerja. Pada 2005, pemerintah bahkan berani memasang target penerimaan cukai di atas Rp 30 triliun dan pada 2007 dinaikkan lagi menjadi Rp 42 triliun.

Industri rokok bak di persimpangan jalan. Kalau dilarang, daftar pengangguran akan makin panjang. Padahal saat ini terdapat 11 juta rakyat yang masih menganggur. Namun kalau dibiarkan, Indonesia akan kehilangan generasi muda yang sehat, cerdas dan produktif yang berpotensi memajukan negara. Sikap



pernah ada sanksi kepada yang melanggar,” ujarnya merujuk pada implementasi Perda DKI Jakarta tentang larangan merokok di tempat umum.

Apa yang membuat para perokok ini sangat sulit untuk melepaskan diri mereka dari rokok? Apakah mereka tidak tahu bahwa dalam satu batang rokok terdapat 4.000 jenis bahan kimia, 40 jenis di antaranya bersifat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker)? Apakah mereka tidak membaca peringatan yang terempel di bungkus rokok yang menyebutkan penyakit-penyakit yang dapat disebabkan karena menghisap rokok?

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Menaldi Rasmin, mengatakan bahwa jika rokok belum dianggap sebagai ancaman kesehatan maka jumlah konsumsi rokok dapat terus bertambah. Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia, menurut Menaldi, ditunjukkan saat mereka berobat. “Bila sakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan, seperti batuk, pasien Indonesia yang merokok hanya menanyakan virus apa yang menyerang mereka. Mereka biasanya mengelak bila ditanyai soal kebiasaan merokok,” tuturnya. Berbeda dengan pasien dari negara-negara maju yang kerap bertanya soal serangan batuk dengan kebiasaan merokok.

Keterbukaan pasien, kata Menaldi, membuat para dokter di mancanegara lebih mudah berdiskusi mengenai bahaya rokok bagi kesehatan. Padahal, berdasarkan data, tidak sedikit perokok Indonesia yang mencoba berhenti melakukan kebiasaan itu. Setidaknya 30 persen perokok selama 1–5 tahun pernah mencobanya sekali.

Hambatan yang dihadapi para perokok itu memang cukup kuat sebab perlu

diperhatikan apakah tubuh perokok telah mengalami ketergantungan pada nikotin. “Nikotin sama berbahayanya dengan heroin ataupun amfetamin dalam masalah ketergantungan. Seharusnya para ulama memfatwakan haram untuk masalah ini,” ujar Menaldi.

Bila seorang perokok baru pada tahap gaya hidup, kata Menaldi, langkah untuk berhenti merokok sangat mudah. “Bergantung pada keinginan dan lingkungan yang mendukung,” ujarnya. Namun, bila sudah kecanduan nikotin, dibutuhkan *nicotine replacement therapy* (NRT), seperti pengganti nikotin dalam bentuk permen karet ataupun koyo.

Sebuah obat khusus antirokok baru-baru ini disetujui oleh Badan Pengawas

mendua dan tidak tegas dari pemerintah itu akhirnya menjadi lahan subur bagi kampanye industri rokok.

Fahmi Idris, sebagai menteri Perindustrian, juga tidak jelas sikapnya terkait bahaya yang ditimbulkan dari asap rokok. Meskipun bukan perokok, namun menurut Fahmi kebiasaan merokok ada positif dan negatifnya. “Banyak yang berpendapat, orang yang tidak merokok itu bisa hidup lebih sehat. Tapi, tidak jarang juga kita temui orang yang merokok justru bisa bertahan hidup lebih dari 80 tahun,” paparnya.

Namun, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wnandi menegaskan, pekerja yang banyak merokok lebih rentan terhadap penyakit sehingga mengurangi produktivitas kerja. “Susahnya, kalau kami larang dianggap melanggar hak asasi. Yang bisa dilakukan pengusaha adalah melarang pekerja merokok saat jam kerja,” ujar Sofjan yang mengaku tidak pernah merokok sejak kecil.

Untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia, kata Sofjan, langkah yang paling efektif adalah menegakkan aturan pelarangan merokok di tempat-tempat umum. “Sekarang aturan sudah ada, tapi pelaksanaannya tidak tegas dan tidak



Obat dan Makanan Indonesia. Obat ini berfungsi menekan rasa nyaman yang ditimbulkan nikotin pada reseptor otak. Dopamin yang timbul akibat masuknya nikotin pada otak digantikan oleh obat ini. Dosisnya akan diturunkan perlahan-lahan. “Persis seperti mengobati para pecandu narkoba,” ia menandaskan.

Berbagai terapi memang dapat digunakan, dari NRT hingga hipnosis. Namun, Menaldi mengingatkan agar pencegahan menjadi kunci utama menghadapi bahaya rokok. “Mencegah tak perlu keluar biaya sepeser pun dan lebih mudah penanganannya,” ucapnya.

Kita semua berharap, dalam memperingati Hari Tanpa Tembakau yang jatuh 31 Mei yang lalu, masyarakat belajar untuk memberikan apresiasi terhadap kesehatan. Semoga para perokok semakin sadar akan bahaya rokok dan tidak menganggapnya angin lalu. ■ MLP



Ketua Umum KONI Rita Sibowo: Terpilihnya Indonesia merupakan kesempatan untuk dapat lebih memacu peningkatan prestasi.

Indonesia Tuan Rumah SEA Games XXVI tahun 2011

Sebelas negara anggota Federasi SEA Games menyambut baik ditetapkannya Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games XXVI tahun 2011.

Indonesia tuan rumah SEA Games 2011, keputusan itu diambil setelah Singapura yang sebelumnya sudah terpilih menjadi tuan rumah SEA Games 2011 itu meminta mundur menjadi 2013. Dan seperti diketahui, kalau tuan rumah SEA Games XXV tahun 2009 adalah negara Laos.

Menyambut ketetapan itu, Ketua Umum KONI Rita Sibowo yang menghadiri rapat Dewan Federasi SEA Games di Nakorn, Thailand, saat ketetapan itu diambil mengatakan, terpilihnya Indonesia merupakan kesempatan buat Indonesia, dimana paling tidak untuk dapat lebih memacu peningkatan prestasi. Dukungan positif juga disampaikan pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini Menpora Adhyaksa Dault, mendukung sepenuhnya Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games 2011. Menurut Menpora, SEA Games itu akan menjadi momentum bagi kebangkitan kembali prestasi olahraga Indonesia dengan berupaya menjadi juara umum. Menurutnya, pada SEA Games 2007

ini, kontingen Indonesia bisa menembus empat besar saja sudah bagus. Tapi, dua tahun ke depan Indonesia harus bisa menaikkan peringkat ke posisi ketiga. Baru setelah itu menjadi yang terbaik pada tahun 2011. "Menurut saya, segala cita-cita itu bisa dipenuhi kalau saja kita lebih fokus dan konsisten. Dan untuk mendorong dua hal tersebut, kita harus membuat aturan mainnya, salah satunya yaitu, kesejahteraan atlet harus diperhatikan dan ditingkatkan," katanya seperti dikutip *Suara Pembaruan* (5/6).

Sementara daerah yang direncanakan menjadi penyelenggara pesta olahraga ini adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan. Dipilihnya empat provinsi tersebut menurut Rita Sibowo karena bandaranya yang sudah kelas internasional. "Salah satu syarat adalah bandaranya, yakni harus internasional. Semua mempunyai bandara internasional, kecuali Bandung. Namun, Bandung tetap bisa menggelar karena jaraknya tak jauh dari Jakarta," katanya. ■ **MS**

Ronaldinho Tak Prima

Pemain terbaik dunia 2004 dan 2005, Ronaldinho belakangan menunjukkan kinerja yang kurang baik. Kinerja pemain bernama lengkap Ronaldo de Assis Moreira kelahiran Porto Alegre Brasil, 21 Maret 1980 ini ditengarai menjadi salah satu penyebab menurunnya prestasi Barcelona, klub yang didukungnya sejak 2003, pada musim ini. Seperti diketahui, Barcelona kini hanya bisa menduduki peringkat kedua di liga Spanyol, di bawah Real Madrid. Bahkan, terancam digeser oleh Sevilla yang sudah menguntit di tempat ketiga. Ronaldinho yang sudah 126 kali memperkuat Barcelona dan menciptakan 60 gol dituntut berlatih lebih keras lagi. Seperti dikatakan Dunga, pelatih Timnas Brasil. "Kecepatan Ronaldinho kini berkurang. Daya dobraknya melemah, kecepatan yang memungkinkan dia lepas dari pemain lawan." Padahal kata dia, "Seorang Ronaldinho yang sedang dalam kondisi puncak mustahil bisa dihentikan lawan seperti terlihat pada musim lalu." Kondisinya yang demikian itu tidak hanya mengecewakan Barcelona, tapi juga Timnas Brasil. Baru-baru ini, pihak Barcelona meminta agar Ronaldinho jangan dulu memperkuat negaranya, Brasil, di Copa Amerika akhir Juni ini agar dia bisa mempersiapkan diri menghadapi La Liga musim depan. ■ **MS**



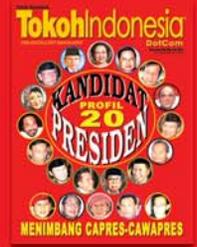
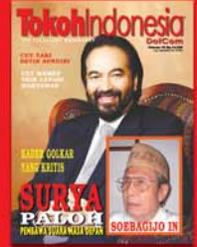
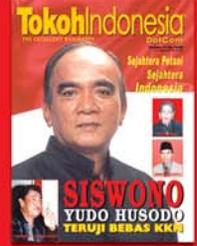
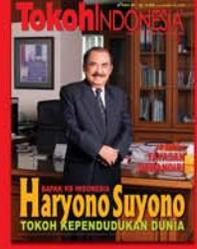
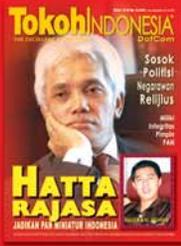
PON XVII Kalimantan Timur

Setelah sempat maju mundur, akhirnya KONI Pusat menetapkan jadwal penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII di Kalimantan Timur, yakni pada 6-18 Juli 2008. Kepastian jadwal yang tertuang dalam SK KONI Nomor 1460/U.MM/V/07 tertanggal 15 Mei 2007 tersebut menurut Ketua Umum KONI Pusat Rita Subowo diambil setelah mendengarkan pertim-

banggan dari Panitia Besar PON (PB PON) serta pertimbangan suara-suara dari KONI Daerah.

Sebelumnya, oleh Musornas KONI, pelaksanaan PON XVII ini ditetapkan Maret 2008, namun kemudian diundur menjadi paling cepat April 2008. Kemudian keputusan Musornas KONI itu akhirnya dijawab oleh PB PON dengan mengusulkan bulan Juli 2008. Pertimbangannya adalah, pada April

sampai Juni, Kaltim akan disibukkan Pilkada Kalimantan Timur. Penyelenggaraan PON akan diadakan di tujuh kota di Kaltim. Kota Samarinda akan menjadi pusat kegiatan PON dengan mempertandingkan 21 cabang olahraga, Tarakan mempertandingkan 2 cabang, Bontang 5 cabang, Balikpapan 8 cabang, Kutai Kartanegara 7 cabang, Kutai timur 5 cabang, dan Berau 3 cabang. ■ **MS**



Tempat Anda Membeli

MAJALAH TokohINDONESIA

MAJALAH BERBASIS WEBSITE TOKOH INDONESIA

Distributor Toko Buku:

PT. CENTRAL KUMALA SAKTI

Komplek Green Ville Blok BG No.67 Jakarta Telp. (021) 5640185, 5658088

- **TB. GRAMEDIA** ■ Taman Anggrek Mall ■ Citraland Mall ■ Pondok Indah Mall ■ Mega Mall, Pluit ■ Hero Gatot Subroto ■ Melawai ■ Matraman ■ Kelapa Gading Mall ■ Cempaka Mas ■ Pintu Air ■ Gajah Mada ■ Cinere Mall ■ Metropolitan Mall, Bekasi ■ Bintaro Plaza ■ Mahkota Mas, Tangerang ■ Karawachi Mall, Tangerang ■ Daan Mogot Mall, Tangerang
- **TB. GUNUNG AGUNG** ■ Taman Anggrek Mall ■ Pondok Gede ■ Blok M Plaza ■ Kwitang 6 ■ Kwitang 38 ■ Blok M Plaza ■ Kramat Jati Indah ■ Atrium Plaza ■ Tambun ■ Jl. Ir. Juanda, Bekasi ■ Arion Plaza ■ Depok Plaza ■ Citraland Mall ■ Sunter Mall ■ Hero Tendean ■ Trisakti
- **TB. GUNUNG MULIA** ■ Jalan Kwitang

OFFICE, HOTEL, MALL, DLL

- Ambassador Mall ■ Ranch Market, Kb. Jeruk ■ Cimone ■ Drug Store Hotel Sentral, Pramuka ■ Drug Store Hotel Sheraton, Gunung Sahari ■ Drug Store Hotel Maharaja, Tendean ■ Drug Store Hotel Century, Sudirman ■ Drug Store Hotel Menteng I ■ Drug Store Hotel Mega Matra, Matraman ■ Drug Store Hotel Menteng II ■ Drug Store Hotel Paninsula ■ Drug Store Hotel Ibis, Slipi ■ Drug Store Hotel Santika ■ Iana Drug Store Hotel Grand Melia, Rasuna Said ■ Anais Gift Hotel JW Marriot, Mega Kuningan ■ Drug Store Hotel Akasia ■ Drug Store Hotel Sahid Jaya ■ Drug Store Hotel Kristal ■ Drug Store Hotel Ambara ■ Hotel Classic, Jl. Samanhudi ■ Hotel Mulia Senayan ■ Drug Store Hotel Beautique, Depan Mall Taman Anggrek Grogol ■ Mini Market Angkur 26, Jl. Angkur 26 Kayu Putih, Jakarta ■ Mini Market Ikhtiar, Jl. Utan Kayu No.91, Jakarta ■ PT Promexx, Toko Buku & Alat Tulis, Jl. Ir. Juanda ■ Kantin Permata, Gedung Plaza Permata Thamrin ■ Koperasi Wisma Bumi Putera, Sudirman ■ Bon's Café, Gedung Menara Mulia, Gatot Subroto ■ Tower Corner Gedung Graha Niaga, Sudirman ■ Mini Market Alamanda, Menara Dea K, Mega Kuningan ■ Esca Deli BEJ, Tower II ■ Koperasi Wisma Indomobil, Jl. MT Haryono Kav.8 ■ Koperasi Agape, Jl. MT Haryono Kav.04-05 ■ Tutik Mini Market, Jl. Siaga Raya Pejaten ■ Kopkar LIA, Kampus LIA Pengadegan ■ Mini Market Markaz, Jl. Radio Dalam Raya No.50 ■ Koperasi STIE Perbanas, Rasuna Said ■ Kopkar Wisma Kodel, Rasuna Said ■ Restoran Bona Petit Gedung Wisma Budi, Rasuna Said ■ Mini Market Basement Gedung Wisma 77 ■ Monika Mini Market, Gedung Wisma Adhi Graha ■ Hotel Fm Beautique, Jl. S Parman ■ Kantin BNI Kantor Pusat Sudirman ■ Cafeteria Elektrika, Rasuna Said ■ Kantin Depkes, Rasuna Said ■ Koperasi Depnaker RI, Gatot Subroto ■ PT Global Bisnis Center Bank Danamon, Sudirman ■ Mini Market Ananda, Rawa Sari ■ Lobby Drug Store Apartemen Kusuma Candra SCBD ■ Counter Majalah Wisma BCA, Sudirman ■ Swalayan Al Maidah ■ Drug Store Hotel Bina Sentra (Bidakara), Pancoran ■ Wartel Putra, Pulo Mas Utara ■ Menara Jamsostek, Gatot Subroto Lt.2 ■ Don's Mart ■ Valentine's Mart ■ Hotel Kemang ■ Hotel Millenium ■ Apartemen Mediterania Palace Kemayoran ■ Graha Surya Intemusa, Rasuna Said ■ Hotel The Park Lane, Casablanca ■ Gedung Trans TV & Mega Bank

Distributor Agen:

- **KEDARTON AGENCY:** Stasiun Senen, Jakarta Telp. 021-9119176
- **AGEN UTAMA:** ■ KPA, Terminal Senen, Tlp.42877451 ■ MARLIN, Stasiun KA Senen, 08129956840 ■ HARIAN JAYA, Cawang, 08128309471 ■ ANTO'S, Kalimalang, 08129256715
- DAVID OXTO, Stasiun KA Senen, 9119180 ■ PURBA ST, Stasiun KA Senen, 0816974343
- TAMORA, Stasiun KA Senen, 9119175 ■ ARITONANG, Budi Utomo, 9220669
- RAELMAN, Budi Utomo, 9238167 ■ SIHITE, Budi Utomo, 9214526 ■ PURBA K, Kuningan, 5264955 ■ NAIBAHU, Cawang, 8577453 ■ SIMATUPANG, Cililitan, 80880572
- SIMALUNGUN, Kramat, 88980567 ■ MILU, Blok M, 7200669 ■ BERLIAN, Pramuka ■ KA GROUP, Bekasi, 08129825236 ■ MANULLANG, Cimone, 08129590050 ■ YULIANI, Medan, 061-4157471 ■ MEDY, Surabaya, 031-83205231

Atau Hubungi:

BAGIAN SIRKULASI ■ E-mail: sirkulasi@tokohindonesia.com
■ **JAKARTA** Tel: 021-83701736 Fax: 021- 9101871 ■ **BIRO BANDUNG** 022-7830773 ■ **BIRO MEDAN** 061-7850260

TokohINDONESIA Majalah Biografi Pertama dan Satu-satunya di Indonesia

The Excellent Biography

www.tokohindonesia.com

THE EXPERIENCE SITE